



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2008**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2005 - 2025**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN
GIANYAR TAHUN 2005 - 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan, terarah, dan terkoordinasi dan dapat mencapai sasaran yang diinginkan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gianyar;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan dokumen perencanaan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan;
 - c. bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 150 ayat (3) huruf e mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2005 – 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah

- Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

8. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2005 – 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Gianyar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut dengan RPJPD Kabupaten Gianyar adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud RPJPD Kabupaten Gianyar adalah sebagai acuan bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menentukan sasaran, arah kebijakan, program-program pembangunan, dan kegiatan yang akan dituangkan ke dalam RPJMD yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai acuan dalam penyusunan APBD tahun berikutnya.
- (2) Tujuan RPJPD Kabupaten Gianyar adalah :
- a. mewujudkan satu pedoman berwawasan jauh ke depan dalam menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan kondisi yang dimiliki untuk mengoptimalkan hasil-hasil pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna;
 - b. memudahkan seluruh jajaran Pemerintah Daerah untuk memahami dalam menentukan sasaran, arah kebijakan, serta program-program pembangunan daerah.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

Sistematika RPJPD Kabupaten Gianyar tahun 2005 – 2025 disusun sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan ;
- Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah ;
- Bab III Analisis Isu – Isu Strategis ;
- Bab IV Visi dan Misi Daerah ;
- Bab V Arah Kebijakan ;
- Bab VI Kaedah Pelaksanaan ;

BAB IV
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Program Pembangunan Daerah periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
- (2) Rincian dari program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJPD Kabupaten Gianyar merupakan dokumen perencanaan pembangunan bersifat makro yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional.

Pasal 6

- (1) RPJPD sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program kepala daerah.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) untuk tahunan pertama periode Pemerintahan Kepala Daerah berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun pertama periode Pemerintahan Kepala Daerah berikutnya.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 30 Oktober 2008

BUPATI GIANYAR,

TJOK OKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 30 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

COKORDA GDE PUTRA NINDIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2008 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2005 – 2025

1. UMUM

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disusun sebagai penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan daerah. Pembangunan daerah adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat daerah untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan daerah dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakatnya.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Visi Kabupaten Gianyar. Untuk itu dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi Kabupaten Gianyar untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya, lingkungan hidup, infrastruktur, dan kelembagaan sehingga kehidupan masyarakat Gianyar bisa lebih sejahtera.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sangat diperlukan, sejalan dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamantkan penyusunan RPJPD yang menganut arahan secara garis besar. Kurun waktu RPJPD adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJPD Daerah 2005 – 2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

RPJPD digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJMD sesuai dengan visi, misi, dan program kepala daerah yang terpilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD memuat arah kebijakan pengelolaan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan.

RPJMD sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan Kepala Daerah berikutnya. Sedangkan Kepala Daerah terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan RAPBD sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN. Sedangkan periodisasi RPJMN dikarenakan pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2005-2025 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan yang dimaksud RKPD tahun pertama adalah RKPD tahun 2013, 2018, dan 2023.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan RAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan RAPBD tahun pertama adalah RAPBD tahun 2013, 2018, dan 2023.

Pasal 8

Ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 11

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar
Nomor 12 Tahun 2008
Tanggal 30 Oktober 2008
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gianyar
Tahun 2005 – 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka setiap daerah berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana tahunan. Pada Pasal 4 disebutkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Dengan demikian dokumen ini lebih bersifat umum dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup dalam penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya sesuai kewenangan daerah.

Kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab yang diberikan kepada daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, harus diikuti dengan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan baik pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah. Agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tersebut benar-benar memiliki manfaat dan dampak jangka panjang bagi masyarakat luas, maka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan itu memerlukan upaya keberlanjutan dan berkesinambungan. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 154 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 mengamanatkan bahwa RPJP Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan secara jelas menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Maksud dari RPJP Daerah mengacu kepada RPJP Nasional bukan untuk membatasi kewenangan daerah, tetapi agar terdapat acuan yang jelas, sinergi, dan keterkaitan dari setiap perencanaan pembangunan di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimilikinya berdasarkan *platform* RPJP Nasional. RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah berdasarkan visi dan misi dirinya yang diformulasikan dalam bentuk RPJM Daerah.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 disebutkan bahwa kurun waktu RPJP Daerah sesuai dengan kurun waktu RPJP

Nasional. Sedangkan periodisasi RPJM Daerah tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional dikarenakan pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005. Di samping itu, Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantik menetapkan RPJM Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 juga menyatakan bahwa :

1. Untuk mengakomodasi RPJP Daerah yang telah ada, dan mengingat RPJP Daerah harus mengacu pada RPJP Nasional, maka RPJP Daerah baik substansi dan jangka waktunya perlu disesuaikan dengan RPJP Nasional.
2. Untuk mengakomodasi RPJM Daerah yang telah ada agar sesuai dengan RPJP Daerah yang telah disesuaikan dengan RPJP Nasional, maka RPJM Daerah substansinya perlu disesuaikan dengan RPJP Daerah tanpa harus menyesuaikan kurun waktu RPJM Daerah dengan RPJP Daerah maupun RPJM Nasional. Hal ini dikarenakan waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berbeda-beda tiap daerah.

Berdasarkan latar belakang ini RPJPD Kabupaten Gianyar 2006-2025 dipandang perlu untuk dilakukan revisi. Secara lebih spesifik revisi dilakukan karena :

1. RPJPD Kabupaten Gianyar 2006-2025 perlu disesuaikan substansi dan kurun waktunya dengan mengacu RPJP Nasional yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2007.
2. RPJMD Kabupaten Gianyar 2006-2009 merupakan bagian tahapan perencanaan pembangunan RPJPD Kabupaten Gianyar dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan, disusun bukan dalam era kepemimpinan Bupati Gianyar yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Padahal RPJMD substansinya merupakan upaya realisasi visi, misi dan program pembangunan bupati terpilih yang telah diutarakan dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung kepada rakyat.
3. Kabupaten Gianyar memiliki Bupati yang dipilih langsung oleh rakyat pada tahun 2008, dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan Kepala Daerah terpilih untuk menyusun RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, yang berarti sesuai dengan periode masa jabatannya. RPJMD Kabupaten Gianyar pada masa kepemimpinan Bupati periode 2008-2013 akan memiliki RPJMD dengan masa periode yang sama yaitu RPJMD Kabupaten Gianyar 2008-2013.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah lebih menitik beratkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu-individu pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara pemerintahan yang memiliki kompetensi olah pikir visioner, melalui pendekatan yakni : teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Dengan demikian perencanaan yang disusun merupakan produk dari semua elemen masyarakat, pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

Dengan disusunnya RPJP Kabupaten Gianyar Tahun 2005-2025, maka diharapkan pembangunan di Kabupaten Gianyar memiliki arah dan tujuan yang jelas terutama dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan masyarakat serta kemajuan pembangunan daerah pada berbagai aspek kehidupan.

1.2. MAKSUD dan TUJUAN

1.2.1. Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gianyar Tahun 2005-2025 disusun dengan maksud untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat terhadap pembangunan daerah sekaligus sebagai acuan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama.

1.2.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gianyar Tahun 2005-2025 antara lain :

- Merumuskan sasaran dan arah pembangunan Kabupaten Gianyar dalam kurun waktu 20 tahun kedepan sesuai potensi dan sumberdaya yang dimiliki berlandaskan filosofi Tri Hita Karana.
- Menyiapkan pedoman pembangunan daerah yang berorientasi jauh ke depan dan sinergis terhadap semua sektor-sektor pembangunan.
- Merumuskan program-program strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
- RPJP juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan penyusunan pembangunan tahunan Kabupaten Gianyar.

1.3. LINGKUP PEKERJAAN

1.3.1. Lingkup Wilayah Perencanaan

Kabupaten Gianyar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Bali yang memiliki luas wilayah 368 Km² atau sekitar 6,53 % dari luas wilayah Provinsi Bali. Kabupaten Gianyar meliputi 7 (tujuh) wilayah administrasi kecamatan yaitu : Kecamatan Payangan, Kecamatan Tegallalang, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Tampaksiring, Kecamatan Ubud dan Kecamatan Blahbatuh. Secara geografis Kabupaten Gianyar terletak diantara 80 18' 48" – 80 38' 58" Lintang Selatan, 1150 13' 29" – 1150 22' 23" Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Bangli
- Sebelah Timur : Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Bangli
- Sebelah Selatan : Selat Badung dan Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Badung dan Kota Denpasar

1.3.2. Lingkup Materi

Materi RPJP Kabupaten Gianyar memuat tentang :

- Gambaran umum kondisi daerah serta analisis isu-isu strategis;
- Sasaran pembangunan 20 tahun kedepan;
- Arah kebijakan pemerintah daerah, pembangunan dan kemasyarakatan dalam kurun waktu 20 tahun kedepan berupa rumusan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah.

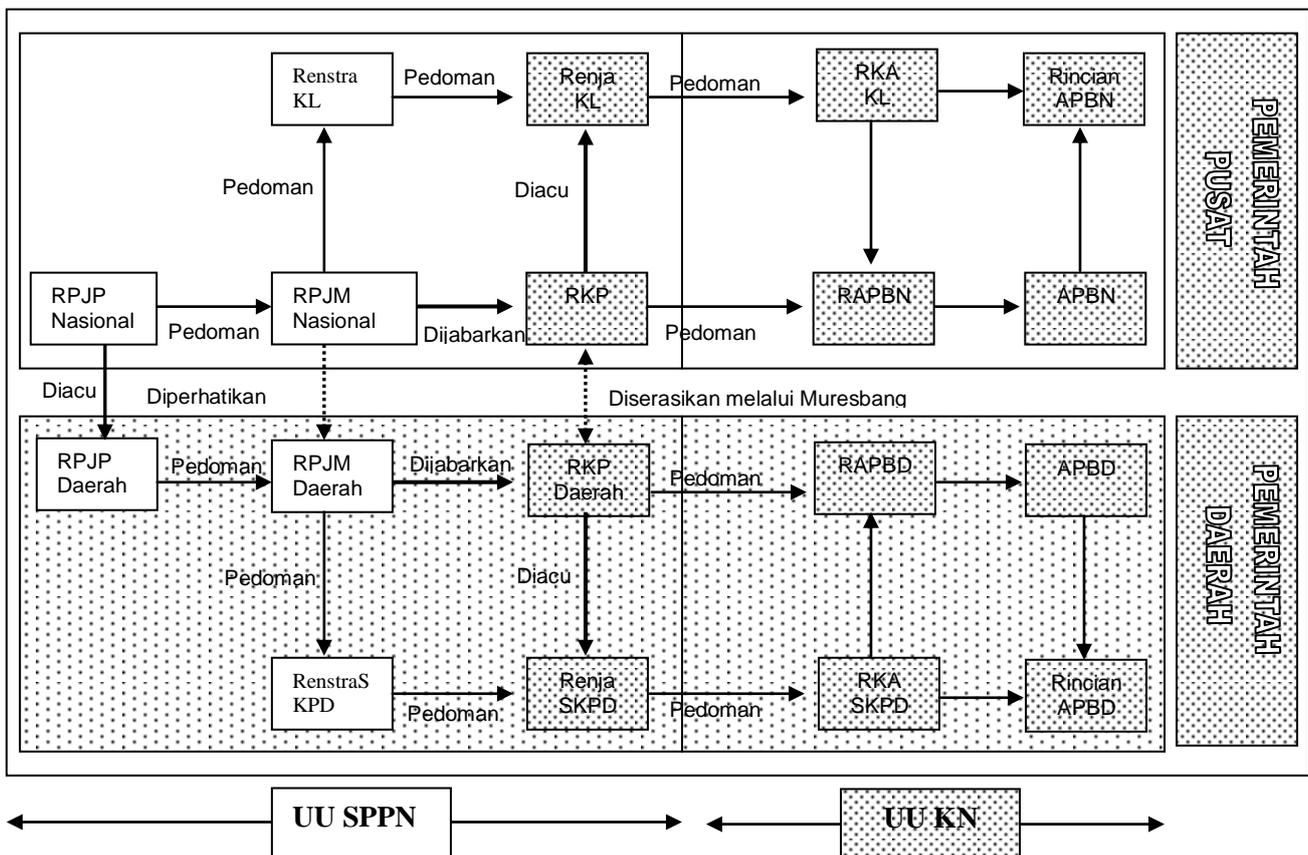
1.4. Hubungan RPJP Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Pembangunan daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional oleh karenanya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana RPJP Daerah Kabupaten Gianyar mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi, serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Daerah dan berpedoman pada RPJP Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gianyar sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan lainnya dapat dituangkan dalam gambar 1.2 berikut.

Gambar 1.2

Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.5. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Panjang (RPJPD) Kabupaten Gianyar berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817).

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

RPJP Daerah Kabupaten Gianyar 2005 – 2025 terdiri atas Enam Bab yaitu :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan serta landasan normatif penyusunan RPJP Daerah. Disamping itu pada Bab ini juga diuraikan secara diagramatis hubungan antara dokumen RPJP Daerah dengan dokumen RPJP Nasional.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Dalam Bab ini diuraikan kondisi dan analisis serta prediksi kondisi dimasa yang akan datang dari berbagai bidang dan aspek kehidupan, geomorfologi dan lingkungan hidup, demografi, ekonomi dan sumber daya alam, sosial budaya dan politik, prasarana dan sarana, pemerintahan serta aspek yang dianggap penting, selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Bab III Analisis Isu-Isu Strategis

Menguraikan tentang isu-isu strategis daerah dengan memperhatikan tantangan 20 tahun kedepan serta peluang-peluang yang dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

Bab IV Visi dan Misi Daerah

Dalam Bab ini akan diuraikan Visi dan Misi Daerah yang memuat rumusan keadaan yang diinginkan untuk rentang waktu 20 tahun kedepan, serta rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi daerah.

Bab V Arah Kebijakan

Memuat rumusan tentang arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

Bab VI Kaedah Pelaksanaan

Dalam Bab ini dijelaskan bahwa RPJP Daerah menjadi pedoman bagi seluruh pemangku-kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah, dan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah.

BAB II

KONDISI DAN PREDIKSI UMUM DAERAH

2.1. KONDISI SAAT INI

Pembangunan Kabupaten Gianyar yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi : bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana, politik, pertahanan keamanan, hukum dan aparatur, wilayah dan tata ruang serta pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dan lingkungan hidup. Disamping banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan dan masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan dan masih perlu dilanjutkan upaya penanganannya dalam pembangunan daerah 20 tahun ke depan yang meliputi bidang-bidang :

a. Fisik Wilayah

Kabupaten Gianyar, sebagai salah satu Kabupaten dari sembilan Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Bali memiliki topografi yang beragam antara wilayah kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lainnya. Kondisi fisik wilayah yang ada dipengaruhi oleh adanya 12 sungai yang membentang paralel dari arah utara sebagai hulu hingga keselatan sebagai muara sungai. Sehingga wilayah-wilayah yang berada pada jalur DAS (Daerah aliran sungai) cenderung memiliki topografi yang bergelombang dengan jurang dan lembah sungai yang cukup dalam antara 20 meter dibagian muara hingga 70 meter dibagian hulu. Sedangkan wilayah dataran berada pada kawasan pantai didaerah bagian Selatan dari wilayah Kabupaten Gianyar.

Wilayah-wilayah dataran umumnya terdapat aktivitas budidaya baik menyangkut usaha pertanian, permukiman maupun perusahaan lainnya. Dimana aktivitas ini berkembang di seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Gianyar. Sedangkan wilayah bergelombang dan agak curam umumnya terdapat di wilayah Ubud, Payangan, Tegallalang dan Tampaksiring.

Kondisi wilayah Gianyar yang bergelombang dan curam ternyata merupakan *fatum geographis* yang juga mendorong tumbuhnya investasi dibidang jasa akomodasi maupun jasa lainnya pada kawasan-kawasan yang curam tersebut. Panorama alam pada kawasan yang bergelombang dan curam tersebut sangat indah, tenang, nyaman dan menyejukan bagi wisatawan, sehingga Hotel-hotel yang berada dikawasan ini sering menjadi tujuan untuk mereka menginap selama melakukan kunjungan wisata di Bali.

Ditinjau dari aspek Geologi, maka secara umum formasi geologi di Kabupaten Gianyar termasuk dalam formasi geologi Buyan, Beratan dan Gunung Batur (Qpbb) yang berumur kuartar. Formasi ini pada bagian permukaan didominasi oleh tufa pasiran dan di beberapa tempat dijumpai tufa batu apung dan endapan lahar. Tufa pasiran umumnya melapuk menengah – tinggi berwarna kuning kecoklatan, berukuran pasir halus – kasar. Tufa batu apung berwarna putih kecoklatan, agak rapuh dan mudah lepas. Endapan lahar berwarna abu-abu sampai abu-abu kehitaman terdiri dari batuan beku andesit dan batuapung dengan masa tufa pasiran bersifat agak rapuh.

Purbo Hadiwidjojo, dkk, (1998), menyebutkan di Kabupaten Gianyar tidak tampak adanya struktur geologi, dengan kata lain wilayah Kabupaten Gianyar aman dari pengaruh struktur geologi/gerakan tanah (longsor). Namun demikian daerah-daerah yang mempunyai kemiringan >40% rawan akan terjadi gerakan tanah/longsor. Pada beberapa kawasan yang memiliki kemiringan > 40 % menunjukkan adanya indikasi gerakan tanah terutama pada tebing kiri-kanan sungai.

Sebagai daerah yang sangat strategis, karena merupakan *hinterland* dari Kota Denpasar, serta merupakan daerah yang selalu dilintasi oleh masyarakat lainnya baik yang menuju Kota Denpasar maupun yang menuju kota-kota lainnya di wilayah Bali Bagian Timur, maka perkembangan fisik kawasan juga cenderung akan dipengaruhi oleh *pergerakan* dan dinamika yang terjadi baik di Kota Denpasar dengan Kota-kota lainnya yang menjadi satu cluster pergerakan dengan kota Denpasar.

Dimensi spasial Perkembangan fisik wilayah di Kabupaten Gianyar secara alamiah berkembang dengan pola *urban sprawl*, hal ini dipengaruhi oleh kondisi wilayah yang bergelombang serta terbatasnya wilayah dataran yang ada, dimana sebagian besar telah dimanfaatkan untuk budidaya pertanian padi sawah, dan yang lainnya adalah untuk permukiman tradisional perdesaan, namun seiring perkembangan waktu, pola perkembangan fisik telah berkembang secara *linier*, dimana pertumbuhan fisik wilayah cenderung mengikuti jalur jalan, baik jalan arteri perkotaan maupun perdesaan. Perkembangan usaha perekonomian masyarakat di Gianyar cenderung berkembang secara linier, dimana jalur jalan yang memiliki arah pergerakan yang tinggi menjadi minat mayoritas bagi pengusaha lokal maupun pengusaha lainnya.

Permasalahan fisik wilayah yang cukup pelik di Gianyar adalah terjadinya penurunan luas lahan sawah produktif yang beralih fungsi dari pertanian ke non pertanian, dimana dalam kurun waktu Tahun 2003 hingga Tahun 2006 terjadi penurunan luas lahan sawah sebesar 5 hektar rata-rata per tahun. Dalam Tahun 2003 luas lahan sawah di Gianyar adalah seluas 14.937 Ha, kemudian dalam Tahun 2006 menurun menjadi 14.932 Ha.

Pengaruh menurunnya luas lahan sawah di Gianyar dikhawatirkan akan terus

meningkat dari tahun ke tahun, sehingga kondisi yang demikian akan berdampak buruk dengan semakin menurunnya produksi padi sawah yang akan berdampak pada timbulnya masalah ketahanan pangan dimasa-masa yang akan datang di Gianyar.

Tabel 2.1.
Luas Lahan Sawah di Kabupaten Gianyar Tahun 2003-2006

NO	PENGUNAAN LAHAN	TAHUN			
		2003	2004	2005	2006
1	Lahan Persawahan (Ha)	14.937,00	14.878,00	14.856,00	14.932,00
	a. Pengairan Setengah Teknis	14.111,00	14.057,00	14.035,00	14.033,00
	b. Pengairan Sederhana PU	623,00	203,00	203,00	203,00
	c. Pengairan Tradisional	203,00	618,00	618,00	696,00

Sumber : Laporan PDP3D Kabupaten Gianyar.

b. Sosial, Budaya dan Kehidupan Beragama

1. Kehidupan Sosial Budaya dan Keagamaan

Kehidupan sosial budaya bagi masyarakat di Kabupaten Gianyar, sangat dipengaruhi oleh budaya yang masih dijiwai oleh agama Hindu sebagai landasan filosofisnya, dimana berbagai aktivitas sosial budaya yang ada, baik yang meliputi seni tari, seni kerawitan, seni pedalangan, seni lukis, seni ukir dan lain-lainnya berakar pada agama Hindu.

Kerukunan hidup bermasyarakat di Kabupaten Gianyar dilandasi oleh gerak dan semangat kebersamaan seperti "*menyama braya, sagilik saguluk, ngandap kasor, paras paros, dan salunglung sabayantaka*", keyakinan terhadap "Karma Pala" sangat tinggi, dimana semuanya itu terwadahi dalam paguyuban seperti Banjar adat, Desa Pekraman, Subak, Sekha teruna, maupun sekha-sekha lainnya.

Wadah-wadah organisasi tradisional kemasyarakatan di Kabupaten Gianyar, umumnya juga berlaku sama sebagaimana halnya daerah lainnya di Propinsi Bali, sehingga berbagai wadah organisasi tradisional tersebut juga dapat ditemui di berbagai daerah lainnya di Propinsi Bali.

Keberadaan wadah organisasi kemasyarakat tradisional tersebut merupakan warisan yang secara turun temurun telah dilaksanakan dan selalu memberikan keharmonisan dalam kehidupan sosial bermasyarakat di Kabupaten Gianyar. Bahkan beberapa aktivitas kemasyarakatan tersebut terus semakin berkembang dan meningkat jumlahnya. Dan dalam perkembangan yang semakin modern, upaya pengembangan wadah organisasi kemasyarakat tersebut terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan, baik menyangkut pengaturan awig-awig, pemanfaatan teknologi dalam berbagai bidang, sehingga keberadaan organisasi tradisional mampu beradaptasi

dengan perkembangan zaman.

Awig-awig merupakan aturan adat yang mampu mengikat warganya untuk mematuhi aturan adat, sebagian besar masyarakat adat sangat menghormati keberadaan aturan adat (*awig-awig*) yang ada di desanya, sehingga keberadaan *awig-awig* mampu menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan bermasyarakat di daerah. Keberadaan *awig-awig* sebagai Peraturan Desa Adat yang mengikat bagi warga adat maupun pendatang disuatu wilayah tidaklah melanggar Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun keberadaan *awig-awig* merupakan salah satu seni dalam sistem hukum di Indonesia, karena sangat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum di Indonesia. Sehingga keberadaan *awig-awig* sebagai peraturan adat juga dilindungi dalam sistem hukum di Indonesia.

Kebersamaan sosial budaya dalam bingkai adat yang ada Gianyar, keberadaan *awig-awig* atau *perarem* belum menjamin seratus persen terhadap situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di Gianyar, dimana dalam kehidupan global yang sangat kompetitif dalam berbagai sektor kehidupan sosial masyarakat telah menimbulkan gesekan-gesekan di berbagai lapisan masyarakat. Dimana di Gianyar masih ditemui masalah-masalah sengketa adat, baik antar intern warga adat, maupun antara warga adat yang satu dengan warga adat yang lainnya.

Perspektif terhadap masalah adat di masa-masa yang akan datang diperkirakan akan masih ditemui dalam proses pembangunan di Kabupaten Gianyar, hal ini dapat bersumber baik pada persoalan yang masih terpendam dilingkungan warga adat, maupun munculnya permasalahan-permasalahan baru dilingkungan warga adat di Gianyar.

Upaya menekan masalah-masalah adat baik menyangkut konflik horisontal/vertikal di masyarakat perlu ditangani secara berkesinambungan dengan menitik beratkan pada upaya preventif atau pembinaan bagi warga adat agar tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di daerah.

Kabupaten Gianyar merupakan daerah pariwisata, dimana kondisi perekonomian yang terus meningkat telah mengakibatkan Kabupaten Gianyar sebagai tempat tujuan kedatangan baik bagi wisatawan, pengusaha yang ingin berinvestasi maupun para pendatang yang ingin mencari pekerjaan di Kabupaten Gianyar.

Para pendatang yang ingin mencari pekerjaan di Gianyar, umumnya memiliki latar belakang sosial budaya dan agama yang berbeda, dan perkembangan jumlah pendatang tersebut menunjukkan intensitas yang meningkat, sehingga kondisi yang demikian dapat menimbulkan gesekan yang dapat mengarah pada konflik maupun terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah. Oleh karenanya Peran Pemerintah Daerah untuk mewujudkan situasi yang aman dan tertib di daerah perlu mengayomi berbagai unsur yang ada didalamnya dengan melakukan pembinaan-pembinaan pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat di Daerah.

Kejadian Bom Kuta dan Legian yang juga memiliki pengaruh terhadap kondisi perekonomian di Gianyar, dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi segenap aparatur di daerah, agar senantiasa waspada terhadap bahaya terorisme. Upaya pencegahan yang dilakukan melalui tertib administrasi kependudukan seperti pemeriksaan KTP di daerah merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan situasi keamanan yang kondusif di Gianyar, sehingga kegiatan ini dapat dikembangkan dan ditingkatkan secara berkesinambungan.

Penghormatan terhadap kebebasan beragama dan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perlu terus dipupuk dan dikembang pada segenap lapisan masyarakat, agar tidak terjadi penistaan terhadap salah satu pemeluk agama yang menjadi minoritas, sehingga kasus konflik yang menjurus SARA dapat ditekan di daerah. Dalam tahun 2005 terdapat sebanyak 1.735 orang pemeluk agama Islam, Kristen Protestan 736 orang, kristen Katolik sebanyak 556 orang dan pemeluk agama Hindu sebanyak 412.997 orang dan Budha sebanyak 700 orang.

Masalah sosial lainnya di Kabupaten Gianyar yang perlu dikedepankan adalah menyangkut masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Dimana hingga akhir Tahun Perencanaan RPJP ini, masalah-masalah tersebut akan tetap bermunculan setiap saat.

2. Kemiskinan

Dalam kondisi ekonomi yang semakin menghimpit bagi keluarga menengah ke bawah pasca kenaikan BBM, telah membawa konsekwensi terhadap meningkatnya biaya-biaya hidup, biaya-biaya layanan baik terhadap pendidikan maupun kesehatan serta semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gianyar. Isu-isu strategis yang menuntut Pemerintah Daerah untuk meringankan biaya pendidikan dan kesehatan atau pengembangan layanan gratis terus dikumandangkan oleh kelompok masyarakat miskin, seolah-olah hal tersebut merupakan suatu kebutuhan pokok yang perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gianyar selama periode 2002 hingga 2006 menunjukkan peningkatan baik dalam jumlah maupun persentasenya terhadap total jumlah penduduk dengan rata-rata peningkatan setiap tahunnya sebesar 7,82 persen. Pada tahun 2002, jumlah penduduk miskin sebanyak 26.052 orang atau sekitar 6,46 persen dari jumlah penduduk Kabupaten. Tahun 2003 jumlah penduduk miskin sekitar 31.427 orang atau sebanyak 7,54 persen, Tahun 2004 penduduk miskin Gianyar kembali meningkat di banding tahun 2003 menjadi sebanyak 32.704 orang atau sebanyak 7,75 persen dari 422.186 orang penduduk, dan Tahun 2006 penduduk miskin kembali bertambah menjadi 35.315 orang atau 9,12 persen dari sejumlah 387.183 penduduk kabupaten.

Mengingat laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi dan tidak terkendali, serta tidak diimbangi dengan laju pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi tingkat

kesejahteraan masyarakat serta menimbulkan bertambahnya keluarga miskin. Perkembangan keluarga miskin dari tahun ke tahun selalu mengalami dinamika sesuai dengan situasi perekonomian daerah maupun regional dan nasional. Pada tahun 2002 jumlah keluarga miskin 3.336 KK atau 4,20 persen dari 79.354 Rumah Tangga yang ada. Tahun 2006, keluarga miskin di Kabupaten Gianyar meningkat menjadi sebanyak 7.629 KK atau 8,16 persen dari 93.528 Rumah Tangga yang ada. Gambaran selengkapnya kondisi keluarga miskin di Kabupaten Gianyar maupun keadaan per kecamatan sebagaimana disajikan dalam table berikut.

Tabel 2.2
Jumlah Keluarga Miskin Per Kecamatan di Kabupaten Gianyar
Tahun 2002 - 2006

JENIS DATA		TAHUN				
		2002	2003	2004	2005	2006
1.	Sukawati	247	310	643	952	1.022
2.	Blahbatuh	549	698	799	1.034	1.267
3.	Gianyar	661	954	1.469	1.285	1.389
4.	Tampaksiring	294	428	401	695	838
5.	Ubud	223	232	401	1.266	561
6.	Tegallalang	840	978	1.033	771	1.277
7.	Payangan	522	634	910	470	1.275
Jumlah		3.336	4.234	5.656	6.473	7.629

Sumber : UPTD Gianyar Sejahtera Dinas Kersos.dan BPS Kab. Gianyar

Dimasa-masa yang akan datang jumlah keluarga miskin dan masyarakat miskin di Gianyar diprediksikan akan terus meningkat, sehingga hal ini akan menjadi salah satu indikator penghambat dalam menyukseskan pembangunan dan peningkatan IPM di Kabupaten Gianyar. Salah satu faktor pendorong yang dapat menimbulkan peningkatan jumlah masyarakat miskin di Gianyar adalah adanya faktor kerentanan (*Vulnerability*) di lingkungan masyarakat. Dimana di Gianyar banyak terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang tergolong rentan terhadap kemiskinan, sehingga apabila terdapat gesekan ekonomi seperti kenaikan BBM dan lain-lainnya, maka kelompok masyarakat rentan tersebut akan mudah terjatuh dalam kelompok warga miskin.

Upaya penuntasan masyarakat miskin di daerah secara maksimal merupakan tugas dan kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Oleh karenanya upaya pengembangan kebijakan pembangunan dan program-program pembangunan didaerah senantiasa harus memiliki (i) kepekaan dan keberpihakan terhadap masyarakat miskin, (ii) mampu mendorong tumbuhnya investasi dan penyerapan tenaga kerja, (iii) mampu memberdayakan masyarakat miskin untuk tumbuh menjadi masyarakat mandiri dan madani, serta (iv) senantiasa berupaya untuk memenuhi hak-hak masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti layanan terhadap kesehatan dan pendidikan.

3. Ketenagakerjaan

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Gianyar, maka pertumbuhan angkatan kerja juga dirasakan semakin meningkat, dimana dalam Tahun 2002 jumlah angkatan kerja adalah sebanyak 223.472 orang, meningkat di Tahun 2006 hingga menjadi 239.473 orang.

Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 225.872 orang telah memiliki status bekerja, sedangkan yang mencari pekerjaan sebanyak 13.601 orang dalam Tahun 2006. Tingkat pengangguran terbuka di Gianyar adalah sebesar 5,68 % dalam Tahun 2006.

Kondisi meningkatnya angkatan kerja dan pencari kerja di Gianyar, perlu disikapi dengan serius oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, dimana selama ini masih dirasakan kondisi peluang kerja dan lapangan kerja yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, tumbuhnya tidak seimbang dengan semakin meningkatnya jumlah pencari kerja di Gianyar.

Dalam Tahun 2002 Tingkat pengangguran terbuka di Gianyar adalah sebesar 5,20 %, kemudian di Tahun 2003 meningkat menjadi 8,01 %, Tahun 2004 sebesar 3,51 % dan Tahun 2005 meningkat lagi menjadi 7,59 %, sehingga rata-rata tingkat pengangguran terbuka mencapai sebesar 6,07 %. Tingginya tingkat pengangguran terbuka di Gianyar akibat dari meningkatnya pertumbuhan pencari kerja di Gianyar, dimana pencari kerja di Gianyar memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 42,00 % dalam kurun waktu Tahun 2002-2005.

Berikut adalah indikator ketenagakerjaan di Kabupaten Gianyar dari Tahun 2002-2005.

Tabel 2.3.

Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Gianyar Tahun 2002-2005

INDIKATOR	TAHUN				Rata2 Pertumbuhan (%)
	2002	2003	2004	2005	
1. Penduduk Usia Kerja (orang)	337.974	352.096	317.254	354.905	2,05
2. Angkatan Kerja (orang)	223.472	235.635	240.766	243.505	2,92
3. Bekerja (orang)	211.844	216.770	232.326	225.030	2,12
4. Mencari kerja (orang)	11.628	18.883	8.440	18.475	42,00
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,20	8,01	3,51	7,59	6,07
6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	66,12	66,92	75,89	78,11	5,85
7. Rata-Rata Kebutuhan Hidup Minimum (Rp.)	476.385	486.856	498.990	703.005	15,19
8. Rata Upah Minimum Kabupaten (Rp.)	245.000	423.000	446.265	475.000	28,20

Sumber data : 1. s/d 7. BPS Kab. Gianyar dan 8 Bagian Nakertrans Setda Kab. Gianyar

Upaya perbaikan pendapatan pekerja perlu dicermati setiap saat, agar masyarakat dan pekerja dapat menikmati hidup layak di Gianyar dengan memperhatikan standar upah minimum yang diberikan oleh masing-masing usaha yang ada di Gianyar. Dalam tahun 2002-2005 kenaikan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) mencapai 14.54 persen, yaitu dari semula Rp. 476.385,- pada tahun 2002 menjadi Rp. 703.005, di tahun 2005. Sedangkan untuk Upah Minimum Kabupaten (UMK) mengalami kenaikan yang cukup tajam, yaitu sebesar 28,20 persen dari Rp.245.000,- Tahun 2002 menjadi Rp. 475.000,- Tahun 2005.

Dalam kurun waktu 2002-2005, sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor Industri Pengolahan yaitu sebesar 24,38 %, kemudian Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel sebesar 20,60 % dan ketiga terbanyak adalah sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan sebesar 19,44 %. Sedangkan sektor yang menyerap tenaga kerja terendah adalah sektor Listrik, Gas dan Air serta sektor lain-lain. Selengkapnya perkembangan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Gianyar sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel 2.4.

Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Gianyar

LAPANGAN USAHA		TAHUN				Rata-Rata (%)
		2002	2003	2004	2005	
1.	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan	41.946	52.285	59.899	55.913	19,44
2.	Pertambangan dan penggalian	142	2.052	5.044	2.804	14,06
3.	Industri pengolahan	66.199	72.012	53.156	72.148	24,38
4.	Listrik, Gas dan Air	285	342	398	168	0,11
5.	Bangunan	18.294	14.211	16.516	25.264	6,87
6.	Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel	50.457	40.868	58.976	72.372	20,60
7.	Angkutan, pergudangan dan komunikasi	7.505	6.114	9.054	10.431	3,06
8.	Keuangan, asuransi, usaha sewa	2.296	3.717	2.474	5.636	1,31
9.	Jasa kemasyarakatan	24.008	24.055	26.809	34.041	10,08
10.	Lain-lain	712	1.114	-	1.626	0,09
Jumlah		211.844	216.770	232.326	280.403	100,00

Sumber : BPS Kab. Gianyar.

4. Pendidikan

Sektor pendidikan memiliki peran yang sangat tinggi dalam meningkatkan kemampuan SDM masyarakat di daerah, oleh karenanya untuk memajukan pembangunan di daerah peningkatan peran pendidikan sebagai prioritas pembangunan perlu mendapat perhatian secara serius untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.

Ketersediaan prasarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan umumnya sudah cukup memadai yang ditinjau dari jumlah murid sekolah disemua jenjang pendidikan dengan ketersediaan prasarana sekolah. Hingga tahun 2005 di Kabupaten Gianyar telah terdapat 285 untuk sekolah dasar, 42 sekolah SLTP dan 37 unit sekolah tingkat SMU/SMK.

Disisi lain untuk kebutuhan pengembangan kemampuan anak usia dini (PAUD) maka di Gianyar telah terdapat sebanyak 90 unit sekolah TK. Mengingat tingkat sekolah ini sangat dibutuhkan untuk menyiapkan kepribadian anak usia dini untuk belajar di sekolah dasar, maka pengembangan sekolah TK ini masih diperlukan baik di tingkat perkotaan maupun perdesaan.

Dilihat dari keadaan kondisi ruang kelas yang paling memprihatinkan di Kabupaten Gianyar adalah Sekolah Dasar. Dimana ruang kelas sekolah dasar dengan kondisi baik sebanyak 968 ruang kelas, rusak ringan sebanyak 538 ruang kelas dan yang mengalami rusak berat sebanyak 347 ruang kelas.

Disisi lain rasio murid-guru dan murid-sekolah merupakan indikator untuk mengukur daya tampung dan efektifitas proses belajar-mengajar. Ketersediaan sarana fisik sekolah misalnya, menjadi semakin efektif kalau sepadan dengan daya tampung muridnya. Demikian juga guru dan murid, menjadi semakin terjamin proses belajar mengajarnya. Rasio jumlah murid-guru pada jenjang pendidikan SD sebesar 16. dengan kata lain, tiap guru SD mendidik/mengajar rata-rata 16 hingga 17 murid. Pada tingkat SLTP rasio murid-guru mencapai 12,09 dan tingkat SM/SMU rasio murid-guru sebesar 10,29.

Dalam jangka panjang bidang pendidikan diperkirakan akan memiliki masalah baru sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, antara lain :

- *Semakin tingginya biaya-biaya pendidikan baik ditingkat sekolah dasar, SLTP maupun SMU, hal ini akibat implikasi dari kenaikan harga-harga dan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat di masa-masa yang akan datang, sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan anak putus sekolah yang semakin tinggi. Isu terhadap kebutuhan layanan pendidikan gratis/murah atau terjangkau akan semakin menjadi kebutuhan mutlak di daerah.*
- *Kebutuhan pengembangan SDM yang mampu menghadapi persaingan global semakin dituntut dalam dunia pendidikan, dimana pengembangan sekolah-sekolah atau pusat pendidikan berstandar nasional dan internasional semakin diperlukan, hal ini akan mendorong terhadap pengembangan kemampuan SDM daerah yang mampu memahami hitech (Teknologi Tinggi), sehingga Kabupaten Gianyar tidak tertinggal jauh dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya dalam bidang teknologi.*
- *Penerapan IT (Tehnologi Informatika) dalam jenjang pendidikan ditingkat SLTP dan SMU semakin dibutuhkan guna menunjang pengembangan teknologi informatika di daerah, sehingga setiap pelajar sekolah di daerah memahami perkembangan teknologi informasi dan perkembangan global.*
- *Upaya pemeliharaan dan pengembangan prasarana dan sarana sekolah yang memadai akan menjadi kebutuhan mutlak di masa yang akan datang, oleh karenanya pengalokasian anggaran untuk kebutuhan pemeliharaan dan*

pengembangan prasarana dan sarana pendidikan perlu dipertimbangkan sebagai indikator wajib dan prioritas dalam pembangunan di daerah.

- *Capaian angka partisipasi baik APK maupun APM, baik ditingkat sekolah dasar, SLTP, maupun SLTA diprediksi akan menurun akibat adanya anak putus sekolah akibat kekurangan biaya hidup keluarga, sehingga kebutuhan akan pemberian beasiswa bagi anak kurang mampu dan berprestasi perlu dikembangkan secara berkesinambungan untuk memajukan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Gianyar.*

5. Kesehatan

Pelayanan kesehatan di tingkat perdesaan umumnya telah terlayani oleh Puskesmas maupun Puskesmas pembantu yang ada di masing-masing desa, disamping fasilitas tersebut Pemerintah Kabupaten Gianyar juga melayani kesehatan masyarakat melalui Puskesmas Keliling, maupun Rumas sakit Umum Sanjiwani. Dalam Tahun 2005 jumlah Puskesmas di Gianyar sebanyak 82 unit yang terdiri dari 13 unit Puskesmas, 56 Puskesmas Pembantu dan 13 unit Puskesmas Keliling.

Selain prasarana kesehatan dimaksud, guna mendukung kinerja bidang kesehatan, penyediaan sumberdaya manusia baik medis maupun paramedis amatlah penting. Penyediaan tenaga medis dan paramedis di Puskesmas dan Dinas Kesehatan dalam tahun 2005 sebanyak 510 orang. Untuk tenaga medis dan paramedis di RSUD sebanyak 362 orang.

Perkembangan jumlah tenaga medis di RSUD Sanjiwani Gianyar terus mengalami peningkatan baik pada tenaga medis maupun para medis lainnya, Kini jumlah tenaga dokter umum sebanyak 17 orang, Dokter Spesialis 30 orang, Dokter gigi 4 orang, Perawat 207, Bidan 30 orang, dan tenaga kesehatan lainnya 56 orang.

Masalah pembangunan kesehatan di Gianyar terlihat bahwa beberapa indikator kesehatan di Gianyar masih perlu penanganan yang lebih serius, dimana indikator-indikator yang memburuk antara lain tingkat kematian bayi, Balita kurang gizi, angka kematian ibu, serta jumlah penderita HIV/AIDS dan penderita narkoba.

Indikator-indikator diatas menunjukkan trend buruk yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dimana memburuknya angka capaian layanan kesehatan tersebut dapat mencerminkan (i) masih rendahnya kualitas layanan kesehatan di Gianyar, (ii) terbatasnya prasarana dan sarana kesehatan maupun obat-obatan, (iii) rendahnya mutu pelayanan rumah sakit maupun puskesmas, (iv) rendahnya kesejahteraan petugas kesehatan, sehingga berpengaruh terhadap rendahnya kualitas layanan kesehatan.

Masalah lain yang saat ini menjadi kebutuhan di Kabupaten Gianyar adalah tersedianya layanan kesehatan dengan biaya murah dan terjangkau bagi rakyat miskin di daerah, dimana biaya layanan kesehatan yang masih dianggap

mahal seperti biaya persalinan, biaya rawat inap dianggap masih memberatkan masyarakat, sehingga masyarakat cenderung mencari alternatif yang berakibat pada memburuknya indikator kesehatan di Gianyar.

Tabel 2.5.
Perkembangan Indikator Kesehatan di Kabupaten Gianyar
Tahun 2003-2006

JENIS INDIKATOR	CAPAIAN			
	2003	2004	2005	2006
1. Jumlah Balita Kurang Gizi (Bayi)	204	146	127	155
2. Angka Kematian Bayi/ AKB (Bayi/1000)	9,40	7,67	8,24	9,32
3. Angka Kematian Balita /AKABA (Balita/1000)	-	-	1,67	1,65
4. Angka Kematian Ibu (Ibu/100.000)	44,09	30,68	30,53	90,30
5. Jumlah Penderita Narkoba (Orang)	9	4	254	101
6. Jumlah Penderita HIV/AIDS (orang)	7	9	16	34
7. Jumlah Balita (Balita)	33.086	31.040	31.049	31.631
8. Rata-Rata Kunjungan ke Puskesmas (Orang/hari)	55	56	50	83

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Gianyar & Prop. Bali

Disisi lain kebutuhan terhadap ketersediaan SDM kesehatan yang memadai baik dari segi kualitas kesehatan (Spesialisasi), maupun jumlah tenaga kesehatan semakin diperlukan. Harapan masyarakat lainnya adalah meningkatnya kemampuan Rumah Sakit Umum Sanjiwani dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas dan tanggap terhadap situasi darurat, tersedianya layanan kamar/rawat inap yang memadai, biaya murah dan terjangkau bagi masyarakat miskin di daerah.

c. Ekonomi

1. Kondisi Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi Kabupaten Gianyar yang dibangun pada empat sektor unggulan yaitu sektor pertanian, industri kerajinan, serta perdagangan, hotel dan restoran serta jasa-jasa telah mampu membuka beragam peluang yang dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Gianyar.

Berkembangnya industri pariwisata di kabupaten Gianyar telah mampu menggerakkan sektor-sektor yang mempunyai keterkaitan langsung dengan industri pariwisata, seperti sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan Hotel dan Restoran, kedua sektor tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Gianyar.

Pada Tahun 2002 kontribusi sektor industri pengolahan di kabupaten Gianyar sebesar 18,23 % dan terus mengalami penurunan hingga pada Tahun 2003 kontribusinya 17,98 %, Tahun 2004 sebesar 17,77 %, 2005 sebesar 17,48 % dan bahkan Tahun 2006 hanya sebesar 17,38 %. Namun demikian sektor industri pengolahan hendaknya terus mendapat perhatian dan pembinaan yang intensif dari

Pemerintah Daerah, mengingat sektor ini merupakan komponen ekonomi kerakyatan yang sangat potensial dalam penyerapan tenaga kerja terutama kelompok industri kecil dan kerajinan rumah tangga.

Hal yang sama juga terjadi pada Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dimana kontribusinya pada Tahun 2002 mencapai 31,12 %, tetapi Tahun 2003 hanya 30,90 %, Tahun 2004 menjadi 30,70 %, Tahun 2005 menjadi 29,47 % dan Tahun 2006 hanya sebesar 28,86 %.

Sedangkan sektor yang paling kecil kontribusinya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2006 adalah sektor pertambangan dan penggalian yaitu 0,56 %. Disamping itu sektor listrik, gas dan air minum sumbangannya kurang dari 1 % yaitu hanya 0,89 %.

Struktur perekonomian Kabupaten Gianyar bila dibandingkan dengan struktur ekonomi Provinsi Bali tampak pola penajaman peranan sektoral yang sudah sejalan yaitu sudah mengarah kepada struktur ekonomi maju yang lebih dominan didukung sektor sekunder dan tersier.

Tabel 2.6.
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (Dalam Persentase)

No	Lapangan Usaha	Gianyar		Bali	
		2002	2006	2002	2006
1	Pertanian	20,83	20,47	21,95	19,96
2	Pertambangan dan Penggalian	0,41	0,56	0,65	0,69
3	Industri	18,23	17,38	9,21	8,70
4	Listri, Gas dan Air	0,80	0,93	1,53	1,94
5	Bangunan/Konstruksi	4,49	4,32	4,06	4,28
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	31,12	28,86	28,58	28,88
7	Angkutan dan Komunikasi	4,49	4,76	11,07	11,86
8	Keuangan dan Persewaan	4,61	4,90	6,83	7,46
9	Jasa-jasa	15,02	17,81	16,13	16,22
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Gianyar, Tahun 2007

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu dampak nyata atas keberhasilan beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan pada waktu sebelumnya sehingga pembangunan secara keseluruhan juga bergerak kearah yang sama.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar yang ditunjukkan oleh PDRB atas dasar harga konstan 2000 mengalami perubahan yang cukup drastis. Pada masa sebelum krisis (Tahun 1994-1996) rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar adalah 8,06 %. Puncak dari krisis terjadi pada Tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar pada saat itu berkontraksi minus 2,62 %. Hal tersebut menunjukkan penurunan yang cukup tajam selama periode 1996-1998. Pada Tahun 1999, perekonomian Kabupaten Gianyar tumbuh sebesar 1,76 %, bahkan pada Tahun 2000 PDRB Kabupaten Gianyar tumbuh sebesar 4,70 %. Namun tragedi WTC 11 September 2001, berpengaruh buruk terhadap pariwisata Internasional, juga mempengaruhi pariwisata di Kabupaten Gianyar, sehingga pertumbuhannya menurun menjadi 4,45 % di Tahun 2001. Bom Kuta pada Oktober 2002 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar tahun 2002 hanya sebesar 3,48 %, dan di Tahun 2003 hanya mencapai 3,33 %, angka ini lebih rendah dari pada pertumbuhan ekonomi Bali yang mencapai 3,70 %. Kemudian dalam Tahun 2004 perekonomian Kabupaten Gianyar mulai membaik sehingga tumbuh mencapai 4,95 %, kemudian Tahun 2005 pertumbuhan ekonomi meningkat lagi mencapai 5,47 %, namun demikian dalam tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar kembali turun lagi sedikit mencapai 5,20 %, dan kondisi ini masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang mencapai 5,28 %. Adapun perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gianyar dapat diuraikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.7.
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gianyar

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2002	3,48 %
2003	3,33 %
2004	4,95 %
2005	5,47 %
2006	5,20 %

Sumber : BPS Kabupaten Gianyar

3. PDRB Per Kapita

PDRB per Kapita sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan bruto yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun.

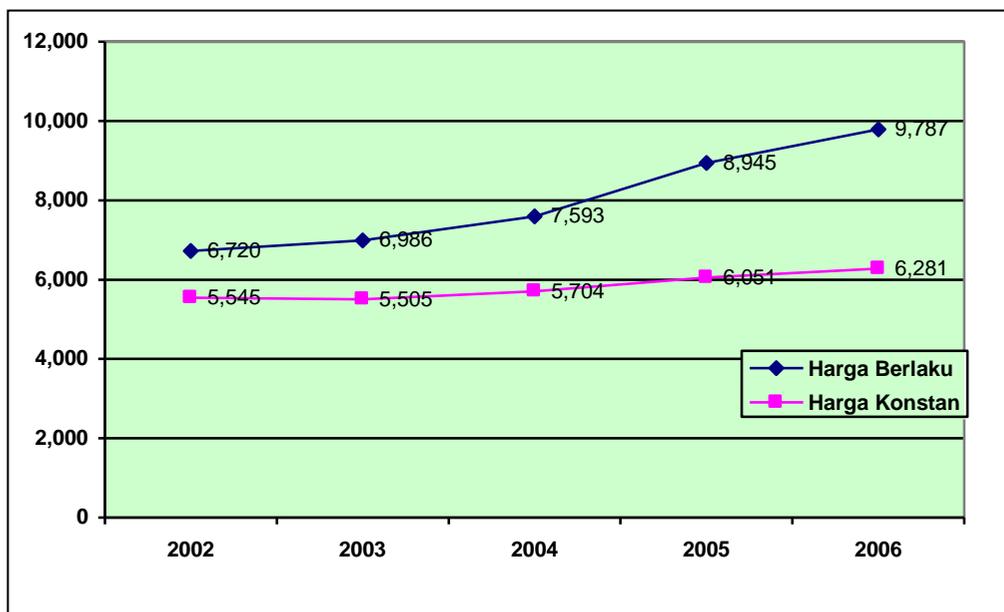
Dalam Tahun 2002, PDRB per Kapita masyarakat di Kabupaten Gianyar atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 6,720 Juta, Tahun 2003 mencapai Rp. 6,986 Juta, Tahun 2004 mencapai Rp. 7,593 Juta, Tahun 2005 mencapai Rp. 8,945 Juta dan tahun 2006 mencapai Rp. 9,787 Juta. Dibandingkan dengan Tahun 2005, PDRB per Kapita Tahun 2006 menunjukkan adanya peningkatan sebesar 9,41 % atau sebesar

Rp. 842 Juta.

Berdasarkan tinjauan terhadap harga konstan 2000 dalam kurun waktu yang sama juga memperlihatkan peningkatan dari Rp. 5,545 Juta Tahun 2002 menjadi Rp. 5,505 Juta Tahun 2003, Tahun 2004 naik menjadi Rp. 5,704 Juta dan meningkat lagi Tahun 2005 menjadi Rp. 6,051 Juta lebih, sedangkan pada Tahun 2006 mencapai Rp. 6,281 Juta yang berarti meningkat 3,80 % dari Tahun sebelumnya.

Adapun perkembangan PDRB per Kapita berdasarkan harga Konstan dan harga berlaku dapat dituangkan dalam grafik berikut.

Gambar 1.
Perkembangan PDRB Per Kapita Di Kabupaten Gianyar



Permasalahan pemerataan pendapatan di Gianyar merupakan salah satu isu strategis yang berkembang di Gianyar, dimana selama ini masih dirasakan adanya ketimpangan pendapatan antar wilayah kecamatan di Gianyar. Kecamatan Ubud yang dikenal sebagai daerah pariwisata dirasakan lebih sejahtera dibandingkan daerah lainnya di Gianyar, dimana PDRB per Kapita Kecamatan Ubud Tahun 2002 sudah mencapai Rp. 11,485 Juta dan Tahun 2006 mencapai Rp. 16,039 Juta, sedangkan untuk kecamatan lainnya di Kabupaten Gianyar masih berada dibawah Rp. 10,000 Juta.

Adanya *Disparitas* ini telah mengakibatkan terjadinya ketimpangan dalam perkembangan fisik wilayah, serta semakin tingginya strata sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Kebutuhan untuk pemerataan pendapatan telah menjadi kebutuhan masyarakat, dimana Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyeimbangkan perkembangan pertumbuhan investasi antar wilayah.

Tabel 2.8.
PDRB Per Kapita Per Kecamatan di Kabupaten Gianyar

Kecamatan	2002	2006
Sukawati	5,579,068.90	8,171,459.01
Blahbatuh	4,938,879.33	7,443,962.18
Gianyar	6,196,451.46	9,148,982.17
Tampaksiring	6,683,766.38	9,892,433.39
Ubud	11,485,069.84	16,039,331.47
Tegallalang	6,024,331.29	8,859,316.15
Payangan	6,106,699.18	9,006,229.01

Sumber : Laporan PDP3D Kab. Gianyar.

d. Pertanian

Pertanian tanaman pangan di Kabupaten Gianyar merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Gianyar, dimana tanaman padi sawah merupakan satu-satunya komoditi yang mampu menjadi sektor basis (*Basic Sector*), dibandingkan dengan komoditi lainnya.

Dalam Tahun 2005 Produksi gabah di Kabupaten Gianyar adalah sebanyak 183,50 ribu ton dengan luas panen 31,47 ribu ha, sedangkan produksi berasnya adalah sebanyak 107,50 ribu ton, sehingga diperkirakan terdapat sekitar 41,56 % penyusutan, jika dibagi dengan jumlah penduduk Tahun 2005, maka produksi beras masih sangat mencukup untuk pemenuhan kebutuhan penduduk, sehingga Kabupaten Gianyar masih mengalami surplus beras sebesar 41,18 ribu ton dalam Tahun 2005.

Sedangkan untuk komoditi lainnya seperti Jagung, Kedelai, dan lain-lainnya produksinya tidaklah sebesar produksi beras, sehingga komoditi-komoditi tersebut perlu dikembangkan dengan baik agar menjadi sektor basis di Gianyar, dengan tetap memperhatikan hasil produksi tanaman padi sawah agar tetap mampu menjaga keseimbangan ketahanan pangan di Gianyar.

Tabel 2.9.
Kondisi Pertanian di Kabupaten Gianyar

No	Indikator	Tahun 2005
1	Luas Panen (Ribu Ha)	31,47
2	Luas Tanam (Ribu Ha)	31,17
3	Produksi Gabah (Ribu Ton)	183,50
4	Susut (%)	41,56
5	Produksi Beras (Ribu Ton)	107,50
6	Jumlah Penduduk (Ribu Orang)	383,59
6	Konsumsi Beras (Kg/orang/hr)	0,40
7	Kebutuhan Beras (Ribu Ton)	66,32
7	Surplus (Ribu Ton)	41,18
8	Produktivitas (Ton/Ha)	5,83

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Gianyar.

E. Kepariwisataan

Kepariwisataan di Gianyar berkembang cukup baik, bahkan beberapa kawasan dan obyek pariwisatanya telah terkenal hingga Mancanegara, Kawasan Ubud sebagai kampung seniman di Gianyar telah menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjunginya, disamping itu di kawasan Ubud sudah berkembang berbagai jasa akomodasi bertaraf internasional sehingga Ubud telah menjadi icon Pariwisata di Gianyar.

Selain kawasan pariwisata Ubud, di Gianyar juga terdapat obyek-obyek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, beberapa obyek wisata yang sudah terkenal adalah Goa Gajah, Gunung Kawi Tampaksiring, Gunung Kawi Sebatu, Tirta Empul, Wenara Wana dan lain-lainnya.

Hal yang paling menggembirakan bagi perkembangan kepariwisataan di Gianyar adalah mulai pulihnya kunjungan wisatawan ke kondisi normal pasca peledakan Bom Bali I dan II, bahkan kunjungan wisatawan tersebut menunjukkan kondisi yang akan semakin meningkat, dimana dalam periode Tahun 2003 hingga 2005 kunjungan wisatawan di Gianyar memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 9,9 % per tahun, dimana Pertumbuhan kunjungan wisatawan Mancanegara mencapai 19,58 % dan kunjungan wisatawan Nusantara mencapai 13,49 %.

Meningkatnya grafik kunjungan wisatawan di Gianyar merupakan potensi dan kekuatan Kabupaten Gianyar untuk mengembangkan kepariwisataan di Gianyar. Peningkatan pertumbuhan kunjungan wisatawan menunjukkan gambaran bahwa kepariwisataan di Gianyar memiliki prospek yang cukup baik untuk menjadi potensi unggulan dalam pengembangan wilayah.

Tabel 2.10.
Perkembangan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Gianyar

JENIS DATA	TAHUN			Pertumbuhan (%)
	2003	2004	2005	
Jumlah Wisatawan (Orang)	415.995	518.384	493.451	9.9
a. Mancanegara	298.479	432.562	407.652	19.58
b. Nusantara	117.516	85.822	85.799	13.49

Sumber : Laporan PDP3D Kab. Gianyar

F. Industri dan Perdagangan

Sektor industri dan perdagangan di Gianyar merupakan salah satu pilar unggulan dalam struktur perekonomian Daerah, dimana sektor industri dan perdagangan di Gianyar merupakan salah satu sektor yang terbanyak dalam penyerapan tenaga kerja maupun penyumbang terbesar ketiga dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Gianyar.

Perkembangan industri dan perdagangan di Gianyar memiliki sinergi dengan sektor-sektor lainnya di Gianyar, khususnya dibidang kepariwisataan, karena umumnya usaha industri dan perdagangan yang berkembang di Gianyar merupakan *Backward linkages* dari perkembangan wisata di Gianyar, Sektor industri dan perdagangan di Gianyar juga merupakan *sektor basis* di Gianyar, yang juga merupakan sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di luar Gianyar.

Perkembangan usaha industri kecil dan menengah di Gianyar secara umum memiliki peningkatan baik dari segi peningkatan jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja, nilai produksi maupun investasi. Perkembangan jumlah unit usaha industri dari 2001 hingga Tahun 2005 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0,20 %, dan Perkembangan investasi memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 17,23 %.

Tabel 2.11.
Perkembangan Industri di Kabupaten Gianyar

Indikator		2001	2002	2003	2004	2005	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1).	Unit Usaha (Unit)	21,706	21,732	21,847	21,867	21,880	0.20
2).	Tenaga Kerja (Orang)	60,277	60,558	62,267	62,584	62,819	1.04
3).	Produksi (Milyar)	783.34	791.51	1,028.97	1,033.32	1,153.82	10.78
4).	Investasi (milyar)	25.57	27.57	41.63	43.67	45.95	17.23
5).	Jumlah Sentra Industri Kecil (bh)	166	166	166	166	115	-

Sumber : Laporan PDP3D Kab. Gianyar.

Perkembangan usaha perdagangan di Gianyar juga menunjukkan trend yang meningkat, dimana jumlah unit usaha perdagangan tumbuh rata-rata sebesar 2,91 % per Tahun, sedangkan tenaga kerja yang diserap juga menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,01 % per tahun.

Tabel 2.12.
Perkembangan Usaha Perdagangan di Kabupaten Gianyar

Indikator	2001	2002	2003	2004	2005	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Unit Usaha	11,893	12,421	12,762	13,154	13,337	2.91
Tenaga Kerja	23,269	23,533	24,015	26,308	26,125	3.01

Sumber : Laporan PDP3D Kab. Gianyar.

g. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi dirasakan semakin dibutuhkan di

Kabupaten Gianyar, dimana dalam periode satu dasa warsa kemarin, perkembangan teknologi informatika dan telekomunikasi seluler merupakan teknologi yang berkembang pesat dan pemanfaatannya telah menjangkau ke seluruh wilayah di Kabupaten Gianyar.

Perkembangan teknologi telepon seluler baik GSM, CDMA dan lain-lainnya dirasakan sangat membantu masyarakat dalam berkomunikasi dan berinteraksi, serta sebagai bagian dari pengembangan mitra kerjasama perdagangan dan bisnis masyarakat. Perkembangan telepon seluler telah mampu meningkatkan perluasan jaringan pemasaran bagi produk-produk industri dan kerajinan masyarakat, sehingga perkembangan perekonomian para pengusaha dan pengerajin di Kabupaten Gianyar memiliki prospek yang baik dengan adanya telepon seluler tersebut.

Disamping teknologi komunikasi, perkembangan pemanfaatan teknologi informatika juga dirasakan semakin dibutuhkan dan meningkat perkembangannya, dimana peran akses global melalui jaringan internet merupakan salah satu bentuk promosi/pemasaran produk-produk industri yang memiliki jangkauan yang sangat luas, sehingga sangat banyak melakukan usaha dan industri di Gianyar yang telah memanfaatkan jaringan internet untuk memasarkan produknya.

Besarnya kemampuan jaringan internet dalam memberikan informasi belum dapat sepenuhnya dikelola dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, dimana banyak kalangan pengusaha, pelajar, mahasiswa dan peneliti baik dari daerah Gianyar maupun luar daerah ingin mengetahui informasi mengenai profil daerah maupun data-data pembangunan daerah, namun semua itu belum terwadahi dalam sistem jaringan, sehingga upaya promosi dan pengembangan daerah dirasakan masih belum menglobal.

Kebutuhan untuk pengembangan domain www.Gianyar.Go.Id semakin mutlak dikembangkan, dimana hal ini dapat dijadikan upaya pemberian informasi pembangunan yang transparan bagi masyarakat, baik menyangkut pemanfaatan tata ruang, data pembangunan, maupun upaya promosi dalam rangka pengembangan investasi dan pertumbuhan perekonomian wilayah.

Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pengembangan informasi teknologi juga semakin diperlukan, dimana setiap pelajar sekolah SLTP dan SMU di Gianyar perlu diwajibkan untuk menguasai teknologi informatika, agar mampu menghadapi persaingan dalam perkembangan global. Selain itu pengembangan lembaga pendidikan teknologi informatika dari unsur swasta perlu didukung agar dapat berkiprah dalam pengembangan SDM masyarakat di daerah.

h. Prasarana Dan Sarana

1. Prasarana Jalan dan Jembatan

Tingkat aksesibilitas transportasi di Kabupaten Gianyar sudah cukup baik, dimana jaringan jalan yang ada telah mampu menghubungkan desa/dusun terpencil dengan

pusat-pusat pertumbuhan di daerah ($\beta > 1$), ditinjau dari jarak dan waktu tempuh ke Pusat Kabupaten/Pemerintahan, maka radius jarak tempuh seluruh wilayah dengan pusat pemerintahan adalah rata-rata dibawah 1 Jam.

Dalam kurun waktu 5 Tahun yaitu Tahun 2001 hingga 2005, tidak terdapat perubahan status dan panjang jalan Kabupaten di Gianyar, demikian juga halnya dengan jalan propinsi dan jalan nasional juga tidak terdapat peningkatan status jalan. Dimana panjang jalan Kabupaten adalah sepanjang 553,813 Km, Jalan Propinsi sepanjang 104,52 Km dan Jalan Nasional sepanjang 26,4 Km.

Ditinjau dari kualitas jalan maka dalam Tahun 2005 terdapat 218,47 Km jalan aspal Lapen, Jalan Hotmix 299,94 Km, Jalan Krikil 2,5 Km dan Jalan Tanah sepanjang 32,9 Km. Namun jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya yaitu Tahun 2001 maka kegiatan penanganan jalan di Kabupaten Gianyar sudah cukup baik, dimana Pemerintah Kabupaten Gianyar mampu secara terus menerus meningkatkan kualitas jalannya menjadi Hotmix, dimana pada Tahun 2001 jalan Aspal Lapen sepanjang 281,44 Km, Jalan Hotmix 222,52 Km, Jalan Krikil 0,9 Km dan jalan tanah sepanjang 48,95 Km.

Dari data tersebut, maka terlihat bahwa peningkatan kualitas jalan menjadi Hotmix adalah sebesar 7,79 % rata-rata per Tahun, adapun pertumbuhan kualitas jalan adalah sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.13.
Pertumbuhan Peningkatan Kualitas Jalan
di Kabupaten Gianyar

Kualitas Jalan	Pertumbuhan (%)
Aspal Lapen	(6.01)
Jalan Hotmix	7.79
Berbatu	-
Kerikil	190.77
Tanah	(8.26)

Sumber : Laporan PDP3D Kab. Gianyar

Potensi lainnya dalam pembangunan jalan di Kabupaten Gianyar adalah adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan, dimana banyak jalan-jalan perdesaan yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat, dalam tahun 2001 terdapat pembangunan jalan swadaya oleh masyarakat sepanjang 856,8 Km, kemudian di Tahun 2005 pembangunan jalan swadaya meningkat menjadi 939,97 Km, sehingga pembangunan jalan swadaya mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,28 % per tahun.

Disamping peningkatan kualitas jalan, kondisi jembatan yang ada di Gianyar sampai dengan tahun 2005 juga umumnya cukup baik, dimana Tahun 2005 dari 61 buah jembatan yang ada, jembatan negara sebanyak 14 buah, jembatan propinsi 12 buah dan jembatan kabupaten sebanyak 35 buah, dengan panjang total jembatan

mencapai 1.615,10 meter yang lebarnya berkisar 2,50 - 13,00 meter.

2. Perhubungan

Sebagai alat transportasi, ketersediaan dan keterjangkauan angkutan darat (kendaraan bermotor) sangat dibutuhkan dalam menunjang aktivitas dan mobilisasi suatu usaha, khususnya di jasa pelayanan yang berhubungan dengan kepariwisataan.

Selama tahun 2001 sampai dengan 2005 jumlah sarana angkutan penumpang mengalami penurunan rata-rata 0,69 persen per tahun. Tahun 2001 jumlah armada angkutan penumpang 725 unit menjadi sebanyak 687 unit tahun 2005. Dari jumlah dimaksud di tahun 2005 sebagian besar adalah sarana angkutan wisata pedesaan sebanyak 202 unit, angkutan antar kota sebanyak 184 unit dan sarana angkutan wisata sejumlah 301 unit.

Angkutan mobil barang pada periode yang sama menunjukkan perkembangan yang positif dimana terjadi peningkatan rata-rata sebesar 1,47 persen per tahun. Pada tahun 2001 angkutan mobil barang sebanyak 4.265 unit menjadi sebanyak 4.520 unit di tahun 2005. Demikian pula halnya dengan kendaraan wajib uji terus mengalami peningkatan dengan perkembangan rata-rata per tahun sebesar 5,04 persen dari sebanyak 4.324 unit di tahun 2001 menjadi 5.207 unit di tahun 2005.

Dibidang prasarana angkutan darat, Pemerintah Kabupaten Gianyar telah pula menyiapkan 2 (dua) unit terminal yakni Terminal Batubulan, di bagian barat wilayah Gianyar berbatasan dengan Kota Denpasar, merupakan terminal yang sangat padat aktivitasnya walaupun hanya melayani angkutan kota dalam Propinsi Bali maupun angkutan pedesaan, dan Terminal Kebo Iwa di jantung Kota Gianyar yang saat ini melayani angkutan kota dan pedesaan.

3. Air Bersih

Hingga saat ini pelayanan air bersih di Gianyar masih terlayani oleh PDAM Gianyar, sedangkan yang lainnya dilakukan secara swakelola oleh masyarakat, dimana kapasitas produksi air bersih yang dikelola oleh PDAM Gianyar menunjukkan adanya peningkatan kapasitas produksi, dimana dalam Tahun 2001, kapasitas produksi air bersih di Gianyar adalah sebesar 481,65 Lt/dt, kemudian di Tahun 2005 meningkat menjadi 611,0 Lt/dt. Dengan kapasitas produksi tersebut, PDAM Gianyar mampu melayani pelanggan sebanyak 36.314 pelanggan dalam Tahun 2001 dan sebanyak 40.211 pelanggan dalam Tahun 2005. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah pelanggan setiap tahunnya di Gianyar.

Keterbatasan kemampuan produksi PDAM Gianyar dalam memproduksi air bersih akan berimplikasi kepada pengembangan manajemen usaha PDAM Gianyar, karena akan berakibat pada tidak berkembangnya pendapatan PDAM Gianyar, disisi lain

pelayanan masyarakat terhadap air bersih akan semakin menurun, sehingga dikhawatirkan akan menurunkan target MDGs di Gianyar dalam pelayanan air bersih.

Sampai saat ini pengembangan sumber produksi baru belum mampu dikembangkan oleh PDAM, mengingat PDAM Gianyar masih memiliki kewajiban pembayaran hutang atas pinjaman P3KT-East Java-Bali (P3KT Batch I/Th 1990-1995). Sehingga kemampuan pengembangan produksi baru oleh PDAM Gianyar belum mampu dilaksanakan secara mandiri. Akibat dari keterbatasan pasokan produksi air bersih, maka terdapat antrean baru pelanggan yang besar di PDAM Gianyar, dimana diperkirakan antrean kebutuhan pelanggan untuk sambungan baru telah mencapai angka diatas 2.000 pelanggan.

4. Jaringan Irigasi

Ketersediaan air baku dalam pembangunan sangatlah penting, disamping pembangunan pertanian khususnya pertanian lahan basah, memerlukan ketersediaan air baku untuk mendukung pertumbuhan tanaman baik pada lahan sawah beririgasi semi teknis maupun tradisional. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan pangan yang memadai bagi konsumsi masyarakat yang berasal dari pemanfaatan sumberdaya yang ada di wilayah Gianyar. Walaupun alih fungsi lahan tidak bisa dihindari sebagai konsekuensi logis dari pesatnya pembangunan ekonomi yang ada, ketersediaan air baku harus selalu tersedia yang pemanfaatnya bukan hanya di sektor pertanian, akan tetapi juga untuk sektor lainnya yang memerlukan.

Pengelolaan air baku untuk irigasi saat ini dilaksanakan oleh lembaga tradisional yang bernama subak dengan bantuan pelaksanaan fisik terhadap pemeliharaan prasarana jaringan irigasi oleh Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Saat ini jenis prasarana jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Gianyar untuk bendungan sebanyak 48 buah (teknis) dan 81 buah (non teknis), Bangunan air sebanyak 624 buah (teknis) dan 211 buah (non teknis), Saluran pembawa sepanjang 314,353 km (teknis) dan 150,239 km (non teknis), Saluran Tersier sepanjang 454,67 km dan fasilitas eksploitasi sebanyak 45 buah. Keterbatasan dana dalam memelihara jaringan irigasi menjadi kendala dalam memberikan layanan yang optimal dalam penyediaan air baku secara memadai. Demikian pula berdampak pada kemampuan memelihara jaringan daerah irigasi, dimana masih ada sekitar 30,00 persen daerah irigasi (teknis) yang dalam kondisi rusak, bahkan untuk bendungan non teknis kerusakannya lebih besar lagi yakni sebanyak 55,00 persen dari daerah irigasi yang ada.

Dengan adanya peningkatan penyediaan dana perimbangan dari pemerintah pusat, kendala-kendala yang dialami menyangkut pemeliharaan jaringan irigasi ini sedikit demi sedikit dapat teratasi, sehingga penyediaan kebutuhan pokok bagi penduduk

Gianyar tidak mengalami gangguan.

I. Lembaga Keuangan

1. Bank dan Non Bank

Salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah tersedianya dana yang cukup dengan penyaluran yang baik oleh lembaga keuangan (perbankan). Selama tahun 2002-2006, jumlah lembaga keuangan umum pemerintah terus memperluas jaringan pemasarannya dengan adanya peningkatan jumlah kantor yakni dari 21 kantor di tahun 2002 menjadi 25 kantor tahun 2005. Bank umum milik pemerintah ini termasuk bank milik pemerintah propinsi yang saat ini di wilayah Gianyar ada 2 kantor cabang, yakni BPD Cabang Ubud dan Cabang Gianyar. Sebaliknya lembaga keuangan (perbankan) milik swasta nasional mengalami pengurangan dari 21 kantor tahun 2002 menjadi 19 kantor tahun 2005, pengurangan ini terjadi akibat ditutupnya atau dimergernya bank swasta yang ada. Untuk lembaga keuangan (perbankan) milik pemerintah kabupaten tidak mengalami penambahan masih tetap sebanyak 1 kantor pusat yang dikategorikan Bank Perkreditan Rakyat yakni Bank Pasar Werdi Sedana.

Keberadaan lembaga keuangan seperti Bank umum maupun Bank perkreditan rakyat, sangat menunjang perkembangan perekonomian di daerah, dimana keberadaan Bank-bank tersebut sangat mampu menunjang kebutuhan masyarakat terhadap pengembangan modal usaha dengan fasilitas yang memadai dan terjangkau pengembaliannya bagi masyarakat kecil.

Lembaga keuangan bukan Bank yang berkembang di Gianyar adalah Lembaga Perkreditan Desa maupun Koperasi Simpan Pinjam. Untuk jumlah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) terus mengalami peningkatan yang cukup pesat dari sebanyak 225 LPD tahun 2002 menjadi sebanyak 266 LPD di tahun 2005. Jumlah LPD bila dilihat dari desa adat yang ada sebanyak 270, masih menunjukkan kekurangan. Pemerintah Kabupaten Gianyar terus berupaya agar seluruh desa adat yang ada memiliki LPD.

Jumlah LPD yang ada di tahun 2005 sebanyak 266 buah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seiring dengan bertambahnya jumlah nasabah, penghimpunan dana dan perolehan laba LPD yang ada juga mengalami peningkatan. Demikian pula dengan perolehan laba LPD dalam lima tahun terakhir meningkat yakni dari sebesar Rp. 12,52 milyar di tahun 2002 menjadi Rp. 19,84 milyar tahun 2005. Peningkatan jumlah laba berdampak positif pada peningkatan jumlah asset LPD yang pada tahun 2002 sebesar Rp. 153,72 milyar menjadi Rp. 373,65 milyar di tahun 2006. Namun dalam tahun 2006 ini, bila dilihat dari tingkat kesehatan LPD menunjukkan kecenderungan yang semakin bertambahnya jumlah LPD yang kategori kurang sehat dan tidak sehat, dimana pada tahun 2006 jumlah LPD yang tidak sehat sebanyak 16 LPD yang kurang sehat dan 10 LPD yang di kategorikan tidak sehat. Keberadaan LPD sebagai lembaga keuangan mikro tingkat desa adat (desa pakraman) amat membantu penyediaan dana bagi masyarakat lokal dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga pemerintah daerah setiap tahunnya selalu berupaya meningkatkan kinerja lembaga ini baik melalui pembinaan, pendidikan dan latihan maupun melakukan upaya perbaikan kinerja

sehingga keberadaan LPD ini tetap berkembang dan mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Tabel 2.14.
Perkembangan Kinerja LPD di Kabupaten Gianyar Tahun 2003-2006

JENIS DATA	TAHUN			
	2003	2004	2005	2006
Jumlah LPD (Buah)	255	255	266	266
Jumlah Nasabah (Orang)	233.864	254.155	273.612	291.485
Penghimpunan Dana (Rp. Milyar)	115,68	205,71	249,54	286.448
Pinjaman Tersalur (Rp. Milyar)	136,59	173,50	224,85	270.869
Perolehan Laba (Rp. Milyar)	13,84	16,45	19,84	22.099
Jumlah Asset (Rp. Milyar)	203,21	264,18	321,49	373.646
Tingkat Kesehatan (LPD)				
a. Sehat	215	217	211	216
b. Cukup Sehat	31	26	21	24
c. Kurang Sehat	9	9	12	16
d. Tidak Sehat	-	3	11	10

Sumber : *Bagian Perekonomian Setda Kab. Gianyar*

2. Koperasi

Koperasi merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Sehingga keberadaan koperasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karenanya pemberdayaan kelembagaan koperasi di Gianyar diarahkan sesuai visi yang telah ditetapkan yakni menciptakan koperasi, pengusaha kecil dan menengah yang tangguh dan profesional sebagai pelaku utama perekonomian daerah.

Dalam upaya menjadikan koperasi tangguh, mandiri dan profesional, pemerintah daerah berupaya menciptakan iklim yang kondusif serta lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan koperasi, memberikan bantuan perkuatan sehingga dapat bersaing secara sehat dengan pelaku ekonomi lainnya.

Untuk menjadikan koperasi, usaha kecil dan menengah yang tangguh dan profesional diperlukan kelembagaan yang mandiri dan pengelolaan usaha yang profesional, disamping iklim usaha yang mendukung dan adanya dukungan perkuatan dari pemerintah. Pencapaian iklim yang kondusif dan pemberian bantuan perkuatan, dituangkan dalam program-program kegiatan yang mengacu pada pemberdayaan lembaga, pemberdayaan usaha, simpan pinjam dan fasilitas koperasi.

Secara umum dapat di nilai pembangunan koperasi di Kabupaten Gianyar telah berhasil. Koperasi terbukti telah ikut berperan aktif di dalam kegiatan ekonomi rakyat, secara langsung ataupun tidak langsung telah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang menjadi anggota. Hal ini tercermin antara lain dari peningkatan jumlah dan ragam koperasi, jumlah simpanan, jumlah

modal serta meningkatnya nilai usaha koperasi. Hasil pembangunan koperasi di Kabupaten Gianyar dari tahun 2002 hingga saat ini menunjukkan kemajuan yang cukup berarti dalam rangka mewujudkan ekonomi kerayatan yang ditunjukkan oleh perkembangan jumlah koperasi dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 mengalami peningkatan rata – rata 94,33 persen per tahun. Jumlah koperasi pada tahun 2002 sebanyak 124 buah meningkat menjadi 798 buah pada tahun 2006. Kenaikan ini tentunya menambah jumlah anggota dimana perkembangannya mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 33,58 persen. Pada tahun 2002 jumlah anggota koperasi sebanyak 50.156 orang mengalami peningkatan menjadi 140.898 orang tahun 2006.

Untuk Asset koperasi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 58,70 persen per tahun, dengan total asset pada tahun 2002 sebesar Rp. 30,18 milyar meningkat menjadi Rp. 149,57 milyar pada tahun 2006. Volume usaha juga mengalami peningkatan sebesar 25,13 persen dalam lima tahun terakhir. Demikian pula halnya dengan sisa hasil usaha koperasi dari tahun 2002 sampai tahun 2006 mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 58,40 persen, dengan sisa hasil usaha pada tahun 2002 sebesar Rp. 0,80,- milyar meningkat menjadi Rp. 6,72,- milyar tahun 2006.

Tabel 2.15.
Jumlah, Anggota, Modal, Asset, Volume dan Sisa Hasil Usaha Koperasi di Kabupaten Gianyar Tahun 2003 – 2006

JENIS DATA		TAHUN			
		2003	2004	2005	2006
1.	Jumlah Koperasi (Buah)	677	708	742	798
2.	Jumlah Anggota (Orang)	129.838	132.998	138.320	140.898
3.	Modal Sendiri (Rp. Milyar)	22,97	31,03	43,96	52,16
4.	Modal Luar (Rp. Milyar)	17,97	66,93	45,88	53,10
5.	Asset (Rp. Milyar)	40,94	97,95	89,83	149,57
6.	Volume Usaha (Rp. Milyar)	85,28	192,03	115,76	150,71
7.	SHU (Rp. Milyar)	1,98	2,22	5,82	6,72

Sumber : Dinas Perindagkop Kab. Gianyar

I. POLITIK

Analisis yang dipergunakan dalam mengkaji kondisi politik di Kabupaten Gianyar adalah keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilu, keamanan dan keanggotaan DPRD Kabupaten Gianyar.

Pada dasarnya pembangunan bidang politik adalah untuk mewujudkan masyarakat yang madani. Dalam hal ini diharapkan masyarakat mengetahui dan menyadari hak – haknya sebagai Warga Negara Indonesia baik dalam bidang politik praktis maupun

dalam pelayanan publik. Dari sisi politik praktis, Gianyar telah mampu menyelenggarakan Pemilihan Umum (DPR, DPD dan Presiden) dengan baik serta telah mampu menyelenggarakan Pilkada dengan baik dan aman.

Perkembangan keanggotaan DPRD Kabupaten Gianyar tahun 1999 sebanyak 35 orang dan tahun 2004 sebanyak 40 orang yang terdiri dari fraksi PDI perjuangan sebanyak 24 dan Golkar sebanyak 10 orang dan Fraksi Gianyar bersatu 6 orang (Lap. PDP3D). Melihat perkembangan tersebut dapat dikatakan bahwa wakil rakyat di DPRD Kabupaten Gianyar dari periode ke periode pemilu berikutnya semakin bertambah yang mencerminkan beragamnya aspirasi rakyat.

Peluang yang dimiliki Kabupaten Gianyar dalam bidang politik adalah adanya dukungan politik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sedangkan ancaman yang dihadapi adalah pemahaman terhadap kebebasan berpolitik yang mengarah pada kekerasan dan arogansi.

Keberhasilan yang dicapai Kabupaten Gianyar dalam bidang politik adalah telah mampu menyelenggarakan Pemilihan Umum (DPR, DPD dan Presiden) dengan baik serta telah mampu menyelenggarakan Pilkada dengan baik dan aman, sedangkan permasalahan yang dihadapi adalah kemungkinan terjadinya konflik antar partai peserta pemilu dan pemahaman masyarakat terhadap kebebasan berpolitik.

Dalam kurun waktu 20 tahun kedepan diharapkan penyelenggaraan politik praktis tersebut dapat dilakukan sebaik – baiknya, sehingga kondisi Gianyar yang aman, tertib, tidak ada gejolak sosial dapat dipertahankan secara mantap dan berkesinambungan.

J. HUKUM DAN APARATUR

1. Pelayanan Umum Pemerintah Kepada Masyarakat

Analisis yang dipergunakan dalam mengkaji pelayanan umum pemerintah kepada masyarakat adalah kondisi pelayanan saat ini seperti perijinan dan permohonan akta capil.

Pelayanan umum merupakan salah satu tugas pokok pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan merupakan tolok ukur baik tidaknya penyelenggaraan pemerintahan umum. Pelayanan umum mencakup masalah yang cukup luas yaitu menyangkut seluruh jenis perijinan dan pelayanan lain seperti permohonan akta catatan sipil dan permohonan sertifikasi tanah.

Kondisi pelayanan umum saat ini dilihat dari data yang ada dapat dikatakan cukup baik, karena antara jumlah permohonan yang diajukan oleh masyarakat dengan keputusan yang dikeluarkan untuk permohonan tersebut hampir seimbang. Namun untuk permohonan akta catatan sipil (akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian) kesadaran masyarakat untuk mencari akta – akta

tersebut masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan tidak seimbangnya jumlah kelahiran dengan jumlah permohonan akta kelahiran, demikian juga dengan akta – akta yang lainnya.

Sedangkan untuk masalah perijinan masyarakat masih menganggap suatu hal relatif berbelit – belit dalam pengurusannya. Disamping itu kesadaran masyarakat dalam pengurusan ijin juga masih rendah, permohonan ijin hanya dilakukan bila diperlukan untuk hal lain yang memerlukan izin tersebut seperti misalnya IMB untuk memperoleh kredit bank.

Peluang yang dimiliki Kabupaten Gianyar dalam peningkatan pelayanan umum pemerintah kepada masyarakat adalah komitmen Pemerintah Pusat dalam menyediakan pelayanan yang cepat, murah, efektif dan efisien. Sedangkan ancaman yang dihadapi adalah menurunnya investasi yang diakibatkan oleh terpuruknya perekonomian secara global sehingga menyebabkan kemampuan pemerintah untuk membiayai pelayanan semakin berkurang.

Keberhasilan yang telah dicapai Kabupaten Gianyar dalam peningkatan pelayanan umum adalah telah mampu melakukan fungsi pelayanan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah, sedangkan permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya pendanaan dan teknologi yang di gunakan dalam mendukung proses pelayanan tersebut.

Diharapkan kondisi pelayanan umum pemerintah dalam 20 tahun mendatang adalah: (1) Terwujudnya masyarakat yang sadar terhadap fungsi akta – akta dan perijinan., (2) Terwujudnya sistem pelayanan umum yang cepat, efisien, efektif dan biaya terjangkau, (3) Tersedianya aparatur yang profesional dalam memberikan pelayanan umum, (4) Tersedia informasi yang lengkap melalui multi media tentang segala hal yang menyangkut pelayanan umum.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa

Analisis yang dipergunakan dalam mengkaji penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah konsistensi pelaksanaan aturan perundang–undangan dan kinerja aparatur pemerintah.

Pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance) sangat populer dewasa ini. Azas – azas pemerintahan yang bersih dan berwibawa secara normative pertama – tama di atur di dalam Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang kemudian diadopsi oleh Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kondisi penyelenggaraan pemerintahan masa kini masih jauh dari prinsip – prinsip good governance. Disamping disebabkan oleh faktor ekstern seperti krisis ekonomi yang sampai sekarang dampaknya masih dirasakan, peristiwa bom Bali yang

melumpuhkan sektor pariwisata menyebabkan pemerintah tidak dapat berharap banyak karena masalah anggaran dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan.

Faktor internal antara lain kinerja aparatur pemerintah yang masih belum optimal yang dapat dilihat dari kondisi pelayanan umum pemerintah kepada masyarakat yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dewasa ini belum optimal seperti apa yang diharapkan. Belum disiplinnya dalam pentaatan jam kerja, belum adanya standar baku minimal pelayanan dalam bentuk aturan hukum yang jelas, belum lengkapnya informasi tentang prosedur berbagai pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, integritas moral sebagai pegawai negeri sipil masih lemah, sehingga kondisi semacam ini belum siap untuk menjawab tantangan paradigma baru fungsi pegawai negeri sebagai pelayan masyarakat dalam era keterbukaan dan globalisasi dewasa ini.

Padahal dengan otonomi seluas – luasnya bersamaan dengan era keterbukaan dan globalisasi serta perubahan paradigma fungsi PNS dari dilayani menjadi pelayan masyarakat sebagaimana amanat Undang – Undang No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang – Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian, bahwa pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan.

Peluang yang dimiliki Kabupaten Gianyar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah adanya komitmen dari Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Sedangkan ancaman yang dihadapi adalah terpuruknya kondisi perekonomian sehingga kemampuan pendanaan berkurang.

Keberhasilan yang dicapai Kabupaten Gianyar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik dan aman sesuai aturan, sedangkan permasalahan yang dihadapi adalah Perubahan Undang – Undang Otonomi Daerah yang merupakan salah satu faktor kendala dalam pelaksanaan program pembangunan karena belum jelasnya aturan hukum yang pasti.

Kondisi yang diharapkan 20 tahun mendatang adalah terwujudnya suatu penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi prinsip – prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik sehingga menjadi suatu pemerintahan good governance, yaitu suatu penyelenggaraan yang dapat menjamin kepastian hukum, tertib dalam administrasi pemerintahan, memperhatikan kepentingan umum, terbuka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, proporsional dalam mengambil kebijaksanaan, dilakukan oleh aparatur yang profesional, bertanggung jawab, dilaksanakan dengan berpegang pada efisiensi dan efektifitas program.

I. WILAYAH DAN TATA RUANG

Peruntukan ruang di Kabupaten Gianyar diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dimana didalamnya diatur kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung atau kawasan konservasi, serta kawasan budidaya yang menyangkut pengaturan peruntukan untuk pengembangan kawasan permukiman bagi masyarakat, pengembangan kawasan pariwisata, pertanian, industri dan jasa serta kawasan lainnya.

Disamping pengaturan peruntukan yang bersifat umum seperti RTRW tersebut diatas, pada beberapa wilayah kawasan yang dianggap cepat berkembang serta beberapa pusat pertumbuhan yang ada di masing-masing Ibu Kota Kecamatan, juga telah disusun dan diatur peruntukan ruangnya kedalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gianyar 1998-2008 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 421 Tahun 2001, dalam penerapannya mengalami berbagai masalah, kendala, dan tantangan akibat dari hampir seluruh wilayah Kabupaten Gianyar memiliki nilai strategis dan sangat potensial untuk dikembangkan. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari pesatnya pembangunan akibat laju pertumbuhan ekonomi dan pariwisata yang mengakibatkan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang yang telah ada, sehingga menimbulkan tekanan pada lingkungan hidup, pada akhirnya mengganggu keseimbangan dan kelestarian ekosistem.

Luas kawasan lindung di Gianyar yang meliputi tanaman kayu-kayuan hutan rakyat, kawasan sempadan sungai, mata air, pantai, jurang dan cagar alam serta budaya sejak tahun 2002 - 2006 mengalami peningkatan yaitu seluas 47 hektar hingga tahun 2006 menjadi seluas 1.092 Ha. Sementara itu luas kawasan permukiman terus mengalami peningkatan dari 5.029,00 hektar di tahun 2002 menjadi 5.068,00 hektar di tahun 2004 dan pada tahun 2006 luas kawasan permukiman telah mencapai 5.080,00 hektar. Seiring dengan penambahan luas kawasan permukiman, luas lahan produktif (lahan sawah, tegalan dan perkebunan) justru mengalami peningkatan dalam tahun 2006. Pada tahun 2002 luas lahan produktif mencapai 26.334,00 hektar meningkat menjadi 26.653 hektar tahun 2006. Peningkatan luas lahan produktif ini sebagai konsekuensi dari menurunnya luas lahan lain-lain lahan bukan sawah beralih fungsi menjadi lahan pertanian.

Untuk kawasan pariwisata, saat ini di wilayah Gianyar telah ditetapkan dua kawasan untuk pengembangan pariwisata yakni Kawasan Pariwisata Ubud dengan luas 7.120 Ha dan Kawasan Pariwisata Lebih dengan luas 4.534 Ha terletak di wilayah pesisir Kabupaten Gianyar sepanjang jalan By Pass Tohpati – Kusamba.

Tabel 2.16.
Tata Ruang Kawasan Menurut Jenisnya di Kabupaten Gianyar
Tahun 2003 – 2006

KAWASAN	TAHUN			
	2003	2004	2005	2006
Kawasan Lindung (Ha)	1.981,18	1.981,18	1.981,18	1.981,18
Kawasan Permukiman (Ha)	5.036,00	5.068,00	5.078,00	5.080,00
Kawasan Pariwisata (Ha)	11.654,00	11.654,00	11.654,00	11.654,00
a. Ubud (Ha)	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
b. Lebih (Ha)	4.534,00	4.534,00	4.534,00	4.534,00
Kawasan Produktif (Ha)	26.316,00	26.257,00	26.235,00	26.229,00

Sumber : Bappeda Kab. Gianyar

K. SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Lahan / Tanah

Analisis yang dipergunakan dalam mengkaji lahan / tanah di Kabupaten Gianyar adalah pergeseran penggunaan lahan. Penggunaan lahan dapat dikelompokkan kedalam lahan ; pertanian, hutan, pemukiman dan penggunaan lainnya. Lahan pertanian termasuk didalamnya ; sawah, perkebunan dan tegalan/kebun campuran. Penggunaan lainnya termasuk ; tanah kritis, waduk/danau dan lain – lain. Penggunaan lahan di Kabupaten Gianyar dalam Tahun 2006 lebih banyak digunakan untuk lahan kering mencapai 21,682 Ha atau sekitar 58,92 % dari luas wilayah Kabupaten Gianyar, dimana dari jumlah tersebut sebanyak 11.247 ha adalah untuk tegalan, permukiman 5.080 Ha dan perusahaan lainnya sebesar 3.787 Ha. Sedangkan kondisi luas lahan sawah di Gianyar dalam Tahun 2006 adalah seluas 14.932 Ha, dimana seluas 14.033 Ha merupakan lahan sawah beririgasi teknis dan lainnya merupakan lahan sawah tradisional maupun pengairan sederhana.

Perkembangan luas lahan sawah di Gianyar dalam kurun waktu dari Tahun 2003 s/d 2006, maka perkembangan luas lahan sawah di Gianyar mengalami penurunan, dimana dalam Tahun 2003 luas lahan sawah di Gianyar adalah seluas 14.937 Ha, kemudian dalam Tahun 2006 menurun menjadi 14.932 Ha, sehingga dalam lima tahun menunjukkan perubahan fungsi guna lahan sawah sebesar 5 hektar beralih fungsi menjadi guna lahan lainnya.

Keberhasilan yang telah dicapai Kabupaten Gianyar dalam penataan penggunaan lahan, dimana selama periode 2003 – 2006 telah mampu memperluas lahan hutan

rakyat sekitar 4,30 % yaitu dari 1.047 Ha menjadi 1.092 Ha. Sedangkan permasalahan yang dihadapi adalah meningkatnya penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian dan bertambahnya lahan kritis.

Dimasa 20 tahun kedepan diharapkan lahan pertanian dan hutan dapat dipertahankan, sedangkan pemukiman dapat ditingkatkan dengan mengalih fungsikan tanah kritis atau penggunaan lahan lainnya.

2. Air

Analisis yang dipergunakan untuk mengkaji kebutuhan air di Kabupaten Gianyar adalah kebutuhan air yang berkaitan dengan penambahan penduduk.

Air merupakan sumber kehidupan dan sangat diperlukan baik dalam proses produksi maupun dalam proses konsumsi. Dengan semakin bertambahnya penduduk, meningkatnya perekonomian dan terjadinya alih fungsi lahan pertanian maka kebutuhan akan air (demand) mengalami peningkatan, sedangkan disisi lain suplai air mengalami stagnan bahkan cenderung menurun. Sehingga dimasa yang akan datang diperkirakan akan terjadi situasi kelangkaan air. Hal ini akan mendorong semakin mahalnya air dimasa yang akan datang.

Secara garis besar, air dapat dikelompokkan menjadi air permukaan dan air bawah tanah. Terhadap dua kelompok air tersebut terjadi perbedaan kepentingan antar masyarakat. Disatu sisi masyarakat yang bergerak dalam sektor pertanian memerlukan air untuk pengembangan pertanian, sedangkan masyarakat yang bergerak di luar sektor pertanian memerlukan air untuk pemenuhan kebutuhan akan air minum dan air bersih.

Peluang yang dimiliki Kabupaten Gianyar dalam memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Gianyar adalah adanya curah hujan yang relatif tinggi sehingga potensi air cukup tinggi. Sedangkan ancaman yang dihadapi adalah bertambahnya penggunaan air untuk sektor industri dan pariwisata di Gianyar serta semakin menurunnya kualitas hutan.

Keberhasilan yang telah dicapai Kabupaten Gianyar dalam pengelolaan sumber daya air adalah telah mampu menyediakan kebutuhan air bersih untuk masyarakat dan air baku untuk sektor pertanian. Sedangkan permasalahan yang dihadapi adalah sumber daya air (air permukaan dan air bawah tanah) semakin berkurang sedangkan kebutuhan air semakin meningkat.

Dalam kurun waktu 20 tahun kedepan diharapkan permintaan air antara sektor pertanian dan non pertanian dapat disinkronkan serta suplai air dapat ditingkatkan baik berupa suplai air permukaan maupun air bawah tanah. Disamping itu hendaknya dicegah pencemaran terhadap air baik untuk air permukaan dan air bawah tanah.

3. Hutan

Analisis yang dipergunakan dalam mengkaji kondisi hutan di Kabupaten Gianyar adalah perubahan luas hutan, luas hutan ideal dan adanya pertambahan lahan kritis. Berdasarkan fungsinya hutan dapat dikelompokkan kedalam ; hutan lindung, hutan produksi, hutan konservasi dan hutan swaka magrasatwa. Walaupun menurut Peraturan Menteri Kehutanan di Kabupaten Gianyar tidak terdapat hutan, tetapi di Gianyar terdapat Hutan Rakyat, hutan pelaba Pura dan lainnya. Luas hutan di Gianyar mengalami peningkatan, yakni dari 1.047 Ha pada tahun 2003 menjadi 1.092 Ha pada tahun 2006. Luas hutan ini sekitar 2,97 % dari luas Kabupaten Gianyar, padahal luas hutan yang ideal adalah 30% dari daratan. Hal ini mencerminkan luasan hutan di Kabupaten Gianyar relatif kurang dibandingkan dengan luasan hutan yang ideal. Disisi lain di Kabupaten Gianyar terdapat lahan kritis (potensial kritis) di luar kawasan hutan seluas 9.755 Ha, sedangkan yang telah dilakukan penanggulangan melalui lahan reboisasi sebesar 175 Ha.

Dalam kurun waktu 20 tahun kedepan diharapkan hutan semakin bertambah luas sedangkan lahan kritis semakin sempit, sehingga hal tersebut dapat memperbaiki suplai air di daerah Gianyar.

4. Galian Golongan C

Analisis yang dipergunakan dalam mengkaji kondisi galian golongan C di Kabupaten Gianyar adalah perkiraan potensi, eksploitasi dan dampak negatif dalam pengelolaan galian Golongan C.

Potensi Pertambangan tentang galian golongan C di Gianyar diperkirakan; Pasir dan Batu (281,0 Ha), Batu Paras (472,5 Ha), Tanah Liat (18,5 Ha) dan Tanah Urug (124,0 Ha). Perkiraan volume yang terbesar adalah tanah urug diikuti oleh batu paras, tanah liat dan sirtu.

Dalam mengeksploitasi galian golongan C diperlukan langkah hati – hati sehingga kegiatan tersebut tidak merusak lingkungan sekitar dan tidak memberikan dampak negatif yang lebih besar terhadap ekosistem. Eksploitasi batu paras diperkirakan mencapai 12,24% dari potensi, eksploitasi tanah urug mencapai 5,03% dari potensi dan eksploitasi sirtu mencapai 0,01% dari potensi, sedangkan tanah liat 0,57 % dari potensi.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pengelolaan bahan galian golongan C adalah, telah berhasil melakukan pengendalian terhadap eksploitasi bahan galian golongan C sehingga tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan di sekitarnya, sedangkan permasalahan yang dihadapi adalah kemungkinan munculnya penambangan liar.

Dalam kurun waktu 20 tahun kedepan diharapkan eksploitasi galian golongan C

dikendalikan secara ketat sehingga dampak negatifnya dapat diminimalkan.

5. Konservasi SDA

Analisis yang dipergunakan dalam mengkaji kondisi sumber daya alam adalah tingkat kerusakan lingkungan, pemanfaatan teknologi, penggunaan lahan, penggunaan bahan kimia, kondisi iklim dan penegakan hukum.

Tingkat kerusakan lingkungan di Bali pada umumnya cenderung mengalami peningkatan, termasuk di Kabupaten Gianyar. Hal ini sebagai akibat laju pertumbuhan penduduk terutama di wilayah perkotaan, adanya perubahan gaya hidup, yang konsumtif, berubahnya peruntukan lahan, pemanfaatan sumber daya air yang tidak rasional, kemajuan teknologi dan rendahnya kesadaran masyarakat. Kemajuan transportasi yang tidak diimbangi dengan penerapan teknologi yang bersih lingkungan akan memberikan dampak negatif terutama pada lingkungan perkotaan dan kawasan pariwisata. Sungai – sungai dan air laut tercemar oleh limbah rumah tangga, hotel, restoran dan rumah makan.

Pembangunan prasarana dan sarana kepariwisataan yang tidak mematuhi ketentuan tata ruang dan sempadan pantai serta adanya pembuangan limbahnya ke laut menyebabkan pencemaran air laut yang selanjutnya berdampak pada kehidupan biota perairan yang ada di laut. Tanah dapat tercemar oleh bahan – bahan kimia (pupuk dan obat – obatan) dan sampah. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran terjadinya ketidak seimbangan ekosistem secara keseluruhan dan akan mengganggu kehidupan manusia dan berdampak pada pembangunan jangka panjang. Disamping itu didukung pula oleh adanya perubahan iklim dan pemanasan global yang sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup.

Kabupaten Gianyar mempunyai panjang pantai sekitar 14,65 Km, yang sebagian besar mengalami abrasi, sehingga perlu dilakukan usaha untuk menanggulangi abrasi tersebut.

Adanya penebangan / pencurian kayu hutan dan kebakaran hutan selain dapat menurunkan potensi sumber daya air dapat pula mempercepat erosi terutama pada lahan yang permukaannya miring. Curah hujan yang rendah merupakan penghambat untuk memulihkan kerusakan lingkungan melalui kegiatan reboisasi.

Sadar akan adanya penyebab kerusakan lingkungan hidup perlu dilakukan langkah – langkah yang nyata baik sebagai upaya pencegahan maupun penanggulangannya. Kegiatan ini perlu dilakukan dengan menetapkan strategi kebijakan umum pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan falsafah Tri Hita Karana dengan arah menuju pada tatanan masyarakat Kabupaten Gianyar yang ajeg dalam bentuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Pendekatan yang dilakukan dengan menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan

partisipasinya baik dalam proses pengambilan keputusan maupun didalam pembangunan lingkungan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat yang tinggal diwilayah yang mengalami kerusakan tersebutlah yang akan terkena dampaknya dan mereka harus mampu mengantisipasi kemungkinan dampak negatifnya.

Pengelolaan kerusakan lingkungan sebagai akibat pengambilan sumber daya alam yang tidak terbarukan seperti tambang galian C, harus diimbangi dengan upaya reklamasi dan pencarian alternatif yang baru atau bahan substansi yang terbarukan yang ramah lingkungan.

Pengelolaan kerusakan lingkungan sebagai akibat rusaknya sumber daya alam yang terbarukan misalnya hutan yang saat ini sudah berada dalam kondisi kritis diarahkan pada aspek – aspek sumber daya alam tersebut kembali memiliki nilai sebagai mana mestinya dan memiliki waktu yang cukup untuk direhabilitasi. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya abrasi pantai perlu ditanggulangi secara cepat agar tidak menimbulkan kerusakan yang semakin parah baik dengan cara fisik maupun biologi.

Pengembangan ekonomi diarahkan pada kegiatan yang ramah lingkungan agar pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan dapat dikendalikan. Pengelolaan lingkungan hidup dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan generasi muda yang dilakukan melalui peningkatan pendidikan, kampanye pengaduan dan kecintaan lingkungan, peningkatan partisipasi masyarakat akan pentingnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan dilakukan melalui pemberdayaan terhadap berbagai instansi sosial di tingkat lokal / desa serta pengakuan terhadap hak – hak desa pakraman oleh pemerintah atas sumber daya alam dengan tetap memperhatikan keamanan, kemakmuran, ketahanan nasional dan lingkungan untuk mencegah dan mengatasi berbagai krisis dan konflik di tengah masyarakat akibat persaingan atas pemanfaatan serta permasalahan sosial lainnya.

Disamping itu penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas terhadap pelanggar yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan perlu di dorong dengan program – program dalam upaya melestarikan lingkungan.

Keberhasilan yang telah dicapai Kabupaten Gianyar dalam pengelolaan sumber daya alam adalah telah mampu melakukan konservasi SDA, sedangkan permasalahan yang dihadapi adalah belum maksimalnya usaha – usaha pengendalian sumber daya alam dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian SDA masih rendah.

Dalam kurun waktu 20 tahun kedepan diharapkan konservasi SDA dilaksanakan secara sungguh – sungguh sehingga luas lahan kritis berkurang, pantai terabrasi berkurang, luas hutan bertambah, dan keragaman flora dan fauna di kawasan hutan semakin bertambah.

2.2. Prediksi Kondisi Umum Daerah

a. Prediksi Kondisi Fisik Wilayah

Sebagai konsekwensi terhadap pertumbuhan penduduk yang akan terus meningkat, dimana jumlah penduduk Kabupaten Gianyar dalam Tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 548 Ribu Orang, sehingga diperkirakan akan membutuhkan ruang dan lahan untuk kepentingan permukiman maupun pengembangan usaha dan investasi, akibatnya akan mempengaruhi terhadap meningkatnya penurunan luas lahan sawah produktif di Gianyar.

Hingga Tahun 2025 penurunan luas lahan sawah di Gianyar di prediksi akan mengalami penurunan sekitar 441 Ha, dimana penurunan luas lahan sawah tersebut terjadi pada lahan sawah beririgasi teknis, irigasi sederhana dan tradisional.

Tabel 2.17.
Prediksi Kondisi Penurunan Luas Lahan Sawah
Di Kabupaten Gianyar

Kondisi Lahan Sawah	2005	2010	2015	2020	2025
Luas lahan sawah	14,856.00	14,744.00	14,632.00	14,524.00	14,415.00
Setengah Teknis	14,035.00	13,930.00	13,825.00	13,722.00	13,619.00
Sederhana PU	203.00	201.00	199.00	198.00	197.00
Tradisional	618.00	613.00	608.00	604.00	599.00

Disisi lain kecenderungan perkembangan fisik spasial diperkirakan masih berkembang dengan pola linier, khususnya bagi pengembangan usaha kecil dan menengah milik masyarakat yang tersebar di 7 Kecamatan. Sedangkan konsentrasi kegiatan pengembangan fisik wilayah akan terkonsentrasi pada pusat-pusat kota Kecamatan, Ibu Kota Kabupaten maupun kawasan batubulan sebagai hinterland kota Denpasar serta pada kawasan jalur jalan arteri Kusamba.

Beberapa pengembangan property diprediksi akan berkembang terus di Gianyar, mengingat Kabupaten Gianyar merupakan kawasan yang terdekat dengan kota Denpasar, sehingga kawasan permukiman yang ada di Kabupaten Gianyar akan menjadi alternatif pilihan bagi pengembangan perumahan.

Perkembangan fisik wilayah yang berkembang alamiah secara *urban sprawl*, lambat laun perkembangan fisik wilayah mengarah kepada terjadinya *konurbasi kota* dimana perkembangan fisik wilayah terlihat lebih menyatu dalam bingkai kota metropolitan Sarbagita. Akibat tingginya pertumbuhan perkembangan fisik wilayah, maka degradasi kualitas fisik lingkungan akan ditemui pada beberapa kawasan yang padat dengan permukiman, serta menjadi kawasan yang rentan terhadap banjir jika musim hujan.

B. PREDIKSI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN SOSIAL

Prediksi bidang sosial dan pembangunan manusia di Kabupaten Gianyar ditujukan untuk mewujudkan konsensus internasional tentang pendidikan yaitu *Education for All* (EFA) serta pembangunan manusia *Millenium Development Goals* (MDGs). Konsensus tersebut pada dasarnya menyangkut dengan target pencapaian seperangkat indikator yang diharapkan dapat terwujud pada akhir 2015 mendatang. Dengan mengacu pada konsensus tersebut dan juga mengingat amanat Undang-Undang Dasar 1945, serta undang-undang yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan, maka prediksi pembangunan manusia di Kabupaten Gianyar untuk periode 2005-2025 dikelompokkan atas beberapa bidang sebagai berikut.

1. Kehidupan sosial Budaya dan Keagamaan

Kehidupan sosial budaya dan keagamaan masyarakat di Kabupaten Gianyar, diperkirakan masih tetap *ajeg* dan kondusif, dimana kesadaran dan perkembangan globalisasi telah mengembangkan kemampuan pola pikir masyarakat terhadap kebutuhan hidup yang tenang, aman dan damai.

Karakter kebersamaan masyarakat dalam lingkungan adat masih tetap lestari dan diprediksikan akan terus mengayomi masyarakat dalam berbagai kegiatan adat. Terjadinya perbedaan kelompok adat serta pemeluk agama lainnya, akan semakin mengembangkan pola pikir untuk senantiasa menjaga kerukunan antar umat beragama.

Namun demikian konflik adat akan senantiasa mewarnai baik meliputi konflik ekonomi, perbatasan wilayah adat, pengembangan desa adat, sehingga bahaya laten tersebut perlu diwaspadai dan dilakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih luas.

Pengembangan tempat ibadah untuk semua umat, dirasakan tidak diperlukan lagi, mengingat jumlah tempat ibadah bagi masing-masing umat dirasakan sudah terpenuhi dan tercukupi oleh keberadaan tempat ibadah yang sekarang.

2. Pembangunan Manusia

Ukuran minimum pembangunan manusia, yang menggabungkan pencapaian pemerataan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat melalui indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan dicapai sesuai dengan konsensus. Dengan menggunakan trend perkembangan IPM 5 tahun sebelumnya, maka tahun 2015 IPM Kabupaten Gianyar akan mencapai setinggi 76,82 dan tahun 2025 mencapai 83,36 setaraf dengan pencapaian IPM negara maju saat ini. Prioritas penanganan IPM terkait dengan perbaikan kesehatan masyarakat, yang perlu dibarengi dengan penyelesaian persoalan pencapaian pemerataan kesempatan dan kualitas pendidikan serta mengakhiri kebodohan.

Tabel. 2.18.
Prediksi Pencapaian IPM Kabupaten Gianyar

Indikator	2010	2015	2020	2025
IPM	73.75	76.82	80.03	83.36
Angka Harapan Hidup	73.17	74.58	76	77.46
Angka Melek Huruf	86.54	88.11	89.71	91.33
Rata-rata lama Sekolah	8.06	8.44	8.83	9.25
Rata-Rata Konsumsi/Kapita	704,762.50	798,152.31	903,917.44	1,023,697.76

Setelah kebutuhan dasar membangun manusia terpenuhi pada pertengahan RPJP tahun 2015, maka memasuki RPJP berikutnya 2020 Kabupaten Gianyar diprediksikan telah memiliki institusi yang handal untuk menghasilkan generasi yang berkualitas dan kompetitif, sehingga mampu bersaing dalam kehidupan global.

Pada Tahun 2020 Kabupaten Gianyar juga diharapkan sudah memiliki institusi penyelenggaraan pendidikan yang mampu bersaing, baik pada jenjang dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Institusi pendidikan juga telah memiliki tenaga standar, kurikulum dan fasilitas yang mampu menghasilkan generasi yang mampu menghadapi tantangan global.

Tahun 2025 diprediksikan sebagai kondisi keemasan, dimana generasi yang dihasilkan telah mampu bersaing pada skala regional dan internasional, setiap periode waktu tersebut tingkat pendidikan SMU di Gianyar mampu bersaing dan berkiprah dalam olimpiade baik dibidang fisika, matematika, biologi maupun bidang-bidang lainnya, yang mampu mengangkat nama daerah pada tingkat regional maupun internasional.

3. Pembangunan Kesehatan dan Gizi

Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Gianyar diarahkan dari fokus kepada penanganan *kuratif*, menjadi pemenuhan aspek *kuratif* dan *preventif* dalam kerangka tata kelola yang baik *Good Health Service Governance*. Kedua pemenuhan aspek pelayanan kesehatan tersebut diupayakan dalam kerangka sistem pelayanan kesehatan yang sudah dirintis dan dilaksanakan di Kabupaten Gianyar. Walaupun demikian pembangunan sektor kesehatan juga menekankan pemberdayaan dan pendayagunaan peran serta masyarakat dalam menunjang berjalannya pelaksanaan sistem kesehatan.

Pembangunan bidang kesehatan ditekankan pada upaya memberikan kepastian pengendalian masalah kesehatan masyarakat, berupa kombinasi perbaikan tingkah laku hidup bersih, keseimbangan pangan dan gizi serta pendayagunaan teknologi kesehatan untuk pelayanan dasar kesehatan. Kombinasi penanganan pelayanan dasar tersebut hendaknya dapat mengurangi dampak dari faktor tingkah laku, keseimbangan pangan dan teknologi kesehatan. Dengan demikian diharapkan pada periode awal, dimana angka kematian bayi setinggi 11,63 perseribu, diproyeksikan akan menurun menjadi

8,83 per 1.000 kelahiran hidup pada Tahun 2010, kemudian 5,47 per 1.000 kelahiran hidup Tahun 2015 dan sebesar 4,27 per 1.000 kelahiran hidup dalam akhir perencanaan yaitu Tahun 2025, yaitu sebuah pencapaian angka kematian bayi yang setaraf dengan negara-negara berpenghasilan menengah ke atas.

Pelayanan rumah sakit Sanjiwani Gianyar, diharapkan sudah mampu meningkatkan kemampuan pelayanannya serta memiliki kemampuan pada level pelayanan yang berstandar internasional, dimana Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar mesti sudah mampu memiliki sertifikasi ISO pada Tahun 2020, dan pada periode berikutnya Rumah Sakit Sanjiwani dapat berkembang pada level pelayanan yang lebih spesifik untuk menguatkan kemampuan layanan penanganan penyakit khusus.

Pembangunan ketahanan gizi memastikan pada pemecahan persoalan utama bidang gizi, dan fokus diberikan kepada peningkatan kapasitas masyarakat untuk mampu menentukan dan memilih (*food entitlement*). Pilihan akan sumberdaya pangan yang seimbang diharapkan mewujudkan ketahanan pangan sampai ke tingkat keluarga. Pembangunan sub sektor gizi keluarga dimulai dengan jalan memperbaiki tingkah laku gizi masyarakat dengan mendorong agar sistem sanitasi dan air minum dapat mendorong perbaikan status gizi, khususnya untuk anak balita dan manula. Pembangunan ketahanan gizi juga dimaksudkan untuk memastikan terdapatnya kemudahan dalam memproduksi dan akses yang lebih mudah terhadap informasi harga dan ketersediaannya. Sehingga dalam jangka panjang masyarakat Kabupaten Gianyar menuju kepada kemandirian penyediaan makanan baik dari sisi karbohidrat, protein dan vitamin.

Tabel. 2.19.
Prediksi Pencapaian Indikator Kesehatan Kabupaten Gianyar

JENIS INDIKATOR		CAPAIAN			
		2010	2015	2020	2025
1	Jumlah Balita Kurang Gizi (Bayi)	102,24	67,79	48,13	34,17
2	Angka Kematian Bayi/ AKB (Bayi/1000)	8,83	5,47	4,87	0
3	Angka Kematian Balita /AKABA (Balita/1000)	1.17	0.57	< 0	< 0
4	Angka Kematian Ibu (Ibu/100.000)	44.66	33.04	25.7	19.99

4. Pendidikan

Sesuai dengan arah pembangunan nasional, prediksi pembangunan pendidikan di Kabupaten Gianyar dilakukn dengan mengacu kepada 3 aspek utama yaitu : *Pertama*, pencapaian aspek *perluasan kesempatan pendidikan*, *Kedua*, *pemerataan kualitas pendidikan*, dan *Ketiga*, *pelaksanaan pelayanan pendidikan* yang mengacu kepada penerapan prinsip *Good Education Governance* (GEG) atau tata-kelola pendidikan yang baik.

Tercapainya pemerataan kesempatan pendidikan ditandai dengan pemecahan terhadap persoalan yang terkait dengan akses pendidikan. Mengingat bervariasinya persoalan daerah, maka Kabupaten Gianyar pada Tahun 2015 diharapkan sudah dapat menyelesaikan penuntasan wajib belajar sembilan tahun, yang ditandai dengan pencapaian angka partisipasi pendidikan usia wajib belajar 7-15 Tahun 99 % untuk APM SD dan APM SLTP sebesar 90 % dan jenjang SLTA APMnya 80 %.

Pemerataan pendidikan diupayakan melalui pengembangan skema kebijakan subsidi dan pengaturan bantuan pemerintah daerah serta pembiayaan operasional sekolah melalui APBD, sehingga kesempatan mengikuti pendidikan gratis dari SD sampai SLTP dapat terpenuhinya seluruhnya hingga akhir Tahun 2020, sedangkan kebijakan skema subsidi bagi pendidikan tingkat SLTA, diharapkan dalam Tahun 2020 sekitar 50 % biaya operasional sekolah dibiayai oleh APBD Kabupaten Gianyar.

Fokus pengembangan mutu pendidikan dilakukan dengan pemilihan jenis dan bidang yang menjadi andalan masyarakat Kabupaten Gianyar dan memberikan peluang pasar kerja dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Gianyar. Pengembangan kualitas pendidikan perlu diukur dengan melihat kemampuan anak sekolah dalam kompetisi olimpiade baik dibidang fisika, kimia, matematika, biologi dan lainnya baik dalam tingkat lokal, regional dan internasional.

Pengembangan sekolah berstandar nasional dan internasional (SBI) perlu dikembangkan guna menyiapkan SDM anak sekolah untuk mampu bersaing dalam kehidupan global, diharapkan dalam akhir periode waktu Tahun 2020 SMU Negeri di Gianyar, mampu menjadi tiga besar di Tingkat Provinsi sebagai sekolah unggulan di Provinsi Bali.

5. Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan secara maksimal diprediksi akan menjadi kebutuhan yang mutlak di Kabupaten Gianyar, dimana penurunan jumlah dan angka kemiskinan merupakan target dan kondisi riil yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah.

Berbagai kegiatan yang mengarah pada upaya penanggulangan kemiskinan di daerah akan selalu dilaksanakan di Gianyar, baik yang menyangkut pemberdayaan masyarakat miskin melalui program PNPM – Mandiri, bantuan perbaikan rumah, bantuan kesehatan dan layanan kesehatan melalui Askeskin dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) serta kegiatan-kegiatan lainnya. Namun demikian upaya-upaya tersebut diperkirakan tidak akan mampu untuk menghentikan meningkatnya penduduk miskin di Gianyar, hal ini diakibatkan oleh (i) tingginya peningkatan jumlah penduduk di Gianyar, sehingga berimplikasi pada meningkatnya penduduk/KK miskin di Gianyar, (ii) adanya aktivitas/budaya yang mendorong timbulnya masyarakat miskin seperti Judi/Tajen,

Metuakan, Malas bekerja dan lain-lain. (iii) adanya ketimpangan terhadap pertumbuhan penduduk dengan lapangan kerja, sehingga banyak masyarakat yang akan tidak terserap pada lapangan kerja formal yang ada.

Dalam pengentasan masyarakat miskin di Gianyar, yang diperlukan adalah upaya untuk menekan pertumbuhan peningkatan KK/penduduk miskin di Gianyar, sehingga peningkatan jumlah penduduk miskin di Gianyar tidak terlalu tinggi, sehingga perkembangan penduduk/KK miskin di Gianyar diprediksikan bahwa dalam Tahun 2010 pertumbuha penduduk miskin mampu ditekan hingga 5,50 %, kemudian di Tahun 2015 sebesar 2,50 %, Tahun 2020 sebesar 2,30 % dan di Tahun 2025 pertumbuhan penduduk miskin mencapai 1,25 %.

Adapun prediksi perkembangan KK miskin di Gianyar adalah sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.20
Prediksi Perkembangan KK Miskin Di Kabupaten Gianyar.

Tahun	KK Miskin	Pertumbuhan (%)
Th 2005	6.473	17.86%
Th 2010	8.018	5.50%
Th 2015	10.480	2.50%
Th 2020	10.066	2.30%
Th 2025	10.192	1.25%

6. Ketenagakerjaan

Dalam rencana jangka panjang daerah (PJP) dengan periode waktu Tahun 2005-2025, Kabupaten Gianyar diarahkan untuk mewujudkan perekonomian yang berkembang baik dan mantap, dimana investasi terus semakin meningkat dan penyerapan tenaga kerja mampu terserap pada berbagai lapangan pekerjaan, sehingga tingkat pengangguran di Kabupaten Gianyar diprediksikan akan semakin menurun, hal ini merupakan suatu kondisi berani dari daerah jika dilihat dari kondisi kecenderungan yang meningkat terhadap tingkat pengangguran yang terjadi selama ini. Upaya penekanan angka pengangguran dibawah 1 digit hingga akhir Tahun perencanaan (2025) menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah cukup serius untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi guna mengatasi kelangkaan lapangan kerja di Kabupaten Gianyar.

Prediksi penurunan angka pengangguran di Gianyar, merupakan salah satu indikator target yang mesti dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam kurun waktu 2005-2025, dimana untuk mewujudkannya diperlukan komitmen bersama para pelaku dunia usaha, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk bersama-sama meningkatkan penciptaan peluang/lapangan kerja kerja di daerah.

Dalam Tahun 2010 Penduduk usia kerja di Gianyar diperkirakan akan meningkat sekitar 2,05 % hingga mencapai sebesar 392.805 jiwa, dan diprediksikan hingga akhir Tahun

2025 jumlah penduduk usia kerja akan mencapai 532.564 jiwa. Sedangkan angkatan kerja dalam Tahun 2010 diprediksi akan berjumlah sebanyak 281.194 jiwa dan di Tahun 2025 angkatan kerja akan berjumlah sebanyak 433.015 jiwa. Usaha keras menciptakan peluang kerja dan peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi akan memberi implikasi pada penekanan jumlah pengangguran atau pencari kerja di Gianyar, dimana Tingkat pengangguran terbuka diprediksikan akan menurun dari 6,41 % di Tahun 2010 menjadi 3,86 % pada akhir Tahun 2025.

Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja diprediksikan akan semakin meningkat yaitu dari 71,59 % dalam Tahun 2010 menjadi 81,31 % pada akhir Tahun 2025. Kondisi partisipasi angkatan kerja yang meningkat menunjukkan bahwa semakin membaiknya kesadaran masyarakat untuk bekerja dan berusaha, sehingga ketergantungan dapat dikurangi dan produktivitas masyarakat semakin meningkat.

Tabel 2.21
Prediksi Ketenagakerjaan Di Kabupaten Gianyar.

No	Indikator Ketenagakerjaan	2010	2015	2020	2025
1	Penduduk Usia Kerja (orang)	392,805	434,752	481,179	532,564
2	Angkatan Kerja (orang)	281,194	324,717	374,976	433,015
3	Bekerja (orang)	263,177	307,146	357,840	416,303
4	Mencari kerja (orang)	18,017	17,571	17,136	16,712
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6.41	5.41	4.57	3.86
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	71.59	74.69	77.93	81.31

B. PREDIKSI PEMBANGUNAN EKONOMI

Prediksi bidang ekonomi untuk masa dua puluh tahun yang akan datang adalah menyangkut proyeksi pertumbuhan ekonomi dan lain-lainnya dalam bidang ekonomi sampai dengan Tahun 2025 mendatang.

Prediksi pembangunan ekonomi Kabupaten Gianyar 2010-2025 dilakukan dengan melihat trend perkembangan dan kemampuan di masa lalu dengan memperhatikan aspek ketersediaan dana, sementara itu berbagai kendala dan hambatan dan keterbatasan yang ada juga diperhatikan, sehingga hasil prediksi dimasa yang akan datang tidak terlalu pesimis dicapai tetapi, karena didalamnya telah termasuk peningkatan yang cukup berarti sebagai hasil dari kebijakan dan terobosan yang diharapkan mampu dilakukan oleh Pemerintah Daerah di masa yang akan datang, sehingga hasil prediksi tidak terlalu muluk-muluk tetapi merupakan prediksi yang lebih realistis sesuai dengan kondisi daerah Kabupaten Gianyar.

Prediksi pembangunan ekonomi Kabupaten Gianyar juga didasari pada laju pertumbuhan investasi yang meliputi penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah, swasta dan masyarakat, dimana pertumbuhan investasi dalam Tahun 2015 diprediksikan akan mencapai 8,76 % dengan nilai kebutuhan investasi total sebesar Rp. 1,42 Trilyun dan di Tahun 2025 pertumbuhan investasi diperkirakan mencapai

sebesar 12,44 % dengan kebutuhan investasi total sebesar 1,78 Trilyun. Sedangkan investasi untuk swasta dan masyarakat dihitung dari selisih antara investasi total dan investasi Pemerintah. Adapun prediksi periode 5 tahunan adalah seperti Tabel.

Perkiraan koefisien *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) secara total untuk Kabupaten Gianyar, dilakukan berdasarkan tendensi peningkatan dimasa lalu yang didasari atas baseline data BPS, dengan demikian prediksi ICOR untuk Kabupaten Gianyar pada Tahun 2015 diperkirakan akan semakin menurun dari periode Tahun sebelumnya yaitu sekitar 6,43 pada Tahun 2015 dan sekitar 3,71 dalam Tahun 2025. Indikasi penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan tingkat efisiensi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi, maka PDRB per kapita di Kabupaten Gianyar diprediksikan juga akan semakin meningkat dimana dalam Tahun 2015, PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku diprediksikan akan mencapai Rp. 13,33 Juta dan di Tahun 2025 diprediksikan sudah mencapai Rp. 20,22 Juta.

Adapun prediksi kondisi perekonomian daerah Kabupaten Gianyar adalah sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.22
Prediksi Kondisi Ekonomi Kabupaten Gianyar

No	Unsur Prediksi	2010	2015	2020	2025
1	Pertumbuhan Investasi (%)	6.95	8.76	11.82	12.44
2	ICOR Total	7.55	6.43	4.64	3.71
3	PDRB Harga Konstan (Rp. Trilyun)	3.23	4.1	5.4	7.2
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.33	5.39	6.34	6.67
5	Tingkat Inflasi (%)	4.8	4.85	4.9	4.94
6	PDRB Harga Berlaku (Rp. Trilyun)	5.59	8.29	12.3	18.23
8	Perkiraan Kebutuhan Investasi Total (Rp. Trilyun)	1.3	1.42	1.59	1.78
9	Kebutuhan Investasi Pemerintah (Rp. Trilyun)	0.16	0.18	0.21	0.24
10	Kebutuhan Investasi Swasta dan Masyarakat (Rp. Trilyun)	1.14	1.24	1.38	1.54
11	Jumlah Penduduk (Ribuan Orang)	418.94	458.25	501.25	548.29
12	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1.51	1.22	1.08	0.98
13	PDRB Per Kapita Harga Konstan (Rp. Juta)	7.32	9.01	11.11	13.68
14	PDRB Per Kapita Harga Berlaku (Rp. Juta)	10.82	13.33	16.42	20.22

C. PREDIKSI PEMBANGUNAN BIDANG PERTANIAN

Dalam pembangunan bidang pertanian di Kabupaten Gianyar selama ini telah diarahkan pada upaya meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Gianyar, sehingga komoditas tanaman padi sawah merupakan komoditas yang menjadi andalan dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Gianyar.

Dalam periode jangka panjang sesuai periode waktu Tahun perencanaan (2025) pertanian tanaman pangan khususnya produksi beras merupakan komoditas yang perlu ditingkatkan kemampuan produksi dan produktivitasnya melalui pengembangan teknologi pertanian, perbaikan kualitas benih dan lain-lainnya.

Akibat dari menurunnya luas lahan sawah di Gianyar, diperkirakan akan berpengaruh terhadap pencapaian luas tanam maupun luas panen tanaman padi sawah di Gianyar, sehingga diprediksikan juga bahwa tingkat surplus beras di Gianyar akan semakin menyusut nilainya dari periode waktu ke periode waktu berikutnya.

Dalam Tahun 2015 produksi beras diprediksikan akan mencapai sebesar 115,84 Ribu Ton Beras, kemudian di tahun 2025 Produksi beras diperkirakan meningkat akibat kebijakan Pemerintah daerah yang masih memprioritaskan sektor pertanian dimana hasil produksi beras diperkirakan akan mencapai hasil produksi sebesar 124,83 ribu ton beras.

Jika diperhatikan terhadap peningkatan kebutuhan beras per tahun akibat dari meningkatnya jumlah penduduk di Gianyar dalam periode waktu tahun perencanaan, maka di Gianyar akan mengalami penurunan surplus beras, dimana dalam Tahun 2010 surplus beras diprediksi sebesar 39,16 ribu ton beras, kemudian di Tahun 2015 sebesar 36,61 ribu ton beras dan di tahun 2025 akan menyusut lagi hingga mencapai sebesar 30,04 ribu ton beras.

Dengan adanya prediksi surplus beras di Tahun 2025, maka di Kabupaten Gianyar belum terjadi kerawanan pangan, namun demikian usaha-usaha intensifikasi dan diversifikasi pertanian perlu terus dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi pertanian guna mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.

Tabel 2.23.
Prediksi Ketahanan Pangan di Kabupaten Gianyar

No	Uraian Indikator	2005	2010	2015	2020	2025
1	Luas Panen (Ribu Ha)	31.47	31.39	31.31	31.23	31.16
2	Luas Tanam (Ribu Ha)	31.17	31.01	30.86	30.71	30.55
3	Produksi Gabah (Ribu Ton)	183.50	178.60	173.83	169.19	164.67
4	Susut (%)	41.56	41.29	41.18	40.76	40.49
5	Produksi Beras (Ribu Ton)	107.50	111.59	115.84	120.25	124.83
6	Jumlah Penduduk (Ribu Orang)	383.59	418.94	458.25	501.25	548.29
7	Konsumsi Beras (Kg/orang/hr)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40

No	Uraian Indikator	2005	2010	2015	2020	2025
8	Kebutuhan Beras (Ribuan Ton)	66.32	72.43	79.23	86.66	94.79
9	Surplus (Ribuan Ton)	41.18	39.16	36.61	33.59	30.04
10	Produktivitas (Ton/Ha)	5.83	5.69	5.55	5.42	5.28

D. PREDIKSI KEPARIWISATAAN

Dengan asumsi terjadi stabilitas keamanan yang baik dan kondusif di daerah, maka kondisi kepariwisataan di Gianyar dapat diprediksi secara umum mengarah pada kondisi yang lebih baik, dimana kunjungan wisatawan, penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata akan terus semakin meningkat.

Usaha pengembangan investasi dibidang kepariwisataan mesti didorong dengan memberikan kemudahan dalam mekanisme perijinan, baik yang dilakukan melalui PMA maupun PMDN, sehingga sektor pariwisata diprediksikan akan membantu Pemerintah dalam penyediaan lapangan kerja, dimana dalam Tahun 2010 penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata diperkirakan akan mencapai 58,24 %, kemudian di Tahun 2025 diprediksikan akan mencapai sebesar 73.12 %.

Sedangkan kunjungan wisatawan juga akan mengalami peningkatan, dimana peningkatan ini juga berkat adanya komitmen para pelaku usaha pariwisata, masyarakat dan Pemerintah guna mengembangkan kepariwisataan, dimana keragaman obyek dan daya tarik wisata diperkirakan akan semakin meningkat, baik yang dikembangkan oleh swasta maupun pemerintah daerah, keberadaan Taman Safari di Desa Serongga-Lebih, diperkirakan akan mampu menunjang minat kunjungan wisatawan serta mendorong tumbuhnya berbagai obyek dan atraksi wisata lainnya yang ada di Gianyar.

Grafik peningkatan kunjungan wisatawan diprediksikan semakin meningkat, dimana dalam tahun 2010 adalah kunjungan wisatawan akan meningkat menjadi 614 ribu orang, kemudian di Tahun 2015 menjadi 800 ribu orang dan di Tahun 2020 kunjungan wisatawan diprediksi sebesar 997 ribu orang, kemudian di Tahun 2025 kunjungan wisatawan telah mencapai diatas 1 juta jiwa.

Keberadaan investasi pariwisata yang telah berjalan di Gianyar diprediksikan juga akan menjadi pemicu terhadap tumbuhnya investasi baru dibidang kepariwisataan maupun jasa lainnya yang sinergi dengan bidang kepariwisataan. Sehingga investasi terhadap pengembangan jasa akomodasi hotel, restoran dan jasa lainnya akan terus semakin berkembang.

C. PREDIKSI USAHA INDUSTRI

Sebagaimana yang diketahui usaha industri yang berkembang di Gianyar tergolong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak dibidang pariwisata,

dimana di tingkat lokal usaha-usaha tersebut identik dengan usaha kerajinan kecil dan rumah tangga.

Sebagai dampak maju dibidang pembangunan serta perkembangan *iptek* maka usaha industri di Gianyar diprediksikan juga akan semakin berkembang dan meningkat perannya, baik menyangkut peningkatan jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja, jumlah produksi dan nilai investasi dibidang industri.

Jumlah unit usaha industri diprediksi akan meningkat dari 22.099 unit usaha di Tahun 2010 menjadi 22.817 unit usaha, dengan tenaga kerja terserap sekitar 66.154 orang di Tahun 2010 kemudian di Tahun 2025 menjadi 78.064 orang, sedangkan nilai produksi kerajinan diperkirakan akan mencapai nilai sebesar Rp. 1,306.96 Milyar di Tahun 2010 dan di Tahun 2025 sebesar Rp. 6,724.17 Milyar, kemudian nilai investasi di sektor industri juga akan semakin meningkat yaitu dari 74.00 Milyar di Tahun 2010, menjadi 340.04 Milyar di Tahun 2025

Tabel 2.24.
Perkembangan Industri di Kabupaten Gianyar

Indikator industri	2010	2015	2020	2025
Unit Usaha (Unit)	22,099	22,366	22,590	22,817
Tenaga Kerja (Orang)	66,154	70,391	74,128	78,064
Produksi (Milyar)	1,306.96	2,415.60	4,030.25	6,724.17
Investasi (Milyar)	74.00	131.10	211.14	340.04

D. PREDIKSI PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Indikator yang digunakan untuk menganalisa perkembangan IPTEK di Kabupaten Gianyar adalah analisa kebutuhan dan kecenderungan terhadap pemanfaatan IPTEK yang dibandingkan dengan kondisi sekarang.

Usaha pengembangan IPTEK di Kabupaten Gianyar diperlukan untuk memperkuat kemampuan dasar daerah dibidang perkembangan IPTEK serta dalam rangka pengembangan SDM unggul dibidang Sains dan Teknologi.

Dilihat dari kecenderungan kebutuhan SDM di daerah, maka perkembangan IPTEK dibidang teknologi informasi masih mendominasi kebutuhan pasar kerja, dimana kebutuhan SDM yang mampu menguasai teknik informatika maupun manajemen informatika semakin dibutuhkan baik dilingkungan dunia usaha, instansi pemerintah, maupun dibidang pendidikan. Usaha pengembangan kemampuan SDM unggul dibidang informatika perlu disikapi dengan pengembangan kebijakan pendidikan di tingkat SLTP dan SMU untuk mengembangkan teknik informatika sebagai bagian dari kurikulum sekolah atau sebagai paket ekstrakurikuler sekolah.

Disamping teknologi informatika, teknologi komunikasi juga menjadi kebutuhan

pengembangan IPTEK di Gianyar, dimana perkembangan teknologi seluler dibutuhkan bagi wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh jaringan Telkom , sehingga pengembangan jaringan komunikasi baik melalui jaringan Kabel maupun Nirkabel masih dibutuhkan didaerah hingga Tahun 2025.

E. PREDIKSI PEMERINTAHAN DAN HUKUM

Unsur yang perlu diproyeksikan dalam pembangunan tata-pemerintahan yang baik berkenaan dengan terciptanya sinergi yang ideal antara ketiga unsur tata pemerintahan yang baik adalah dimana Pemerintah daerah, dunia usaha/swasta dan masyarakat memiliki komitmen bersama untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Gianyar Tahun 2025. Unsur birokrasi pemerintahan daerah, dalam hal ini tidak hanya bertanggung jawab untuk mendorong sinergi yang harmonis antara ketiga komponen pelaku pembangunan tersebut, melainkan pada saat yang sama juga perlu pembenahan ke dalam, yakni pembenahan *capacity building* aparatur Pemerintah Daerah yang notabene adalah pegawai negeri. Prediksi pembangunan tata pemerintahan yang baik membayangkan bahwa pada akhir PJP 2005-2025 adalah terdapatnya suatu formasi birokrasi Pemerintah Daerah yang efisien dan efektif dalam menyinergikan kekuatan dalam ketiga unsur pelaku pembangunan. Sasaran pokok yang ingin dicapai dalam tujuan ini nantinya adalah terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Indikator pencapaian tata-pemerintahan yang baik dapat ditetapkan berdasarkan konsensus, dimana salah satu diantaranya adalah tersusunnya sejumlah kebijakan efisiensi dalam penataan kelembagaan dan peningkatan mutu aparatur pemerintahan, antara lain rasionalisasi pegawai dalam jajaran birokrasi dan peningkatan kualitas aparatur daerah. Kinerja aparatur pemerintah yang diperkirakan akan dicapai antara lain ditandai dengan ciri-ciri berikut.

- a. Berkurangnya hambatan-hambatan administratif dalam pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik dan diskriminatif;
- b. Pemerintah Daerah akan semakin transparan dan akuntabel terhadap masyarakatnya;
- c. Berbagai kelompok dalam masyarakat akan merasa lebih terwakili kepentingannya dan akan berpartisipasi secara penuh dalam proses pengambilan keputusan di daerah.
- d. Penyelenggaraan Pilkada yang makin bermutu.
- e. Pemerintah Daerah semakin responsif dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan demokratis, termasuk kepedulian terhadap perlindungan HAM.
- f. Pelayanan masyarakat yang semakin efektif dan efisien dan terjadinya

peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum.

- g. Kemampuan anggota masyarakat dalam mengartikulasikan kepentingannya semakin meningkat.
- h. Hak-hak kepemilikan daerah (lokal), termasuk eksistensi masyarakat ada semakin diakui dan dilindungi keberadaannya.
- i. Otonomi daerah dan desentralisasi yang semakin selaras dengan tujuan nasional dan daerah. Antara lain semakin terkendalinya akses terhadap sumberdaya lokal dan pemanfaatannya secara bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat daerah.

Dengan terbangunnya tata pemerintahan yang baik yang ditopang oleh penegakan hukum yang berkeadilan dan demokratis, maka secara bertahap penguatan kelembagaan dan kapasitas pelaku pembangunan yang terdiri dari tiga unsur diatas diharapkan mampu mengubah paradigma lama yang menekankan pendekatan *top-down* kepada interaksi *bottom-up-Top down*, melainkan juga berbagi tanggung jawab dan akses terhadap proses dan hasil pembangunan yang makin berorientasi kepada pembangunan manusia dan keberpihakan yang jelas kepada rakyat.

F. PREDIKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Prasarana Jalan

Pembangunan infrastruktur wilayah seperti jalan dan jembatan, irigasi, air bersih dan lainnya, merupakan program utama didalam meningkatkan perkembangan wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah dapat meliputi pengembangan/pembangunan baru, pemeliharaan, peningkatan maupun kegiatan rehabilitasi infrastruktur wilayah.

Prioritas pembangunan jalan di Kabupaten Gianyar perlu diprediksikan untuk mewujudkan kondisi mantap 70 % di Tahun 2015, kemudian di akhir Tahun perencanaan (*Tahun 2025*) kemampuan kondisi jalan di Kabupaten Gianyar sudah berada pada kondisi mantap 80 %. Sehingga pentahapan pelaksanaan penanganan jalan perlu mengikuti koridor penanganan jalan yang sesuai dengan kaidah penanganan jalan, sehingga status pengelolaan jalan Kabupaten yang menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah telah mampu dilaksanakan secara maksimal oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar.

Upaya peningkatan kualitas kondisi jalan dari Jalan Tanah/krikil menjadi aspal mesti diarahkan hingga akhir Tahun Perencanaan 2025 adalah sebesar 40 % dari jalan tanah/krikil yang berstatus sebagai jalan kabupaten, sedangkan upaya peningkatan kualitas jalan dari kondisi aspal Lapen menjadi Hotmix diarahkan pada usaha pencapaian target kondisi mantap, dimana Tahun 2010 Jalan Hotmix diharapkan

mesti mencapai 59,42 %, kemudian di Tahun 2015 sebesar 65,18 %, Tahun 2020 sebesar 71,51 % dan di Tahun 2025 sudah mencapai 78,45 %, artinya di Kabupaten Gianyar akan terdapat jalan hotmix sepanjang 434,46 Km pada akhir Tahun perencanaan 2025 yang mengalami peningkatan dari kondisi sebelumnya sebesar 329,07 km di tahun 2010.

Tabel 2.25.
Prediksi Kemampuan Penanganan Jalan Di Kabupaten Gianyar

Kondisi Jalan	2010	2015	2020	2025
Panjang Jalan (Km)	553.81	553.81	553.81	553.81
Hotmix (Km)	329.07	360.97	396.03	434.46
% Peningkatan	59.42	65.18	71.51	78.45
Aspel Lapen (Km)	224.74	192.84	157.78	119.35
Krikil/Tanah %	10	20	30	40

Untuk kebutuhan pengembangan wilayah di Gianyar, membutuhkan pembangunan jalan baru pada beberapa wilayah, dimana Pembangunan jalan baru juga ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akses jalan antar wilayah serta mengatasi kemacetan lalu lintas, Pembangunan jalan baru juga dikaitkan dengan upaya untuk menyeimbangkan peningkatan pertumbuhan pembangunan jalan dengan peningkatan pertumbuhan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor, sehingga pembagian distribusi arus lalu lintas akibat pengembangan jalan baru dapat mengurangi tingkat kemacetan pada beberapa ruas jalan.

Pengembangan terhadap pembangunan jalan diarahkan sesuai dengan kebijakan daerah yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten Gianyar maupun RDTR di Tingkat wilayah Kecamatan. Beberapa usaha pengembangan jalan yang perlu didukung oleh Daerah adalah kebijakan Provinsi untuk pengembangan jalan baru Beringkit-Batuan-Pantai Purnama yang menjadi proses perencanaan di tingkat Provinsi.

Upaya peningkatan pembangunan jalan di daerah, memerlukan adanya dukungan dan partisipasi masyarakat, khususnya pada jalan-jalan perdesaan yang belum berstatus sebagai jalan Kabupaten, dukungan partisipasi pembangunan jalan secara swadaya, diarahkan pada unsur pemerataan wilayah, dimana dukungan stimulan pembangunan swadaya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ingin melaksanakan pembangunan jalan secara swadaya.

2. Jaringan Irigasi

Dalam kurun waktu perencanaan hingga Tahun 2025, pembangunan jaringan irigasi

mesti diarahkan pada upaya memaksimalkan dukungan suply air untuk kepentingan ketahanan pangan di Gianyar.

Dimana dari luas lahan sawah yang ada di Gianyar sebagian besar merupakan lahan sawah semi teknis yang dikembangkan dan dikelola oleh Dinas PU. sehingga arah pembangunan irigasi ditekankan pada optimalisasi sumber daya air melalui kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan irigasi seperti bendung, bangunan bagi, bangunan sadap, saluran sekunder maupun saluran tersier.

Adanya partisipasi dari lembaga subak merupakan suatu dukungan moral dan materiil dalam pengembangan pembangunan irigasi di Kabupaten Gianyar, dimana partisipasi subak dapat berupa pembangunan saluran secara swadaya atau pembuatan bangunan bendung dan bangunan bagi, namun demikian untuk mengurangi beban masyarakat petani dalam pembiayaan infrastruktur wilayah, maka kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi di Gianyar perlu ditingkatkan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

Kondisi saat ini terdapat 30 % jaringan irigasi teknis yang mengalami kerusakan baik pada saluran maupun bangunan airnya, sehingga arah peningkatan pembangunan jaringan irigasi mesti diupayakan untuk menekan tingkat kerusakan jaringan irigasi yang ada, dimana dalam Tahun 2010 tingkat kerusakan jaringan irigasi teknis diprediksi mencapai target sebesar 25,76 %, kemudian di Tahun 2015 tingkat kerusakan jaringan irigasi mencapai 22,12 %, di Tahun 2020 tingkat kerusakan menurun lagi mencapai 19 %, dan di Tahun 2025 tingkat kerusakan jaringan hanya berkisar 16,31 % dari total jaringan irigasi teknis yang ada. Sedangkan irigasi non Teknis yang masih dikelola secara mandiri oleh Subak, maka dari tingkat kerusakan sebesar 55 % sekarang diharapkan sudah menurun menjadi 44,94 % di Tahun 2015 dan di akhir Tahun perencanaan (*Tahun 2025*) tingkat kerusakan jaringan irigasi Non Teknis hanya berkisar 36,72 %.

4. Jaringan Air Bersih

Jaringan air bersih yang dilayani oleh PDAM Kabupaten Gianyar mengalami penurunan terhadap cakupan pelayanan, dimana hal ini diakibatkan oleh semakin menyusutnya produksi air dan debit sumber air yang menjadi sumber produksi bagi PDAM Gianyar, sehingga mempengaruhi penurunan suply air kepada pelanggan, dimana saat ini cakupan pelayanan PDAM Gianyar untuk tingkat perkotaan adalah sebesar 73,21 % dan Perdesan sebesar 55,96 %.

Pengembangan jaringan air bersih di Gianyar dalam kurun waktu Tahun Perencanaan hingga Tahun 2025, diarahkan untuk mewujudkan konsensus internasional dan Nasional terhadap pengembangan Paket *Millenium Development Goals* (MDGs) di daerah, sehingga untuk mewujudkan maksud tersebut, maka program pengelolaan air bersih

dilakukan melalui pengembangan kapasitas internal dan eksternal yang menyangkut pengembangan kapasitas PDAM secara komprehensif.

Secara internal, penguatan kapasitas kelembagaan dan pelayanan PDAM, harus mengarah pada pencapaian peraih standar ISO, perbaikan kualitas pelayanan kepada pelanggan serta PDAM harus bebas dari hutang pinjaman SLA-P3KT East Java – Bali (Batch I) pada akhir Tahun Perencanaan (2025).

Upaya kemampuan pemulihan keuangan PDAM, diprediksikan akan meningkatkan kemampuan kapasitas PDAM untuk melakukan investasi dalam mengembangkan sumber-sumber produksi baru dan pengembangan jaringan perpipaan, sehingga antrean pelanggan dapat dikurangi serta semakin sejahteranya masyarakat di Kabupaten Gianyar.

Tingkat konsumsi air bersih di Gianyar diperkirakan baru mencapai sekitar 90 Ltr/Or/Hr, dimana jumlah tersebut masih jauh dari standar internasional dalam MDGs yang mencapai 125 Ltr/Or/Hr, sehingga hingga akhir Tahun Perencanaan (2025) masyarakat di Gianyar akan semakin sehat dengan mengkonsumsi air sebesar 120 Ltr/Or/Hr, yang digunakan untuk kebutuhan air minum, cuci, dapur dan lain sebagainya.

G. PREDIKSI TATA RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Pengelolaan tata ruang di Kabupaten Gianyar diprediksikan untuk mewujudkan tata kelola ruang yang lebih baik guna meningkatkan keseimbangan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan.

Pengelolaan Tata Ruang diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi pengendalian ruang agar tidak terjadi pelanggaran dalam pemanfaatan ruang, melalui peningkatan transparansi pengelolaan tata ruang dan meningkatkan peran institusi pengendalian tata ruang (TKPRD/Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah).

Peran kawasan lindung yang memiliki fungsi lindung baik bagi kawasan sekitarnya maupun kawasan bawahannya memiliki peran strategis didalam menjaga keseimbangan pengelolaan sumber daya, sehingga rantai ekosistem pengelolaan sumber daya dapat berlangsung secara berkesinambungan. Oleh karenanya upaya pengendalian alih fungsi kawasan lindung tidak boleh terjadi hingga akhir tahun perencanaan (Tahun 2025). Dimana keberadaan kawasan lindung di Gianyar dari awal tahun perencanaan 2005 hingga Tahun 2025 mesti dipertahankan hingga tetap berjumlah seluas 1.981,18 Ha.

Untuk mewujudkan tata kelola ruang yang lebih baik, maka peran institusi/kelembagaan pengelolaan tata ruang hingga akhir tahun perencanaan (2025) perlu diberikan kewenangan yang lebih luas, baik dalam penyusunan tata ruang, pemanfaatan ruang maupun pengendalian tata ruang, dengan meningkatkan kemampuan SDM pengelolaan

Tata Ruang melalui diklat/pelatihan pengendalian tata ruang.

Usaha menekan atau memperkecil tingkat penyimpangan pemanfaatan tata ruang hingga akhir Tahun perencanaan (2025) diarahkan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di daerah, dengan mensinergikan dan menyeimbangkan kebutuhan ruang untuk investasi dan fungsi lingkungan hidup.

Pengelolaan Tata Ruang yang ditujukan untuk pengembangan wilayah diprediksikan untuk mewujudkan keseimbangan dan pemerataan pertumbuhan investasi antar wilayah kecamatan dengan memperhatikan *carrying capacity* baik yang menyangkut ketersediaan sumber daya wilayah maupun faktor kesesuaian lahan, sehingga *disparitas* pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat dikurangi.

Perkembangan pusat-pusat pertumbuhan (*Growth Pool*) diatur melalui pembagian hirarki wilayah, sehingga antara pusat pertumbuhan wilayah yang satu dengan pusat pertumbuhan wilayah yang lainnya tidak menimbulkan persaingan dan kekuatan tarik menarik, namun antara pusat-pusat pertumbuhan tersebut, yang sesuai hirarkhinya diarahkan untuk saling mendukung sehingga tercipta *komplementer* wilayah yang saling menguntungkan bagi perkembangan wilayah masing-masing.

Proses *aglomerasi* perkembangan industri di Gianyar diprediksikan untuk menuju kesesuaian arahan peruntukan ruang, dimana hal ini disesuaikan dengan ketersediaan faktor-faktor lokasi yang menyangkut ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, energi dan daya dukung wilayah lainnya, dan yang tak kalah pentingnya adalah karakteristik seni dan budaya dimasing-masing wilayah yang telah ada selama ini yang telah mampu menjadi inspirasi didalam menciptakan kreasi produk industri, sehingga menuju kearah penciptaan *branding* wilayah yang mengarah kepada terciptanya spesialisasi keunggulan wilayah dalam menghasilkan produk industri.

Pengembangan fasilitas perumahan dan permukiman dalam penataan ruang daerah hingga akhir Tahun perencanaan (2025) diprediksikan untuk mewujudkan tersedianya kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun (*Kasiba/Lisiba*) melalui jasa pengembangan perumahan/permukiman swasta yang ada di daerah di kawasan kecamatan Sukawati, Blahbatuh, Gianyar dan Ubud dengan memanfaatkan lahan-lahan kurang produktif untuk dikembangkan sebagai lahan atau lokasi perumahan.

H. PREDIKSI PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

Pembangunan lingkungan hidup di Gianyar dari awal Tahun Perencanaan (2005) hingga Tahun 2025 diprediksikan untuk memperkuat kapasitas institusi/kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Peran institusi pengelola lingkungan hidup perlu ditingkatkan kemampuannya dengan meningkatkan dan mengembangkan SDM pengelola lingkungan hidup terhadap

berbagai aturan dan kebijakan dibidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, disisi lain peningkatan kemampuan SDM aparatur pengelolaan lingkungan hidup dalam pemantauan dan pengelolaan AMDAL, UKL dan UPL perlu dikembangkan untuk mengatur fungsi kelestarian lingkungan hidup dengan kepentingan dan kebutuhan terhadap investasi di daerah.

Kejadian pencemaran lingkungan hidup, khususnya menyangkut pencemaran air permukaan, oleh usaha industri maupun masyarakat masih berlangsung, namun dalam periode Tahun 2020-2025 diprediksikan tidak ada lagi aktivitas industri yang mencemari air permukaan atau sumber-sumber air yang ada di Gianyar, dimana setiap usaha industri diwajibkan sudah memiliki AMDAL, UKL/UPL serta memiliki pengelolaan limbah cair khusus sebagaimana yang tertuang dalam dokumen AMDAL, UKL/UPL.

Pengendalian pencemaran kualitas air wajib diikuti dengan peningkatan pembinaan kepada masyarakat agar tidak memanfaatkan sumber air permukaan untuk kegiatan mandi, cuci dan kakus yang merupakan penyebab tertinggi pencemaran air di Kabupaten Gianyar, hingga tahun 2025, kegiatan pembinaan pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Gianyar diarahkan sudah terlaksana 100 % baik melalui kegiatan kampanye pelestarian lingkungan hidup, pengembangan brosur, pembuatan film dokumenter tentang pelestarian lingkungan hidup dan kegiatan lainnya.

Usaha pengembangan konservasi sumber daya alam perlu dilakukan pada lahan-lahan yang selama ini memiliki potensi terhadap tambang galian C, agar tidak turut dirambah oleh pengusaha galian C yang ada saat ini, karena kawasan dipinggiran sungai yang ada di Gianyar juga memiliki fungsi dalam perlindungan wilayah khususnya kawasan bawahannya, disamping, kawasan tersebut juga berfungsi sebagai kawasan resapan air. Hingga air tahun perencanaan (2025) diprediksikan bahwa di Gianyar tidak ada lagi lokasi baru penambangan galian golongan C, serta terhapusnya pengusaha tambang yang tidak memiliki ijin.

Usaha konservasi tersebut perlu diikuti dengan penguatan kemampuan institusi, oleh karenanya, kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup diprediksikan hingga akhir Tahun 2020 telah memiliki Peraturan Daerah mengenai Pertambangan Daerah yang akan mengatur pengelolaan pertambangan dan usaha konservasi di daerah.

Dibidang kehutanan, walaupun di Gianyar tidak terdapat Hutan menurut Peraturan Menteri Kehutanan, namun Hutan Rakyat di Gianyar dapat berkembang dengan baik di Gianyar, bahkan luasnya menunjukkan trend yang meningkat. Namun dalam rangka meningkatkan kemampuan wilayah dalam fungsi peresapan, maka pengendalian Hutan di Gianyar diprediksikan untuk meningkatkan persentase tutupan lahan hutan, dimana hal ini dilakukan dengan meningkatkan kegiatan GERHAN, maupun kegiatan reboisasi di luar hutan maupun pada lahan-lahan yang berpotensi kritis.

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

3.1. ANALISIS FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL

Analisis wilayah meliputi analisis faktor internal dan faktor eksternal. Analisis terhadap faktor internal disusun berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Kabupaten Gianyar ditinjau dari peran dan fungsinya menjalankan urusan yang menjadi kewenangan wajib pemerintah daerah. Sedangkan analisis faktor eksternal didasarkan pada kekuatan – kekuatan eksternal yang mempengaruhi pembangunan daerah Kabupaten Gianyar dan tidak dapat diintervensi oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar. Faktor eksternal digolongkan ke dalam dua kategori yaitu peluang dan ancaman. Kedua faktor tersebut dianalisis secara sistematis berdasarkan urusan dan fungsi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, yakni sebagai berikut :

1. Pelayanan Umum
2. Ketertiban dan Ketentraman
3. Ekonomi
4. Lingkungan Hidup
5. Perumahan dan Fasilitas Umum
6. Kesehatan
7. Pariwisata dan Budaya
8. Pendidikan
9. Perlindungan Sosial

3.1.1. Pelayanan Umum.

Faktor Internal :

- Kewenangan sebagai daerah otonom dan kepemimpinan daerah yang lahir dari proses demokrasi telah memberikan keleluasaan bagi Kabupaten Gianyar dalam pelaksanaan pemerintahan, pelayanan umum serta pengelolaan pembangunan yang sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakat.
- Pelayanan umum pemerintahan di Kabupaten Gianyar berjalan cukup baik yang didukung oleh aparatur pemerintah cukup memadai yaitu sebanyak 7.154 orang pada Tahun 2007 (meningkat sebesar 2,77% dari Tahun 2005). Jika ditinjau dari jumlah penduduk Tahun 2006 yaitu 387.183 jiwa, maka ratio pelayanan umum antara jumlah aparatur dengan jumlah penduduk yaitu 1 : 54. Artinya setiap 1 orang pegawai melayani 54 penduduk dalam berbagai pelayanan umum baik pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum lainnya. Untuk mengoptimalkan pelayanan umum menuju terwujudnya pelayanan prima, Pemerintah Kabupaten Gianyar melakukan terobosan dengan membentuk UPT (Unit Pelayanan Terpadu) khususnya dalam pelayanan perijinan.

- Untuk meningkatkan pelayanan umum, Pemerintah Kabupaten Gianyar didukung oleh aparatur pemerintah dengan tingkat pendidikan yang memadai. Kondisi tahun 2007 menunjukkan bahwa 51,75% berpendidikan sarjana (S1), 29,44% berpendidikan SMU, 13,04% berpendidikan Diploma, 1,94% berpendidikan S2 dan sisanya 3,82% berpendidikan SD dan SLTP. Tingkat pendidikan aparatur yang cukup memadai ini menjadi potensi dasar dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat secara profesional.
- Permasalahan yang dihadapi yang merupakan kelemahan adalah masih terbatasnya pendanaan dan teknologi yang digunakan dalam mendukung proses pelayanan publik. Kelemahan ini secara bertahap disikapi melalui penyediaan sarana-prasarana aparatur baik berupa gedung perkantoran yang representatif dan peralatan penunjang lainnya. Demikian pula anggaran penyelenggaraan pemerintahan terutama yang bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat setiap tahun mengalami peningkatan.

Faktor Eksternal :

- Penyelenggaraan pelayanan umum selama ini dinilai oleh sebagian masyarakat belum memuaskan, hal ini tidak terlepas dari dinamisnya perkembangan pembangunan, informasi dan teknologi yang membutuhkan pelayanan cepat, tepat dan efisien. Dalam rangka meningkatkan pelayanan umum, disadari masih kurangnya pelatihan-pelatihan keahlian bidang tertentu sesuai dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat.
- Untuk meningkatkan pelayanan umum, perlu ditanamkan mental aparatur berperilaku sebagai pelayan masyarakat, sehingga tumbuh dari dalam diri kesadaran untuk mengembangkan kapasitas individu serta rasa tanggungjawab terhadap tugas dan beban kerja yang diembannya.
- Telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam peranan pemerintah (institusi birokrasi) dalam penyelenggaraan pembangunan, dari peran pemerintah yang sangat dominan menjadi peran pemerintah yang semakin berkurang; sejalan dengan semakin besarnya peran yang dimainkan oleh komponen masyarakat sipil dan swasta/pengusaha. Penyelenggaraan pemerintahan ini sangat ditentukan keberhasilannya oleh institusi birokrasi pemerintah. Pembentukan birokrasi pemerintah, sebelum era otonomi daerah (2001) sangat diwarnai dengan nuansa sentralistik (menekankan pada *physical structure*), dimana semuanya ditentukan oleh Pusat, setelah tahun 2001 kelembagaan pemerintah daerah semakin memperhatikan nuansa lokal (menekankan pada *logical structure*).
- Dimasa lalu, penempatan aparatur pemerintah sebagai salah satu pilar kekuasaan politik telah mendatangkan dilema ketika terjadi reformasi dan perubahan kekuasaan politik. Hal ini terjadi karena sudah sejak lama aparatur pemerintah berada dalam posisi yang tidak netral, kurang memiliki pola pengembangan karir yang jelas berbasis pada profesionalitas dan kompetensi. Dengan kata lain, telah terjadi perubahan normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal tersebut ditunjukkan dari kebijakan penempatan aparatur mulai menggunakan pertimbangan kemampuan manajerial serta profesionalisme.
- Tantangan ke depan terkait pelayanan umum pemerintah adalah kelembagaan pemerintah daerah semakin dituntut untuk dapat memberikan pelayanan berbasis kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

publik; yang dapat selalu mengantisipasi dan mengakomodasi dampak positif perubahan dari berbagai aspek, seperti desentralisasi, demokratisasi, globalisasi, teknologi dan informasi.

Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal di atas, menunjukkan terdapat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi Kabupaten Gianyar selama ini dalam usahanya memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, seperti ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Pemetaan SWOT Fungsi Pelayanan Umum Pemerintahan

Faktor dari Dalam	<p><i>Strength (Kekuatan)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah aparat Pemda cukup memadai 2. Tingkat pendidikan cukup memadai. 3. Sarana peralatan yang tersedia 4. Dana operasional cukup 5. Akses yang baik terhadap seluruh wilayah 	<p><i>Weakness (Kelemahan)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pelatihan bidang tertentu 2. Kurangnya mental untuk mengembangkan diri 3. Kurangnya mental sebagai pelayan masyarakat 4. Kurangnya rasa tanggung jawab pada tugas yang dibebankan 5. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan bidang keahlian/ kopetensinya 6. Menumpuknya pegawai pada unit-unit tertentu 7. Belum berkembangnya sistim penilaian kinerja
Faktor dari Luar	<p><i>Opportunity (Peluang)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Relatif dekat dengan pusat-pusat pendidikan 2. Relatif dekat dengan pusat pemerintahan propinsi sehingga memudahkan akses terhadap program-program propinsi 3. Kondisi masyarakat yang lebih maju sehingga memudahkan sosialisasi program-program 4. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang relatif tinggi 5. Ketentuan otonomi daerah 	<p><i>Threat (Ancaman)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isu negatif tentang kinerja aparat 2. Isu negatif tentang ketidak transparanan 3. Ancaman dari pihak-pihak yang tidak senang dengan program-program pelayanan pemerintah

	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
Opportunity (Peluang)	<p>SO (<i>mengoptimalkan kekuatan dan peluang</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kemampuan/ keahlian aparat melalui pelatihan ataupun pendidikan. Pendataan aset sarana prasarana aparatur dan mengoptimalkan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Prov Bali dan kabupaten/kota lain. Melaksanakan revitalisasi otonomi daerah Peningkatan penerimaan daerah dengan inten dan ekstensifikasi 	<p>WO (<i>memperbaiki kelemahan untuk menangkap peluang</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kemampuan/ keahlian pegawai melalui pelatihan ataupun pendidikan. Penempatan mental aparat dalam paradigma sebagai pelayan masyarakat Mereposisi penyebaran aparat di SKPD yang sesuai dengan kapabelitasnya sehingga mampu berfungsi maksimal Melaksanakan sistem penilaian kinerja yang berkesinambungan, serta ditindaklanjuti dengan pemberian insentif dan disinsentif yang nyata.
Threat (Ancaman)	<p>ST (<i>mengoptimalkan kekuatan untuk menekan ancaman</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan upaya peningkatan pelayanan umum masyarakat melalui unit pelayanan terpadu ataupun pusat pelayanan di kecamatan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penerapan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi dengan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan 	<p>WT (<i>memperbaiki kelemahan sekaligus menekan ancaman</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kemampuan/ keahlian pegawai melalui pelatihan ataupun pendidikan. Penempatan mental aparat dalam paradigma sebagai pelayan masyarakat

3.1.2. Ketertiban dan Ketentraman.

Faktor Internal :

- Ketertiban dan ketentraman dititik beratkan pada penciptaan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik dan ekonomi, serta bencana yang dapat meresahkan masyarakat.
- Peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan masyarakat akan dibangun melalui mekanisme pemolisian masyarakat. Pemolisian masyarakat berarti masyarakat turut bertanggung jawab dan berperan aktif dalam penciptaan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kerja sama dan kemitraan dengan polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
- Salah satu upaya kongkrit Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam upaya meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat yaitu melalui peningkatan peran lembaga keamanan masyarakat seperti Hansip, Satpam serta Pecalang.
- Penerapan teknologi CCTV telah dipasang pada tempat-tempat strategis dalam rangka mengoptimalkan ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- Penegakan hukum (supremasi hukum) merupakan prasyarat mutlak dalam upaya menciptakan ketertiban dan ketentraman umum.

Faktor Eksternal :

- Pada masa lalu, penyelenggara pemerintahan (penguasa) menggunakan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai salah satu prasyarat utama (dikenal dengan istilah stabilitas) untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan; sebagai dampaknya, tingkat kriminalitas cenderung rendah. Pada era reformasi cenderung terjadi peningkatan gangguan kriminalitas karena besarnya dampak krisis multi dimensi berupa tingginya angka pengangguran, kemiskinan dan faktor ekonomi lainnya. Tantangan utama yang dihadapi adalah mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- Tantangan yang harus diatasi pada masa mendatang adalah membangun standar keamanan minimal, sehingga mampu memberikan jaminan keamanan kepada seluruh masyarakat, menjamin martabat kemanusiaan, keselamatan warga, dan ancaman terhadap konflik horisontal.
- Adanya gangguan keamanan dalam berbagai bentuk kejahatan dan potensi konflik horisontal akan meresahkan dan berakibat pada pudarnya rasa aman masyarakat. Terjaminnya keamanan dan adanya rasa aman bagi masyarakat merupakan syarat penting bagi terlaksananya pembangunan di berbagai bidang.

Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal di atas, menunjukkan terdapat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi Kabupaten Gianyar selama ini dalam usahanya menciptakan ketertiban dan ketentraman, seperti ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Pemetaan SWOT Fungsi Ketertiban dan Ketentraman

Faktor dari Dalam	<p><i>Strength (Kekuatan)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah aparat ketertiban dan keamanan cukup memadai 2. Sarana-prasarana cukup, termasuk tersedianya aturan dan perundangan 3. Adanya budaya ramah dan saling peduli 4. Adanya sikap toleransi dan gotong royong yang membudaya 5. Adanya sistem keamanan adat yang mandiri 	<p><i>Weakness (Kelemahan)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya sikap mental masyarakat untuk mengikuti peraturan. 2. Cepatnya masyarakat adat terprovokasi berkaitan dengan sengketa adat. 3. Beberapa aturan sepertinya tumpang tindih 4. Kekurang tegasan penerapan sanksi. 5. Kurangnya sistem penghargaan pada pihak-pihak yang berprestasi
Faktor dari Luar	<p><i>Opportunity (Peluang)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besarnya perhatian dunia luar pada keamanan dan ketertiban Gianyar 	<p><i>Threat (Ancaman)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besarnya penduduk liar akibat tingginya angka migrasi 2. Besarnya dorongan penduduk liar untuk terjun pada aktivitas yang melanggar aturan/ kriminal 3. Gianyar bagian dari Bali sebagai barometer dunia, sehingga banyak dijadikan target gangguan keamanan

	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
Opportunity (Peluang)	<p>SO <i>(mengoptimalkan kekuatan dan peluang)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Mendorong dan memfasilitasi sistem keamanan masyarakat. Membina sikap dan prilaku masyarakat yang peduli terhadap ketertiban dan keamanan Menjalin kerjasama keamanan dengan daerah lain 	<p>WO <i>(memperbaiki kelemahan untuk menangkap peluang)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Menumbuh kembangkan budaya malu pelanggaran dan taat aturan Mere-view peraturan agar tidak tumpang tindih Mengembalikan fungsi adat dan budaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan Menanamkan kesadaran keragaman adat dan budaya Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggar aturan dan pemberian penghargaan padapihak yang berprestasi terhadap terciptanya ketertiban dan keamanan
Threat (Ancaman)	<p>ST <i>(mengoptimalkan kekuatan untuk menekan ancaman)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan sarana prasarana ketertiban untuk mengontrol masuknya penduduk pendatang Mendorong sistem keamanan adat mandiri dalam pengawasan wilayahnya yang tidak tumpang tindih dengan tugas aparat keamanan. Tetap mempertahankan budaya ramah dan peduli dan mendorong munculnya budaya waspada Mengintensifkan sistem keamanan pada lokasi-lokasi strategis. 	<p>WT <i>(memperbaiki kelemahan sekaligus menekan ancaman)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Menumbuhkan tertib aturan dan administrasi kependudukan Menertibkan dan menindak tegas penduduk liar

3.1.3. Ekonomi.

Faktor Internal :

- Keberhasilan dalam pembangunan perekonomian daerah ditunjukkan oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 pertumbuhan perekonomian daerah sebesar 5,32%, naik dari tahun selumnya yaitu 5,20%.
- Pertumbuhan lapangan usaha terbesar di sektor jasa-jasa yang mencapai 9,13% (tahun 2007), disusul sektor listrik, gas, air bersih yang mencapai 8.70% dan sektor pertanian dalam arti luas sebesar 6.77%.
- Pada tahun 2006, sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor industri pengolahan sebanyak 62.502 orang atau 27,67%, selanjutnya sektor perdagangan, hotel dan restoran sebanyak 58.544 orang atau 25,92 % dan ketiga terbanyak adalah sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan sebanyak 39.463 orang (17,47%).
- Sektor pertanian sangat potensial dikembangkan secara sinergis dengan sektor perekonomian lainnya, mengingat lahan pertanian masih cukup luas serta penduduk yang berkerja di sektor pertanian mencapai sekitar 17,47%.
- Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik sebagaimana tersebut di atas memberikan pengaruh signifikan dengan penerimaan keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar yang terus mengalami peningkatan, merupakan salah satu sumber potensial pembiayaan pembangunan daerah. PAD Tahun 2007 mencapai Rp. 75.129,63 Milyar mengalami peningkatan sebesar 10,75 % dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 67.838,57 Milyar.

Penerimaan tertinggi komponen PAD adalah dari pajak daerah yang mencapai 53,17 %.

- Tumbuhnya lembaga-lembaga keuangan mikro, ditunjang potensi perkembangan di sektor industri kecil, perdagangan dan jasa, serta keberadaan pasar umum dan pasar seni.
- Infastruktur cukup memadai sebagai urat nadi perekonomian daerah, dengan akses keluar-masuk Kabupaten Gianyar yang sangat mudah dijangkau.
- Jumlah penduduk yang relatif banyak disamping merupakan pasar yang potensial juga menjadi sumber tenaga kerja yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan.

Faktor Eksternal :

- Kendala pengembangan sektor pertanian selain menyangkut permodalan dan teknologi, adalah menurunnya minat masyarakat bergerak dalam lapangan usaha pertanian disebabkan oleh biaya produksi yang tinggi tidak sebanding dengan nilai produksinya seiring dengan menurunnya potensi pengairan dan melemahnya fungsi irigasi. Hal ini juga disebabkan adanya kesenjangan dukungan pembiayaan pemerintah antara sektor pertanian dengan sektor lainnya.
- Peluang yang dimiliki Kabupaten Gianyar dalam menurunkan tingkat pengangguran adalah dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan investasi akan membuka lapangan kerja yang dapat menurunkan tingkat pengangguran. Sedangkan ancaman yang dihadapi Kabupaten Gianyar adalah kondisi keamanan regional yang belum kondusif sehingga mengurangi investasi. Dimana pengurangan aktivitas investasi akan menambah pengangguran.
- Peluang yang dimiliki Kabupaten Gianyar untuk mengurangi kemiskinan adalah adanya komitmen dan kebijakan pemerintah pusat serta Provinsi untuk mengurangi kemiskinan dengan berbagai program pengentasan kemiskinan serta bantuan kepada keluarga miskin. Sedangkan ancaman yang dihadapi adalah belum pulihnya perekonomian sehingga menyebabkan kemampuan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk membiayai program kemiskinan semakin menurun.
- Tantangan yang dihadapi dalam bidang ekonomi adalah persaingan usaha yang makin ketat seperti teknologi, permodalan dan kualitas sumber daya manusia yang memadai pada masing-masing lapangan usaha. Tantangan lainnya adalah masih rentannya struktur ekonomi, kesempatan berusaha, ketimpangan pendapatan dan belum berkembangannya ekonomi kerakyatan, masih rendahnya investasi, serta masih belum memudahinya infra struktur ekonomi dan perdagangan.

Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal di atas, menunjukkan terdapat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi Kabupaten Gianyar selama ini dalam usahanya meningkatkan perekonomian daerah, seperti ditunjukkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Pemetaan SWOT Fungsi Ekonomi

Faktor dari Dalam	<p>Strength (Kekuatan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan Pertanian dan masyarakat tani yang cukup besar 2. Perkembangan industri dalam hal ini industri kecil dan rumah tangga (kerajinan dan tekstil). Th 2006 terdapat 21.893 unit usaha dengan pertumbuhan 0,18%/ th. 3. Kelancaran akses/ transportasi 4. Besarnya potensi perdagangan 5. Adanya pasar yang memadai baik pasar umum ataupun pasar seni 6. Tumbuhnya bank-bank mikro di pedesaan 	<p>Weakness (Kelemahan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besarnya biaya produksi pertanian dan kurang terjaminnya harga hasil pertanian 2. Kurangnya minat masyarakat pada pertanian 3. Besarnya gap dukungan pembiayaan sektor primer dengan sektor sekunder dan tersier 4. Adanya gap pembangunan antar wilayah 5. Keterbatas SDM di masing-masing sektor 6. Keterbatasan teknologi 7. Penurunan potensi pengairan dan melemahnya fungsi subak 8. Hubungan ketenaga kerjaan yang sering mendapat masalah
Faktor dari Luar Luar	<p>Opportunity (Peluang)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besarnya peluang masyarakat untuk ikut aktif pada penanaman modal 2. Besarnya potensi pasar hasil pertanian 3. Besarnya potensi pasar hasil industri kecil dan kerajinan 	<p>Threat (Ancaman)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagusnya mutu produk impor di bidang pertanian 2. Diterapkannya pasar bebas 3. Adanya kebijakan impor produk pertanian dari daerah lain 4. Adanya hasil industri dan kerajinan daerah lain yang dipasarkan di Gianyar.

Keterangan : Data kuantitatif dikutip dari Profil Daerah Gianyar 2006

	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
Opportunity (Peluang)	<p>SO (mengoptimalkan kekuatan dan peluang)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian dengan mengutamakan cara intensifikasi b. Memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan sektor industri c. Meningkatkan fungsi pasar-pasar tradisional setra pemasaran kerajinan d. Mendorong sistem perdagangan modern e. Membantu permodalan usaha mikro 	<p>WO (memperbaiki kelemahan untuk menangkap peluang)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengupayakan penurunan besaran biaya produksi bidang pertanian. b. Mendorong pemanfaatan teknologi pada upaya peningkatan produksi pertanian dan industri c. Menyadarkan masyarakat untuk tetap mencintai persubakan dan pertanian d. Meningkatkan SDM tenaga kerja dan memfasilitasi penyelesaian krisis ketenagakerjaan e. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah disesuaikan dengan fungsi wilayahnya
Threat (Ancaman)	<p>ST (mengoptimalkan kekuatan untuk menekan ancaman)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan mutu produk pertanian dan industri b. Mendorong penciptaan kreasi-kreasi baru produk kesenian 	<p>WT (memperbaiki kelemahan sekaligus menekan ancaman)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan mutu produk pertanian dan industri b. Mendorong pemanfaatan teknologi pada upaya peningkatan produksi pertanian dan industri c. Memfasilitasi sistem promosi dan pengenalan produk pertanian dan industri

3.1.4. Lingkungan Hidup

Faktor Internal :

- Kondisi lingkungan Kabupaten Gianyar saat ini mengalami penurunan kualitas yang cukup signifikan ditinjau dari beberapa indikator seperti kerusakan wilayah pantai berupa abrasi, sedimentasi, akresi dan instruksi air. Pada sisi lain berkembangnya kegiatan industri, transportasi dan limbah domestik yang kurang memperhatikan pengelolaan lingkungan mengakibatkan terjadinya polusi dan pencemaran lingkungan.
- Pembangunan di bidang lingkungan sejalan dengan rencana tata ruang dengan orientasi optimalisasi pemanfaatan ruang dengan konservasi bagi kelestarian lingkungan.
- Kualitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana lingkungan hidup masih terbatas.

Faktor Eksternal :

- Tantangan kedepan dalam penanganan masalah lingkungan adalah perkembangan perkotaan dihadapkan keterbatasan daya dukung, komitmen yang kurang dalam penanganan lingkungan, kesadaran masyarakat yang rendah, serta konsistensi dalam pengendalian pengembangan wilayah yang berkelanjutan.

Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal di atas, menunjukkan terdapat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi Kabupaten Gianyar selama ini dalam usahanya melestarikan lingkungan hidup, seperti ditunjukkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Pemetaan SWOT Fungsi Lingkungan Hidup

Faktor dari Dalam	<i>Strength (Kekuatan)</i> 1. Tingginya budaya yang berhubungan dengan perlindungan terhadap lingkungan 2. Adanya RTH didaerah <i>recharge area</i> 3. Sudah dibuatnya aturan tentang ketata ruangan 4. Besarnya potensi air tanah dan air permukaan	<i>Weakness (Kelemahan)</i> 1. Rendahnya mental masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. 2. Orientasi masyarakat yang tak mau dibebani biaya dalam pengelolaan lingkungan 3. Orientasi masyarakat untuk memanfaatkan potensi alam lingkungan yang berjangka pendek 4. Rendahnya penerapan sanksi pada pelanggar lingkungan hidup
	Faktor dari Luar	<i>Opportunity (Peluang)</i> 1. Besarnya perhatian dunia luar terhadap lingkungan Daerah Gianyar

	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
Opportunity (Peluang)	<p>SO (<i>mengoptimalkan kekuatan dan peluang</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> Memupuk budaya dan kearifan lokal yang memberi perlindungan terhadap lingkungan Mempertahankan kawasan terbuka hijau terutama hutan di bagian utara Gianyar Merealisasikan rencana tata ruang yang telah disepakati masyarakat. 	<p>WO (<i>memperbaiki kelemahan untuk menangkap peluang</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendorong tumbuhnya mental masyarakat yang berpihak pada pengelolaan lingkungan hidup Menciptakan iklim yang mendorong upaya pemanfaatan lingkungan secara berkelanjutan
Threat (Ancaman)	<p>ST (<i>mengoptimalkan kekuatan untuk menekan ancaman</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> Mempertahankan kawasan terbuka hijau terutama hutan di bagian utara Gianyar Penerapan sanksi tegas terhadap perusak lingkungan dan pemberian penghargaan kepada mereka yang melestarikan lingkungan. 	<p>WT (<i>memperbaiki kelemahan sekaligus menekan ancaman</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyadarkan masyarakat untuk melakukan pengelolaan limbah industri Mengupayakan pengurangan gas emisi dari kendaraan yang terus bertambah Melakukan upaya-upaya penyikapan terhadap bencana alam yang mungkin terjadi Melaksanakan perlindungan pesisir di wilayah Gianyar

3.1.5. Perumahan dan Fasilitas Umum.

Faktor Internal :

- Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor perumahan dan fasilitas umum adalah sulitnya pembebasan lahan untuk mengembangkan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba), disamping terbatasnya dukungan pendanaan dari pemerintah serta lembaga keuangan.
- Pada sektor perumahan munculnya daerah - daerah kumuh dan bangunan liar yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta tersebarnya lokasi perumahan menyebabkan sulitnya penyediaan infrastruktur. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan telah diupayakan melalui program PLP dan P2P.
- Lemahnya dukungan lembaga keuangan dalam penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan menengah kebawah menyebabkan pertumbuhan pembangunan perumahan yang layak huni masih terbatas.
- Prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan Kabupaten Gianyar dengan kabupaten/kota lainnya di Bali dan antar wilayah di Kabupaten Gianyar relatif lancar. Namun demikian masih diperlukan peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan jalan, sehingga seluruh desa dapat dilalui oleh kendaraan dengan lancar. Hali ini sangat penting dalam mendukung pengembangan sektor perumahan dan sektor perekonomian secara umum.
- Keberhasilan Kabupaten Gianyar dalam pengelolaan perhubungan darat adalah penambahan jumlah armada angkutan umum serta pembangunan trayek – trayek baru yang mampu menjangkau seluruh wilayah.

Faktor Eksternal :

- Peluang yang dimiliki Kabupaten Gianyar dalam pengembangan perumahan adalah adanya kebijakan pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan perumahan, sedangkan ancaman yang dihadapi adalah munculnya perumahan liar, pelanggaran terhadap jalur hijau dan adanya penduduk pendatang.
- Dalam pengelolaan jalan dan jembatan adanya Komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk memelihara dan meningkatkan prasarana jalan dan jembatan, sedangkan ancaman yang dihadapi adalah kondisi cuaca (panas, hujan) dan pertumbuhan jumlah kendaraan.

Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal di atas, menunjukkan terdapat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi Kabupaten Gianyar selama ini dalam usahanya mengembangkan perumahan dan fasilitas umum, seperti ditunjukkan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Pemetaan SWOT Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

Faktor dari Dalam	<p>Strength (Kekuatan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa lahan di Gianyar yang topografinya cocok untuk pembangunan perumahan 2. Lokasi yang strategis dengan akses yang baik 	<p>Weakness (Kelemahan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan lahan untuk perumahan 2. Keterbatasan kredit untuk perumahan rakyat 3. Beberapa fasilitas umum belum dapat dituntaskan pembangunannya 4. Beberapa fasilitas umum yang mangkrak dan belum berfungsi. 5. Banyak jalan kabupaten keadaannya sedang sampai rusak 6. Tidak meratanya kelengkapan fasilitas umum antar wilayah di Gianyar 7. Terpencarnya lokasi perumahan sehingga sulit dalam pemenuhan sarana umumnya 8. Adanya tempat tinggal penduduk miskin yang jauh dari standar hunian sehat
Faktor dari Luar	<p>Opportunity (Peluang)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diminatnya lahan-lahan di Gianyar untuk perumahan 2. Banyak dari sarana perhubungan di Gianyar yang merupakan sarana perhubungan propinsi mengingat posisinya di antara kabupaten 	<p>Threat (Ancaman)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besarnya urbanisasi yang memerlukan ketersediaan perumahan dan fasilitas umum

Keterangan : Data kuantitatif dikutip dari Profil Daerah Gianyar 2006

	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
Opportunity (Peluang)	<p>SO (<i>mengoptimalkan kekuatan dan peluang</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas fasilitas umum yang ada di Gianyar Mendorong berkembangnya kawasan-kawasan cepat tumbuh Memfasilitasi adanya kawasan perumahan yang tertata, sehat dan berfihak kepada lingkungan 	<p>WO (<i>memperbaiki kelemahan untuk menangkap peluang</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendorong rehabilitasi jalan – jalan yang berkondisi jelek dan menindaklanjuti fasilitas umum yang sedang mangkrak Mengupayakan pemerataan ketersediaan fasilitas umum di seluruh wilayah Pemenuhan sarana umum perumahan, dan penataan lokasi-lokasi perumahan baru yang dapat dijangkau dengan fasilitas umum Mengupayakan adanya kredit perumahan yang terjangkau
Threat (Ancaman)	<p>ST (<i>mengoptimalkan kekuatan untuk menekan ancaman</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendorong berkembangnya kawasan-kawasan cepat tumbuh Memfasilitasi adanya kawasan perumahan yang tertata, sehat dan berfihak kepada lingkungan 	<p>WT (<i>memperbaiki kelemahan sekaligus menekan ancaman</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemenuhan sarana umum perumahan, dan penataan lokasi-lokasi perumahan baru yang dapat dijangkau dengan fasilitas umum Mengupayakan adanya kredit perumahan yang terjangkau

3.1.6. Kesehatan.

Faktor Internal :

- Peningkatan derajat kesehatan telah menyebabkan perubahan pola hidup sebagian masyarakat. Oleh karena itu tantangan kedepan yang harus diwaspadai adalah berkembangnya penyakit yang disebabkan oleh perubahan pola hidup dan perubahan lingkungan, disamping profesionalisme aparatur kesehatan, sarana prasarana kesehatan, dan perwujudan budaya dan perilaku sehat bagi masyarakat.
- Seluruh wilayah Kecamatan dan Desa telah tersedia Puskesmas / Pustu, serta telah mampu disediakan dokter di masing – masing Puskesmas dan tenaga para medis atau bidan di masing – masing Puskesmas Pembantu. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Gianyar adalah belum dimanfaatkannya secara optimal pelayanan di masing-masing Puskesmas atau Pustu oleh masyarakat di sekitarnya.
- Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan terus ditingkatkan dan dimantapkan serta penyediaan tenaga medis dan paramedis secara bertahap ditingkatkan sehingga dapat memenuhi standar yang ditentukan. Peningkatan kuantitas harus seiring dengan perbaikan dalam kualitas pelayanan. Demikian juga perlu ditingkatkan jumlah para medis kebidanan dan tenaga para medis kesehatan di masing – masing Puskesmas.

Faktor Eksternal :

- Peluang Kabupaten Gianyar dalam meningkatkan derajat kesehatan penduduk adalah Komitmen Pemerintah Pusat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sedangkan ancaman yang dihadapi adalah semakin merebaknya beberapa penyakit epidemik (Flu Burung, Antrak) yang dapat mengancam kesehatan penduduk di Kabupaten Gianyar.
- Keberhasilan Kabupaten Gianyar dalam meningkatkan kesehatan penduduk adalah berkurangnya kematian bayi, meningkatnya usia harapan hidup dan berkurangnya status gizi buruk untuk balita di Kabupaten Gianyar, sedangkan permasalahan yang dihadapi adalah masih adanya ketimpangan derajat kesehatan penduduk antara daerah perkotaan dengan daerah perdesan.
- Kontinuitas ketersediaan obat-obatan medis pada seluruh puskesmas dan pustu.

Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal di atas, menunjukkan terdapat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi Kabupaten Gianyar selama ini dalam usahanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, seperti ditunjukkan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Pemetaan SWOT Fungsi Kesehatan

Faktor dari Dalam	<p>Strength (Kekuatan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi sarana kesehatan yang memadai (3 RS, 12 klinik, 13 Puskesmas & 56 Pustu) 2. Potensi tenaga medis (203 org dokter, 517 org perawat dan paramedis, 136 org bidan) 3. Tersedianya obat-obatan 4. Masyarakat yang sudah terbuka akan paradigma hidup sehat 	<p>Weakness (Kelemahan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum lengkapnya peralatan medis 2. Masih ada sarana (gedung) pelayanan kesehatan yang rusak 3. SDM paramedis yang masih perlu ditingkatkan (55% masih dokter umum) 4. Pelayanan yang belum maksimal 5. Mahalnya harga obat-obatan 6. Akses yang belum menjangkau seluruh masyarakat 7. Budaya hidup sehat belum tersebar merata ke masyarakat.
Faktor dari Luar	<p>Opportunity (Peluang)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besarnya kemungkinan rujukan dari kabupaten lain yang berdekatan 2. Dekat dengan pusat-pusat pelayanan kesehatan kualifikasi lebih tinggi di ibu kota propinsi 	<p>Threat (Ancaman)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penduduk miskin (Adanya Balita kurang gizi 47 orang) 2. Musim yang tak dapat ditentukan sehingga sering menimbulkan wabah penyakit. 3. Penyebaran penyakit flu burung semakin mendekat dengan Gianyar 4. Besarnya pengaruh narkoba dan seks bebas 254 penderita Narkoba 7 AIDS/HIV 5. Tingginya kontak dengan dunia luar (Daerah Ubud dan sekitarnya) yang memiliki resiko lebih tinggi tertular penyakit

Keterangan : Data kuantitatif dikutip dari Profil Daerah Gianyar 2006

	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
Opportunity (Peluang)	<p>SO (<i>mengoptimalkan kekuatan dan peluang</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kemampuan/ keahlian petugas kesehatan melalui pelatihan ataupun pendidikan keahlian. Peningkatan sistem pelayanan untuk kesiapan penanganan rujukan dari wilayah sekitarnya. 	<p>WO (<i>memperbaiki kelemahan untuk menangkap peluang</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kemampuan/ keahlian petugas kesehatan melalui pelatihan ataupun pendidikan keahlian. Peningkatan sarana prasarana kesehatan terutama RS dan Puskesmas, dalam upaya peningkatan kemampuan pelayanan kesehatan baik untuk lingkungan sendiri maupun wilayah sekitarnya. Kerjasama dengan lembaga kesehatan yang lebih tinggi, untuk kelancaran proses rujukan dan penanganan
Threat (Ancaman)	<p>ST (<i>mengoptimalkan kekuatan untuk menekan ancaman</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan sistem pengawasan dan penanganan wabah penyakit Peningkatan budaya hidup sehat, terutama untuk mencegah terjadinya pengaruh narkoba. Bantuan kesehatan kepada fakir miskin 	<p>WT (<i>memperbaiki kelemahan sekaligus menekan ancaman</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kemampuan/ keahlian petugas kesehatan melalui pelatihan ataupun pendidikan keahlian, khususnya untuk penanganan wabah Peningkatan budaya hidup sehat, terutama untuk mencegah terjadinya pengaruh narkoba. Peningkatan biaya operasional pada lembaga pelayanan kesehatan masyarakat.

3.1.7. Pariwisata dan Budaya

Faktor Internal :

- Falsafah *Tri Hita Karana* (hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya) yang melandasi tata kehidupan masyarakat Hindu Bali menjamin kehidupan yang harmonis yang dilandasi prinsip kebersamaan menjadi salah satu jaminan terciptanya ketertiban dan keamanan.
- Kabupaten Gianyar memiliki budaya luhur yang khas serta potensi pariwisata yang unik dan menarik. Budaya yang menjadi modal pengembangan pariwisata harus dilestarikan dan dikembangkan, meskipun disadari semakin besarnya pengaruh globalisasi yang berdampak pada perubahan budaya lokal. Hal ini bila tidak diantisipasi dan dikendalikan dikhawatirkan akan berdampak pada perubahan tata nilai budaya lokal.
- Budaya Bali yang dijiwai Agama Hindu tiada duanya di dunia sehingga menjadi salah satu daya tarik penting datangnya wisatawan untuk berkunjung ke Bali termasuk ke Kabupaten Gianyar. Disisi lain Budaya Bali sangat terbuka terhadap nilai-nilai tradisional dan modern yang positif.
- Produk seni dan budaya Kabupaten Gianyar memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif yang sudah cukup dikenal wisatawan.
- Belum maksimalnya pengelolaan potensi pariwisata terutama obyek dan daya tarik wisata (ODTW) yang terdapat di Kabupaten Gianyar. Dari 59 obyek wisata yang ada di Kabupaten Gianyar, saat ini baru mampu dikelola sebanyak 14 buah. Jika dilihat dari tren perkembangan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Gianyar, menunjukkan penurunan terutama Tahun 2005 menurun 4,81% dan kembali menurun Tahun 2006 : 39,63%.

- Kelembagaan adat yang dikenal dengan sebutan desa adat (desa pakraman) sebanyak 271 Desa Adat/Pakraman pada Tahun 2007, merupakan lembaga yang bersifat otonom, dalam arti setiap desa adat mempunyai aturan tersendiri yang berlaku bagi desa/banjar yang bersangkutan. Walaupun demikian aturan-aturan yang tertuang dalam awig-awig Desa Adat tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku baik ditingkat nasional maupun daerah.

Faktor Eksternal :

- Kabupaten Gianyar sebagai salah satu destinasi wisata international yang terdapat di Pulau Bali tidak dapat dihindari dari masuknya pengaruh budaya luar sehingga memunculkan budaya baru. Pada tataran sosial, perubahan yang terjadi adalah munculnya pola-pola perilaku, pola interaksi dan relasi-relasi yang baru pada sebagian warga masyarakat, sedang pada tataran budaya adalah lahirnya nilai-nilai, norma, ide serta gagasan baru dikalangan warga masyarakat tersebut. Hal semacam inilah terjadi di Bali termasuk Kabupaten Gianyar. Banyak hal-hal baru muncul setelah wisatawan yang datang ke Bali semakin banyak. Ada perubahan sosial-budaya disebabkan oleh maraknya kegiatan di bidang pariwisata.
- Pada tataran budaya, perubahan terjadi pada nilai-nilai yang dianut oleh sebagian warga masyarakat, terutama mereka yang banyak mengalami kontak dengan para wisatawan.
- Berbagai perubahan sosial-budaya yang terjadi tidak harus muncul karena adanya wisatawan asing. Makin banyaknya wisatawan domestik ke suatu daerahpun akan membawa angin perubahan dari masyarakat tersebut. Secara kultural, Budaya masyarakat kini telah heterogen, dan heterogenitas kini makin tinggi dari masa ke masa.
- Dampak sosial dan budaya pariwisata merupakan aspek-aspek signifikan dalam keberlangsungan pariwisata bagi Kabupaten Gianyar. Penduduk lokal harus ditingkatkan kesadarannya tentang keberlanjutan pariwisata, dengan menyertakan modal usaha yang mendukung keberlangsungan kepariwisataan berbasis masyarakat.

Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal di atas, menunjukkan terdapat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi Kabupaten Gianyar selama ini dalam usahanya mengembangkan pariwisata dan budaya, seperti ditunjukkan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Pemetaan SWOT Pariwisata dan Budaya

Faktor dari Dalam	<p>Strength (Kekuatan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi Budaya yang sangat tinggi 2. Besarnya potensi dan sarana pelaksanaan ibadah dan pelaksanaan aktivitas adat budaya 3. Besarnya potensi akomodasi pariwisata 4.426 kamar dan kelancaran akses 4. Besarnya potensi obyek-obyek wisata atau atraksi wisata 5. Tingkat kedatangan wisatawan rata-rata 428.324 org/th dari 2002-2006 	<p>Weakness (Kelemahan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya redefinisi adat budaya yang terkadang memicu degradasi budaya 2. Adanya fanatisme negatif terhadap pelaksanaan agama, adat dan budaya 3. Kurangnya orientasi masyarakat dalam penyertaan modal dalam kegiatan kepariwisataan 4. Kedatangan wisatawan terus mengalami penurunan terutama Th 2005 menurun 4,81% dan kembali menurun Th 2006 : 39,63%
Faktor dari Luar	<p>Opportunity (Peluang)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih diminatinya budaya Bali oleh wisatawan 2. Besarnya peluang masyarakat untuk ikut aktif pada penanaman modal kepariwisataan 3. Perbaikan obyek-obyek wisata di luar Gianyar 	<p>Threat (Ancaman)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Degradasi budaya akibat besarnya pengaruh asing dalam era globalisasi 2. Penyusutan budaya akibat menurunnya wahana kebudayaan seperti penyusutan sawah dan tegalan 3. Besarnya urbanisasi 4. Perkembangan kepariwisataan di luar Bali 5. Besarnya ancaman keamanan dari pihak luar. 6. Kondisi keamanan dunia yang berubah-ubah 7. Banyaknya pemilik usaha kepariwisataan adalah orang luar Bali/ Gianyar

Keterangan : Data kuantitatif dikutip dari Profil Daerah Gianyar 2006

	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
Opportunity (Peluang)	<p>SO (mengoptimalkan kekuatan dan peluang)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perlindungan dan pengembangan nilai-nilai budaya. b. Refitalisasi obyek-obyek wisata dan pengembangan atraksi wisata c. Peningkatan kondisi sarana prasarana keagamaan dan budaya d. Peningkatan sumber daya manusia sebagai penyedia jasa pada hotel-hotel e. Peningkatan sarana dan prasarana perhotelan 	<p>WO (memperbaiki kelemahan untuk menangkap peluang)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Upaya pembinaan kepada masyarakat akan keberadaan kebudayaan daerah. b. Pengembangan sikap kebersamaan dan menjauhkan fanatisme negatif c. Mendorong masyarakat untuk berinvestasi pada sektor kepariwisataan d. Melaksanakan promosi kepariwisataan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Threat (Ancaman)	<p>ST (mengoptimalkan kekuatan untuk menekan ancaman)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengupayakan pemanfaatan era globalisasi untuk mendukung upaya kelestarian budaya b. Peningkatan kualitas sarana kepariwisataan dan penciptaan kemudahan wisatawan untuk masuk ke Gianyar. c. Pengembangan sarana pendukung kepariwisataan yang berbasis lokal d. Mendorong masyarakat lokal untuk terus berinvestasi pada sektor kepariwisataan 	<p>WT (memperbaiki kelemahan sekaligus menekan ancaman)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pemahaman dan pengembangan nilai-nilai budaya b. Mencegah adanya fanatisme sempit antar golongan dari sudut agama, adat dan budaya

3.1.8. Pendidikan.

Faktor Internal :

- Pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi masa depan daerah dalam penyediaan sumber daya manusia berkualitas. Tingkat produktivitas dan kompetisi seseorang sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang cerdas dan trampil yang diikuti rasa percaya diri serta sikap dan perilaku yang inovatif.
- Kinerja layanan pendidikan pada semua jenjang dipengaruhi oleh ketersediaan prasarana pendidikan pada semua jenjang. Pasaran pendidikan yang tersedia di Kabupaten Gianyar menunjukkan peningkatan sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Hal ini terlihat dari jumlah Sekolah TK (tahun 2003) sebanyak 79 unit bertambah menjadi sebanyak 94 unit (tahun 2006), sekolah SD/MI (tahun 2003) sejumlah 285 bertambah menjadi sejumlah 287 unit di tahun 2006, sekolah SLTP/MTs dari sejumlah 40 unit di tahun 2003 menjadi sejumlah 44 unit di tahun 2007, dan begitu pula dengan sekolah SMU/SMA terjadi peningkatan dari sejumlah 33 unit di tahun 2003 menjadi sejumlah 38 unit di tahun 2006.
- Peningkatan prasarana pendidikan dari sisi jumlah dibarengi peningkatan kualitas terhadap prasarana yang sudah ada, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, serta kualitas anak didik.
- Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gianyar menerapkan program wajib belajar bagi semua penduduk usia dini serta pemerataan penempatan guru pada semua jenjang pendidikan.

Faktor Eksternal :

- Masih ada anak usia sekolah yang tidak mengikuti pendidikan dasar, Angka Partisipasi Murni SD 96,85% dan SMP 81,70% (Tahun 2006), serta disparitas antar wilayah. Hal tersebut dikarenakan kekurangmampuan ekonomi dan minimnya keinginan untuk bersekolah.
- Rata-rata lamanya penduduk bersekolah masih rendah yaitu 7,7 tahun (Tahun 2006), dengan angka putus sekolah Th 2004 : 2006 (SD 0,58% : 0,67%, SMP 6,37% : 13,20%).
- Terdapat beberapa sarana-prasarana pendidikan dalam kondisi rusak dan tidak memenuhi standar minimal, demikian pula ratio antara ruang kelas dengan jumlah siswa belum sepenuhnya optimal, serta akses ke lokasi pendidikan yang masih perlu ditingkatkan.
- Kesejahteraan guru kurang mendapat perhatian optimal sehingga berpengaruh terhadap kualitas dan kinerja guru.

Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal di atas, menunjukkan terdapat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi Kabupaten Gianyar selama ini dalam usahanya meningkatkan pendidikan masyarakat, seperti ditunjukkan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Pemetaan SWOT Fungsi Pendidikan

Faktor dari Dalam	<p>Strength (Kekuatan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana prasarana pendidikan yang terus meningkat 2. Kualitas dan kuantitas guru-guru yang terus mengalami peningkatan (rasio guru dan murid SD 1:17, SMP 1:12, dan SMA 1:10) 3. Kualitas anak-anak didik 	<p>Weakness (Kelemahan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih ada anak usia sekolah yang tidak mengikuti pendidikan dasar, Angka Partisipasi Murni SD 96,85% dan SMP 81,70% (Th 2006), serta disparitas antar wilayah. Hal tersebut dikarenakan kekurangmampuan ekonomi dan minimnya keinginan untuk bersekolah 2. Rata-rata lamanya penduduk bersekolah masih rendah yaitu 7,7 tahun (Th 2006) 3. Peningkatan angka putus sekolah Th 2004 : 2006 (SD 0,58% : 0,67%, SMP 6,37% : 13,20%) 4. Masih banyak sarana-prasarana pendidikan rusak/ tak sesuai dengan standar (47,8% lokal dalam keadaan rusak ringan dan berat (2006) 5. Rasio kelas dan siswa SMP sangat tinggi 46 siswa/ kelas 6. Akses ke lokasi pendidikan yang masih perlu ditingkatkan 7. SDM guru-guru yang masih perlu ditingkatkan 8. Pendapatan guru-guru yang masih sangat terbatas
Faktor dari Luar	<p>Opportunity (Peluang)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akses Gianyar terhadap daerah lain yang memiliki potensi bidang pendidikan 2. Kebutuhan pasar tenaga kerja dari bidang kejuruan 	<p>Threat (Ancaman)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Era globalisasi dapat merubah perilaku siswa didik kehilangan fokus pada pendidikannya 2. Besarnya peluang di sektor lain, mendorong pendidik mengambil sambilan yang mengganggu fokus mengajar 3.

Keterangan : Data kuantitatif dikutip dari Profil Daerah Gianyar 2006

	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
Opportunity (Peluang)	<p>SO (mengoptimalkan kekuatan dan peluang)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kemampuan/ keahlian pendidik melalui pelatihan ataupun pendidikan lanjutan. b. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dasar c. Mendorong tumbuhnya sekolah kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. d. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan diluar Gianyar 	<p>WO (memperbaiki kelemahan untuk menangkap peluang)</p> <ol style="list-style-type: none"> d. Penuntasan program wajib belajar 9 tahun tanpa mengurangi mutu pendidikan dan mendorong siswa untuk terus melanjutkan pendidikannya. e. Peningkatan sarana prasarana sekolah untuk meningkatkan akses dan perluasan kesempatan belajar bagi semua anak usia pendidikan dasar f. Peningkatan kemampuan/ keahlian pendidik melalui pelatihan ataupun pendidikan lanjutan g. Kerjasama dengan lembaga pendidikan swasta atau daerah lain
Threat (Ancaman)	<p>ST (mengoptimalkan kekuatan untuk menekan ancaman)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mendorong sekolah untuk penyesuaian materi pelajaran dengan mengadopsi kemajuan teknologi sehingga anak didik dapat mengikuti era globalisasi secara terarah. b. Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya penuntasan wajib belajar. c. Mendorong tumbuhnya sekolah kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. 	<p>WT (memperbaiki kelemahan sekaligus menekan ancaman)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mendorong sekolah untuk penyesuaian materi pelajaran dengan mengadopsi kemajuan teknologi sehingga anak didik dapat mengikuti era globalisasi secara terarah. b. Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya penuntasan wajib belajar. c. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dasar.

3.1.9. Perlindungan Sosial.

Faktor Internal :

- Analisis yang dipergunakan dalam mengkaji kondisi perlindungan sosial adalah perkembangan jumlah penyandang sosial dan jumlah sarana / prasarana panti asuhan yang tersebar di Kabupaten Gianyar.
- Kabupaten Gianyar telah berupaya menangani masalah sosial ditunjukkan dari menurunnya jumlah penyandang sosial (penderita cacat, pengemis, orang gila dan WTS).
- Dengan makin meningkatnya usia harapan hidup, kedepan diperkirakan jumlah penduduk jompo akan semakin bertambah. Dimasa yang akan datang perhatian terhadap penduduk kelompok jompo harus ditingkatkan dengan cara mendirikan panti asuhan pada beberapa lokasi dan ada perhatian lebih dari pemerintah dibandingkan dengan swasta.

Faktor Eksternal :

- Peluang yang dimiliki Kabupaten Gianyar dalam menangani masalah sosial adalah adanya perhatian dari Pemerintah dan swasta (lembaga sosial), sedangkan ancaman yang dihadapi adalah krisis ekonomi dan pengangguran.

Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal di atas, menunjukkan terdapat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi Kabupaten Gianyar selama ini dalam usahanya memberikan perlindungan sosial, seperti ditunjukkan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9. Pemetaan SWOT Fungsi Perlindungan Sosial

Faktor dari Dalam	<p>Strength (Kekuatan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kuatnya budaya <i>menyama braya</i> dan <i>paras paras</i> 2. Besarnya perhatian keluarga pada lansia 3. Adanya lembaga masyarakat yang berkecimpung pada kegiatan sosial : 2 panti sosial anak-anak 4. Memadainya akses kepada daerah-daerah yang berpotensi pada kerawanan sosial 	<p>Weakness (Kelemahan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besarnya angka kemiskinan 35,783 orang yang tersebar di Gianyar, Blahbatuh, Tegallalang dan Payangan, angka tsb terus meningkat rata-rata 8,5%/ tahun (2002 - 2006) 2. Besarnya jumlah anak terlantar 881 org, jompo terlantar 691 org dan penyandang cacat 1.979 org 3. Masih terbatasnya SDM masyarakat sehingga riskan terhadap krisis 4. Masih melekatnya mental masyarakat yang memilih-milih pekerjaan (tidak pekerja keras)
Faktor dari Luar	<p>Opportunity (Peluang)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besarnya perhatian dunia luar terhadap kondisi sosial di Gianyar 2. Adanya lembaga-lembaga sosial yang beroperasi di Gianyar 	<p>Threat (Ancaman)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan situasi perekonomian membuat berfluktuasinya angka kemiskinan 2. Besarnya angka urbanisasi tanpa bekal SDM yang kuat sehingga tak mampu bersaing dalam memperoleh nafkah 3. Impor gepeng dari luar daerah Gianyar (gepeng Th 2006 : 223 org) 4. Besarnya potensi korban Narkoba (Th 2006 : 254 org) dan sek bebas

Keterangan : Data kuantitatif dikutip dari Profil Daerah Gianyar 2006

	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
Opportunity (Peluang)	<p>SO (<i>mengoptimalkan kekuatan dan peluang</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> Mempertahankan dan meningkatkan budaya <i>menyama braya</i> Mendorong peningkatan fungsi lembaga-lembaga sosial Memelihara akses ke daerah-daerah rawan sosial 	<p>WO (<i>memperbaiki kelemahan untuk menangkap peluang</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengentasan kemiskinan secara bertahap Peningkatan SDM masyarakat rawan kemiskinan Mendorong terbentuknya mental masyarakat yang mau bekerja keras tak memilih-milih pekerjaan
Threat (Ancaman)	<p>ST (<i>mengoptimalkan kekuatan untuk menekan ancaman</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendorong peningkatan fungsi lembaga-lembaga sosial 	<p>WT (<i>memperbaiki kelemahan sekaligus menekan ancaman</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengendalian urbanisasi ke wilayah Gianyar Pembinaan Masyarakat untuk anti Narkoba

3.2. ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan uraian kondisi umum daerah, memperhatikan tantangan serta modal dasar yang dimiliki, maka beberapa isu-isu strategis yang dihadapi Kabupaten Gianyar sampai 20 tahun kedepan antara lain :

- Jumlah penduduk miskin meningkat rata-rata 0,27% (dari tahun 2000-2006), meskipun upaya menekan angka kemiskinan terus diupayakan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Fenomena ini terjadi sebagai dampak krisis multidimensi yang berimplikasi pada menurunnya daya beli, rentan terhadap kelaparan dan gizi buruk, meningkatnya angka pengangguran serta melemahnya ketahanan sosial masyarakat.
- Derajat kesehatan penduduk ditinjau dari beberapa indikator perlu mendapat perhatian antara lain : angka kematian bayi yang meningkat rata-rata 0,08 %, angka kematian ibu melahirkan, angka harapan hidup serta meningkatnya penderita HIV/AIDS dan demam berdarah. Menurunnya derajat kesehatan masyarakat mempunyai korelasi positif terhadap menurunnya kualitas SDM, sehingga isu-isu kesehatan perlu mendapat perhatian lebih serius. Dibeberapa tempat kualitas prasarana dan sarana kesehatan masih perlu ditingkatkan termasuk kualitas pelayanannya. Perbaikan ini akan dapat mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar penduduk sama seperti pendidikan.
- Untuk mewujudkan masyarakat Gianyar yang memiliki daya saing dan berkualitas maka pendidikan menjadi salah satu komponen penting yang perlu mendapat perhatian. Salah satu indikator yang dipergunakan untuk mengukurnya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Meskipun APM menunjukkan peningkatan namun masih terdapat anak usia sekolah dasar yang tidak mengikuti pendidikan dan terjadinya anak putus sekolah. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa upaya pengembangan pendidikan dasar untuk semua lapisan masyarakat sebagaimana program MDGs, masih memiliki tantangan yang berat. Sejalan dengan usaha meningkatkan APK dan APM diperlukan pula peningkatan kualitas prasarana dan sarana, kualitas SDM pendidik serta perbaikan penghasilan tenaga pendidik secara bertahap.

4. Masih terjadi ketimpangan dan ketidakadilan gender (KKG) pada berbagai aspek kehidupan baik dalam lingkup domestik ataupun publik. Masalah mewujudkan KKG lebih banyak berada pada tatanan pelaksanaan, karena dari segi aturan dan atau komitmen sudah tersedia baik pada tingkat nasional ataupun internasional. Kondisi di Bali pada umumnya termasuk di Kabupaten Gianyar, adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, di samping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan lainnya adalah masih terdapatnya kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat. Dalam konteks sosial, kesenjangan ini mencerminkan masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas. Kendala utama dalam pembangunan pemberdayaan perempuan adalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan.
5. Meningkatnya kasus NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Aditif) yang sebagian besar menimpa generasi muda. Jika kondisi ini tidak diantisipasi akan merusak mental dan masa depan generasi muda Gianyar. Untuk itu diperlukan berbagai upaya meningkatkan peran generasi muda dalam berbagai kegiatan dan organisasi kepemudaan yang mampu membentuk karakter dan jatidiri generasi muda yang berbudaya.
6. Perekonomian masih belum sepenuhnya dapat melepaskan diri dari pengaruh gejala perekonomian nasional, sehingga cita-cita mewujudkan perekonomian yang tangguh dan berbasis masyarakat perlu terus ditingkatkan. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi sangat penting dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketergantungan yang tinggi terhadap pariwisata berimplikasi pada rentannya perekonomian Kabupaten Gianyar terhadap gejala dibidang sosial (keamanan, ketertiban atau kesehatan). Menjaga stabilitas sosial menjadi sangat penting karena selama ini sudah terbukti terganggunya stabilitas sosial berpengaruh signifikan terhadap menurunnya aktivitas pariwisata.
7. Munculnya berbagai masalah sosial kemasyarakatan yang mengarah pada kerawanan sosial seperti kasus adat cenderung mengalami peningkatan yang berujung pada terjadinya konflik horizontal dan tindakan melawan hukum. Peranan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemerintah dituntut mampu menciptakan kondisi yang kondusif dalam suasana kebersamaan sehingga masalah sosial kemasyarakatan dapat dihindari.
8. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian yang berlangsung secara terus menerus berpotensi tercabutnya salah satu akar budaya lokal. Padahal budaya merupakan salah satu faktor dominan yang menyebabkan Gianyar sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang terkenal. Terjadinya persaingan penggunaan sumber-sumber air irigasi antar subak serta antar Daerah Irigasi (DI) yang berpotensi menimbulkan konflik sosial yang bermuara pada penurunan hasil produksi pertanian dan memicu percepatan terjadinya alih fungsi lahan pertanian.

9. Terjadi kesenjangan ekonomi baik antar wilayah (wilayah Gianyar Timur dengan wilayah Gianyar Barat) ataupun antar sektor kegiatan ekonomi (sektor primer dan sekunder disatu sisi dengan sektor tersier) disisi yang lain. Kesenjangan tersebut dapat berimplikasi pada makin kurang meratanya distribusi pendapatan antar lapisan masyarakat. Kegiatan pembangunan harus menyentuh semua lapisan/golongan masyarakat karena salah satu aspek pembangunan harus memenuhi unsur keadilan disamping peningkatan pendapatan.
10. Penyelenggaraan pemerintahan sudah berjalan cukup baik namun masih perlu ditingkatkan dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip *good Governance*. Pemerintahan yang *good governance* adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menjamin kepastian hukum, tertib dalam administrasi pemerintahan, memperhatikan kepentingan umum, terbuka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat proporsional dalam mengambil kebijaksanaan, dilakukan oleh aparatur yang profesional, bertanggung jawab, dilaksanakan dengan berpegang pada efisiensi dan efektivitas program.
11. Pelaksanaan pembangunan kurang diikuti oleh pengelolaan lingkungan yang baik sehingga kualitas lingkungan semakin menurun (degradasi lingkungan). Eksploitasi terhadap sumberdaya lingkungan yang tidak memperhatikan kaedah penataan ruang dan pengelolaan lingkungan berimplikasi terhadap menurunnya daya dukung wilayah. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hendaknya berlangsung secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan kata lain pembangunan yang dilaksanakan adalah memenuhi hidup manusia saat ini dengan tidak mengurangi hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

3.1. VISI

Berdasarkan kondisi Kabupaten Gianyar saat ini, tantangan yang dihadapi 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh Kabupaten Gianyar dan amanat yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka Visi pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2005-2025 adalah :

"Terwujudnya masyarakat Gianyar yang berkualitas dan berbudaya yang berlandaskan Tri Hita Karana"

Berkualitas, artinya pembangunan sumberdaya manusia (SDM) secara menyeluruh dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar minimal seluruh anggota masyarakat secara layak yang mencakup komponen-komponen IPM (Indeks Pembangunan Manusia yaitu pendapatan, kesehatan, dan pendidikan). ***Berbudaya***, artinya masyarakat yang mempunyai harkat dan martabat sebagai makhluk individu dan sosial sesuai tata nilai dan tradisi yang berlaku. ***Tri Hita Karana***, artinya semua aspek kehidupan berlandaskan harmoni dan kebersamaan (hubungan Manusia dengan Tuhan, Manusia dengan Manusia dan Manusia dengan Lingkungan).

3.2. MISI

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Gianyar ditempuh melalui 9 (sembilan) Misi pembangunan sebagai berikut :

1. **Meningkatkan *Srada- Bhakti* kepada Ida Hyang Widhi Waca/Tuhan Yang Maha Esa**, yaitu upaya mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Agama Hindu berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana* .
2. **Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang efisien, produktif dan merata**, yaitu menjamin iklim investasi yang kondusif, menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi dan memberikan kesempatan yang luas kepada semua pelaku ekonomi untuk berpartisipasi dengan mengutamakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) guna tercapainya kesejahteraan masyarakat, tanpa meninggalkan potensi perekonomian lainnya sebagai aktivitas pendukung.
3. **Peningkatan ketahanan pangan melalui pengembangan pertanian berwawasan agribisnis**, yaitu pengembangan pertanian sebagai sektor unggulan dalam upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian dan pemenuhan kebutuhan pangan secara mandiri dan berkesinambungan. Pengembangan agribisnis merupakan hal penting karena nilai tambah dari semua rangkaian produksi pertanian tercipta pada subsistem budidaya, pemasaran dan pengolahan atau agroindustri pedesaan dapat menjadi fase transisi menuju

transformasi struktural pertanian keproduksi pertanian sesungguhnya. Dalam pengembangan komoditi wilayah harus didasarkan atas keunggulan komparatif lokasi, dengan demikian produk-produk pertanian yang mempunyai karakteristik khusus harus mempunyai orientasi pengembangan yang lebih baik dan manajemen yang tepat untuk mencapai efisiensi yang maksimal.

4. **Mengembangkan pariwisata budaya yang berkelanjutan,** Pariwisata memegang peranan yang sangat penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kepariwisataan berkelanjutan harus menganut tiga pilar keberlanjutan sebagaimana yang dinyatakan dalam KTT Rio (1992) serta hasil studi BSDP (1992) yakni : keberlanjutan sosial budaya, keberlanjutan lingkungan ekologis, dan keberlanjutan ekonomi.
5. **Meningkatkan pembangunan masyarakat yang berkualitas,** adalah upaya mendorong pembangunan kualitas sumberdaya manusia (SDM) secara menyeluruh dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya baik jasmani maupun rohani melalui peningkatan mutu modal manusia (*human capital*) serta derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu menghadapi persaingan bebas dan arus globalisasi. Untuk itu kebutuhan dasar minimal seluruh anggota masyarakat harus terpenuhi secara layak yang mencakup komponen-komponen IPM (Indeks Pembangunan Manusia yaitu pendapatan, kesehatan, dan pendidikan).
6. **Melestarikan nilai budaya yang dijiwai oleh Agama Hindu,** adalah upaya memantapkan jatidiri dan mengembangkan modal sosial melalui pelestarian nilai-nilai budaya Bali, lembaga-lembaga tradisional dan lembaga adat dalam kehidupan masyarakat yang dijiwai oleh Agama Hindu.
7. **Mewujudkan stabilitas daerah dan tata pemerintahan yang baik,** melalui penegakkan hukum yang menjunjung tinggi HAM dalam suasana politik dan kamtibmas yang kondusif, serta peningkatan kinerja pelayanan publik yang didukung perangkat daerah yang efektif dan efisien, aparatur yang profesional, serta infrastruktur yang memadai.
8. **Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup secara optimal dan berkelanjutan,** artinya pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup harus memperhatikan potensi dan daya dukung kawasan serta mengutamakan kepentingan masyarakat luas diatas kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
9. **Mengembangkan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang memadai, merata dan berkualitas,** adalah upaya untuk mendorong pembangunan perumahan dan fasilitas umum sesuai dengan pola ruang serta dukungan infrastruktur wilayah yang memadai agar mampu mendukung dan mewadahi aktivitas seluruh masyarakat secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN

5.1. SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Misi Pembangunan Daerah), perlu diikuti dengan kebijakan sebagai arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Sebagai ukuran tercapinya masyarakat Kabupaten Giayar yang sejahtera dan berbudaya berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana*, maka pembangunan dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

A. Misi 1 : Meningkatkan *Srada- Bhakti* kepada Ida Hyang Widhi Waca/Tuhan Yang Maha Esa.

Terwujudnya peningkatan *srada-bhakti* kepada Ida Hyang Widhi Waca/Tuhan Yang Maha Esa, ditandai dengan :

1. Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan dan pemahaman ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat sehingga kualitas masyarakat dari sisi rohani semakin baik;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama
3. Terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan intern dan antarumat beragama yang toleran dan saling menghormati dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan damai.

B. Misi 2 :Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang efisien, produktif dan merata

Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang efisien, produktif dan merata, ditandai dengan:

1. Terbangunnya struktur perekonomian daerah yang kokoh dimana UMKM dan Koperasi menjadi basis aktivitas perekonomian yang mendukung aktivitas perekonomian lainnya.
2. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.
3. Tercapainya penguatan ekonomi lokal melalui peningkatan kesempatan berusaha, optimalisasi potensi lokal, pemerataan pembangunan serta pengembangan keadilan kesempatan berusaha dalam iklim berusaha yang kondusif.
4. Tercapainya Pengembangan kegiatan pertanian dalam arti luas pada peningkatan nilai tambah (*value added*) melalui usaha peningkatan produktifitas, efisiensi, serta usaha intensifikasi.
5. Tercapainya pembangunan ketenagakerjaan pada peningkatan kualitas tenaga kerja dan kemandirian tenaga kerja yang mampu bersaing di era global.

6. Tercapainya pengembangan koperasi dan UKM dalam mewujudkan sistem ekonomi yang efisien, produktif dan berdaya saing, mampu menembus pasar global dengan mengembangkan kerjasama strategis dan sinergis antar pelaku usaha.
7. Tercapainya peningkatan investasi melalui mengembangkan iklim investasi yang kondusif, pemenuhan sarana prasarana ekonomi dan menjamin kepastian berusaha.
8. Tercapainya pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dengan mengoptimalkan kegiatan ekonomi lokal (*local economic*) dan peningkatan sistim informasi dan komunikasi yang handal dalam menghadapi perdagangan bebas.
9. Tercapainya pengembangan infrastruktur ekonomi daerah yang memenuhi kebutuhan sarana prasarana ekonomi dalam kerangka peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, perluasan jaringan pasar yang berbasis pada pemanfaatan *e-commerce* dan mendukung pengembangan perdagangan dan jasa.

C. Misi 3 : Peningkatan ketahanan pangan melalui pengembangan pertanian berwawasan agribisnis

Terwujudnya ketahanan pangan melalui pengembangan pertanian berwawasan agribisnis, ditandai dengan :

1. Meningkatnya produksi pertanian yang diikuti peningkatan kualitas hasil produksi.
2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani di Kabupaten Gianyar.
3. Tumbuhkembangnya kelembagaan usaha ekonomi petani (*on-farm* dan *off-farm*) yang efektif, efisien, dan berdaya saing.
4. Meningkatnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran usaha pertanian pengembangan pertanian.
5. Terbentuknya sistem agribisnis dalam pengembangan pertanian yang meliputi unsur-unsur kegiatan : (1) pra-panen, (2) panen, (3) pasca-panen dan (4) pemasaran yang melibatkan peran aktif masyarakat.

D. Misi 4 : Mengembangkan pariwisata budaya yang berkelanjutan

Terwujudnya pariwisata budaya yang berkelanjutan, ditandai dengan :

1. Meningkatnya jumlah wisatawan yang menginap di Kabupaten Gianyar
2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke obyek dan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Gianyar.
3. Meningkatnya peran masyarakat dalam pengembangan kegiatan kepariwisataan sesuai potensi budaya masing-masing daerah.

E. Misi 5 : Meningkatkan pembangunan masyarakat yang berkualitas (*Human Capital*).

Terwujudnya peningkatan pembangunan masyarakat yang berkualitas, ditandai dengan:

1. Meningkatnya taraf pendidikan penduduk tercermin dari terlaksananya penuntasan program wajib belajar 9 tahun, Meningkatnya secara signifikan partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah yang ditunjang dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan

- pada setiap jenjang sekolah.
2. Meningkatnya partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah
 3. Meningkatnya kualitas pendidikan
 4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas
 5. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
 6. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan, dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak;
 7. Meningkatnya partisipasi pemuda diberbagai bidang pembangunan
 8. Meningkatnya perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung
 9. Penekanan pertumbuhan penduduk miskin

F. Misi 6 : Melestarikan nilai budaya yang dijiwai oleh Agama Hindu.

Terwujudnya kelestarian nilai budaya yang dijiwai oleh Agama Hindu, ditandai dengan:

1. Semakin mantapnya eksistensi (ajeg-nya) nilai-nilai inti (*core*) budaya Bali sebagai indikator jatidiri masyarakat Bali yang mencakup nilai religus/filosofis, nilai estetis, dan nilai sosial (solidaritas dan gotong royong).
2. Meningkatnya pelestarian warisan budaya (*cultural heritage conservation*) baik yang bersifat nyata kebendaan (*tangible*) maupun yang bersifat bukan kebendaan (*intangible*).
3. Ajegnya lembaga-lembaga tradisional yang merupakan simpul-simpul pokok dalam pengembangan dan pelestarian budaya yang dilandasi konsepsi *Tri Hita Karana* dan dijiwai oleh Agama Hindu seperti : desa adat/pakraman, banjar, subak, dadia, sekehe dan sebagainya.
4. Semakin berkembangnya penerapan nilai-nilai budaya, kearifan lokal maupun penerapan nilai nilai baru yang positif dalam rangka memantapkan budaya daerah.

G. Misi 7 : Mewujudkan stabilitas daerah dan tata pemerintahan yang baik.

Terwujudnya stabilitas daerah dan tata pemerintahan yang baik, ditandai dengan :

1. Peningkatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kabupaten Gianyar
2. Menurunnya pelanggaran hukum dan ham
3. Menurunnya konflik sosial yang berimplikasi terhadap terjadinya konflik horisontal
4. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di birokrasi
5. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;

H. Misi 8 : Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup secara optimal dan berkelanjutan.

Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup secara optimal dan berkelanjutan, ditandai dengan :

1. Tercapainya keseimbangan lingkungan melalui pengendalian pemanfaatan lahan terbangun yang secara keseluruhan tidak melebihi 40% dari luas wilayah.
2. Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan lahan dengan membatasi pembangunan perumahan maupun aktivitas lainnya yang membutuhkan lahan sangat luas.

3. Pengendalian konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan terbangun yang tidak mendukung fungsi lindung serta pelestarian kawasan lindung.
4. Tercapainya keseimbangan lingkungan biotik dan abiotik melalui pengendalian pencemaran dan polusi lingkungan yang mengarah pada degradasi kualitas lingkungan dan sumber daya alam.
5. Pemanfaatan sumberdaya alam yang berorientasi pada optimalisasi dan efisiensi pengelolaan, berkelanjutan serta ramah lingkungan.
6. Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum dalam menindak pelanggaran-pelanggaran terhadap pemanfaatan serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.
7. Terlaksananya mengembangkan kemampuan dan penerapan sistem deteksi dini serta sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat

I. Misi 9 : Mewujudkan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang memadai, merata dan berkualitas.

Terwujudnya pembangunan wilayah dan infrastruktur yang memadai, merata dan berkualitas, ditandai dengan :

1. Tercapainya kesimbangan pembangunan antar wilayah (fungsi wilayah) dan antar sektor kegiatan ekonomi.
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten dan konsekuen mengacu pada perencanaan yang ditetapkan dan atau kaedah-kaedah standar pemanfaatan ruang (*zoning regulation*).
3. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) berdasarkan daya dukung kawasan (*carrying capacity*).
4. Terwujudnya akses yang memadai melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan infrastruktur secara merata dan proporsional yang menjangkau seluruh wilayah.

5.2 ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005–2025

5.2.1 Meningkatkan *Srada- Bhakti* kepada Ida Hyang Widhi Waca/Tuhan Yang Maha Esa

Peningkatan *Srada-Bhakti* kepada Ida Hyang Widhi Waca/Tuhan Yang Maha Esa diarahkan dengan memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan, dilakukan dengan peningkatan kualitas dan pemahaman beragama serta kehidupan beragama. Di samping itu, pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.

5.2.2 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang efisien, produktif dan merata

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang efisien, produktif dan merata dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian domestik serta berorientasi dan berdaya saing global. Upaya tersebut dilakukan dengan peningkatan produktivitas melalui inovasi, penguasaan, penelitian, pengembangan dan penerapan iptek menuju ekonomi berbasis pengetahuan secara berkelanjutan;
2. Perekonomian dikembangkan untuk menjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan.
3. Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dinamika kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perizinan yang efisien, efektif, dan non-diskriminatif; menjaga, mengembangkan, dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat serta melindungi konsumen; mendorong peningkatan daya saing; meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM)
4. Peranan pemerintah daerah didorong untuk memberikan pelayanan publik yang efektif guna terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing.
5. Struktur perekonomian diperkuat dengan mendorong perkembangan kepariwisataan sebagai motor penggerak yang didukung oleh sektor industri, kegiatan pertanian dalam arti luas, yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.
6. Investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik.
7. Sektor pertanian dalam arti luas didorong untuk meningkatkan Efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah terkait dengan upaya penguatan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
8. Pembangunan industri kecil dan menengah diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing, baik di pasar lokal maupun internasional.
9. Perdagangan diarahkan untuk dapat meningkatkan akses pasar ekspor guna dapat mendorong tumbuh berkembangnya industri kerajinan yang berdaya saing.
10. Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk memperkuat sistem distribusi nasional yang efisien dan efektif untuk mewujudkan (a) berkembangnya lembaga perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat, (b) terintegrasinya aktivitas perekonomian nasional dan terbangunnya kesadaran penggunaan produksi dalam negeri, (c) meningkatnya perdagangan antar wilayah/daerah, dan (d) terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dengan harga yang terjangkau.
11. Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang makin berbasis iptek dan berdaya saing dengan produk impor, khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian domestik. Untuk itu, pengembangan

UKM dilakukan melalui peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.

12. Sektor keuangan diarahkan untuk peningkatan kontribusi lembaga jasa keuangan bank dan non-bank dalam pendanaan pembangunan terutama peningkatan akses pendanaan bagi keluarga miskin, baik di perdesaan maupun di perkotaan
13. Koperasi didorong perkembangannya guna mendukung perkembangan berbagai sektor kegiatan ekonomi sehingga menjadi gerakan ekonomi yang berperan nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Sementara itu, pemberdayaan usaha mikro menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha.
14. Lembaga Keuangan Mikro (LPD) yang diarahkan dan difokuskan pada upaya untuk membenahi dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan Lembaga Keuangan Mikro (LPD)
15. Kebijakan tenaga kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak-banyaknya lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja informal. Pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian industrial yang memuaskan semua pihak merupakan ciri-ciri pasar kerja yang diinginkan. Selain itu, pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis untuk efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dari investasi sumber daya manusia.
16. Pengembangan iptek untuk ekonomi diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemanfaatan iptek dalam rangka mendukung daya saing secara global. Hal itu dilakukan melalui peningkatan, penguasaan, dan penerapan iptek secara luas dalam sistem produksi barang/jasa
17. Perbaikan pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan. Kepentingan utama pembiayaan pemerintah daerah adalah penciptaan pembiayaan pembangunan yang dapat menjamin kemampuan peningkatan pelayanan publik, baik di dalam penyediaan pelayanan dasar, prasarana dan sarana fisik serta ekonomi, maupun mendukung peningkatan daya saing ekonomi.

5.2.3 Peningkatan ketahanan pangan melalui pengembangan pertanian berwawasan agribisnis

Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Gianyar yang diperkirakan pada tahun 2025 akan bertambah menjadi dua kali lipat dari jumlah saat ini, telah memunculkan kerisauan akan terjadinya keadaan "rawan pangan" di masa yang akan datang. Meskipun dari hasil analisis proyeksi pertanian Kabupaten Gianyar masih surplus dalam hal produksi pangan. Dengan semakin meningkatnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat terjadi pula peningkatan konsumsi perkapita untuk berbagai jenis pangan, akibatnya dalam waktu 20 tahun yang akan datang Gianyar membutuhkan tambahan ketersediaan pangan yang lebih dari 2 kali lipat jumlah kebutuhan saat ini. Untuk itu beberapa kebijakan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan antara lain :

1. Pengembangan pertanian berorientasi pada kekuatan pasar (*market driven*), melalui pemberdayaan masyarakat yang tidak saja diarahkan pada upaya pengembangan usaha budidaya (*on-farm*) tetapi juga meliputi pengembangan agribisnis hulu (penyediaan sarana pertanian) dan agribisnis hilir (*processing* dan pemasaran) dan jasa-jasa pendukungnya.
2. Memberikan kemudahan melalui penyediaan prasarana dan sarana yang dapat mendukung pengembangan agribisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan menyeluruh, mulai dari subsistem budidaya (*on-farm*), subsistem agribisnis hulu, hilir, dan jasa penunjang.
3. Mensinergikan potensi sumberdaya manusia sebagai tenaga kerja dan komoditi yang akan dikembangkan yang berorientasi kebutuhan pasar mencakup agrobisnis, agroprocessing dan agroindustri melalui sistem keterkaitan desa dan kota (*urban-rural linkage*).

5.2.4 Mengembangkan pariwisata budaya yang berkelanjutan

Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Arah kebijakan pengembangan pariwisata ke depan adalah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dengan fokus pada upaya:

1. Peningkatan promosi pariwisata yang terintegrasi dengan kabupaten/kota lainnya di Propinsi Bali sebagai bagian dari sistem kepariwisataan Bali;
2. Pengembangan jenis dan peningkatan kualitas obyek daya tarik wisata, terutama pengembangan atraksi wisata yang potensinya sangat besar mengingat Kabupaten Gianyar memiliki sendi-sendi yang kokoh dalam aktivitas seni dan budaya.
3. Pelestarian adat, tradisi dan budaya sebagai potensi dasar pengembangan pariwisata.

5.2.5 Meningkatkan pembangunan masyarakat yang berkualitas (*Human Capital*)

Meningkatkan pembangunan masyarakat yang berkualitas dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pembangunan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri sehingga mampu bersaing dalam era globalisasi. Dalam kaitan itu, pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) serta terkendalinya pertumbuhan penduduk.
2. Pembangunan pendidikan dan kesehatan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga penting perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam era global tanpa kehilangan akar budayanya. Peningkatan pembangunan pendidikan tercermin dari peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Pelayanan pendidikan mencakup semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Oleh karena itu, perlu disediakan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan. Penyediaan pelayanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi pada masa depan termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pendalaman penguasaan teknologi.
4. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut (manula), dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan yang disertai oleh peningkatan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan. Upaya tersebut dilakukan dengan memerhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan iptek, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerja sama lintas sektor. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor yang meliputi produksi pangan, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan tingkat rumah tangga dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya dalam rangka mencapai status gizi yang baik.
5. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Sistem administrasi kependudukan penting pula dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial.

6. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan, dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak di tingkat nasional dan daerah, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.
7. Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan karakter kebangsaan (nation building) dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik, serta memiliki wawasan kebangsaan dan beretika bangsa Indonesia. Di samping itu, pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.
8. **Kesejahteraan Sosial**

Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin.

Pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial yang didukung oleh peraturan-peraturan perundangan, pendanaan, serta sistem nomor induk kependudukan (NIK). Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat.

Sistem perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak rakyat akan pelayanan sosial dasar.
9. **Kemiskinan**

Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Sejalan dengan proses demokratisasi, pemenuhan hak dasar rakyat diarahkan pada peningkatan pemahaman tentang pentingnya mewujudkan hak-hak dasar rakyat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada peningkatan mutu penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.

5.2.6 Melestarikan nilai budaya yang dijiwai oleh Agama Hindu

Melestarikan nilai budaya yang dijiwai agama hindu sebagai upaya untuk pemantapan jati diri, mewujudkan karakter bangsa dan sistem sosial yang berakar, unik, modern, dan unggul. Jati diri tersebut merupakan kombinasi antara nilai nilai budaya yang religius, kebersamaan dan persatuan, serta nilai modern yang universal yang mencakup etos kerja dan prinsip tata pemerintahan yang baik. Pembangunan jati diri bangsa tersebut dilakukan melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai budaya dan menerapkan nilai modern yang membangun. Bentuk-bentuk pengungkapan kreativitas, antara lain melalui kesenian, tetap didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, spiritual, dan emosional.

5.2.7 Mewujudkan stabilitas daerah dan tata pemerintahan yang baik

1. Keamanan dan Ketertiban

Adanya gangguan keamanan dalam berbagai bentuk kejahatan dan potensi konflik horisontal akan meresahkan dan berakibat pada pudarnya rasa aman masyarakat. Terjaminnya stabilitas daerah yang tertib, aman dan tentram merupakan syarat penting bagi terlaksananya pembangunan di berbagai bidang.

Stabilitas daerah yang tertib, aman dan tentram diwujudkan melalui pembangunan keamanan sosial yang diselenggarakan dengan pendekatan sosial budaya. Peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan masyarakat akan dibangun melalui mekanisme pemolisian masyarakat. Pemolisian masyarakat berarti masyarakat turut bertanggung jawab dan berperan aktif dalam penciptaan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kerja sama dan kemitraan dengan polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

2. Hukum dan HAM

Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN). Pembangunan hukum dilaksanakan melalui kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.

Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi terus ditingkatkan dengan lebih memberikan akses terhadap segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan akses kepada masyarakat terhadap pelibatan dalam berbagai proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Akibatnya, akan terbentuk perilaku masyarakat yang mempunyai rasa memiliki dan taat hukum.

3. Politik

Penataan peran negara dan masyarakat diarahkan pada penataan fungsi-fungsi yang positif dari pranata-pranata kemasyarakatan, lembaga adat, dan partai politik untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial yang dapat merusak serta memberdayakan berbagai potensi positif masyarakat bagi pembangunan.

Penataan proses politik yang dititikberatkan pada pengalokasian/ representasi kekuasaan diwujudkan dengan (a) meningkatkan secara terus menerus kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan publik serta (b) mewujudkan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa serta keleluasaan berserikat, berkumpul, dan berpendapat setiap warganegara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing.

Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai demokratis diupayakan melalui (a) penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media serta (b) upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa.

4. Reformasi birokrasi

Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.

5. Disiplin aparatur

Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur negara dicapai dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat, lini pemerintahan, dan semua kegiatan; pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat; serta peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip ketatapemerintahan yang baik.

5.1.8 Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup secara optimal dan berkelanjutan

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup secara optimal harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan.

1. Menjaga dan Melestarikan Sumber Daya Air.

Pengelolaan sumber daya air diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah; mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan demand management yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan supply management yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air; serta memperkuat kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

2. Mitigasi Bencana.

Kabupaten Gianyar sebagai bagian geografis Indonesia yang berada di wilayah pertemuan tiga lempeng tektonik. Kebijakan pembangunan berwawasan

lingkungan memberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan dan penerapan sistem deteksi dini serta sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat. Untuk itu, perlu ditingkatkan identifikasi dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana agar dapat diantisipasi secara dini. Hal itu dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan harta benda karena adanya perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam.

3. Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik perlu penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya peningkatan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

4. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Mencintai Lingkungan Hidup.

Kebijakan diarahkan terutama bagi generasi muda sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan peduli terhadap isu sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dengan demikian, pada masa yang akan datang mereka mampu berperan sebagai penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

5.2.9 Mewujudkan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang memadai, merata dan berkualitas

Pemerataan Pembangunan wilayah dapat diwujudkan melalui pemanfaatan ruang yang sesuai dengan daya dukung dan kesesuaian lahan berdasarkan perencanaan tata ruang yang didukung dengan kelengkapan infrastrukturnya.

1. Tata Ruang

Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah disusun secara hierarki. Dalam rangka mengoptimalkan penataan ruang perlu ditingkatkan (a) kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang penataan ruang, (b) kualitas rencana tata ruang, dan (c) efektivitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang

2. Peran pemerintah akan lebih difokuskan pada perumusan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana, sementara peran swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana akan makin ditingkatkan terutama untuk proyek-proyek yang bersifat komersial. Kerja sama dengan swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana diarahkan untuk meningkatkan teledensitas pelayanan telematika masyarakat

3. Sumberdaya Air

Pembangunan prasarana sumber daya air diarahkan untuk mewujudkan fungsi air sebagai sumber daya sosial (social goods) dan sumber daya ekonomi (economic goods) yang seimbang melalui pengelolaan yang terpadu, efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan sehingga dapat menjamin kebutuhan pokok hidup dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan diwujudkan melalui pendekatan pengelolaan kebutuhan (demand management) yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan, pengonsumsi air, dan pendekatan pengelolaan pasokan (supply management) yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air. Pengelolaan prasarana sumber daya air diarahkan untuk mewujudkan peningkatan keandalan layanan melalui kemitraan dengan dunia usaha tanpa membebani masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, dan memerhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengembangan dan penerapan sistem pemanfaatan terpadu (conjunctive use) antara air permukaan dan air tanah akan digalakkan terutama untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah. Pengendalian daya rusak air mengutamakan pendekatan nonkonstruksi melalui konservasi sumber daya air dan keterpaduan pengelolaan daerah aliran sungai. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat bencana, tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pascabencana.

4. Transportasi

Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah; mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan; meningkatkan iklim kompetisi secara sehat agar dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan alternatif bagi pengguna jasa dengan tetap mempertahankan keberpihakan pemerintah sebagai regulator terhadap pelayanan umum yang terjangkau kepada masyarakat; menyediakan pelayanan angkutan umum massal di daerah perkotaan yang bersinergi dengan kebijakan tata guna lahan; serta meningkatkan budaya berlalu lintas yang tertib dan disiplin. Mempercepat dan memperlancar pergerakan penumpang dan barang melalui perbaikan manajemen transportasi antarmoda;

5. Perumahan

Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada (1) penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, dan efisien; (2) penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya mampu menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan; dan (3) pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang memerhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

6. Air Minum dan Sanitasi

- a. Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan melalui pendekatan tanggap kebutuhan (demand responsive approach) dan pendekatan terpadu dengan sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya air, serta kesehatan.
 - b. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi diarahkan pada (1) peningkatan kualitas pengelolaan aset (asset management) dalam penyediaan air minum dan sanitasi; (2) pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat; (3) penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi yang kredibel dan profesional; dan (4) penyediaan sumber-sumber pembiayaan murah dalam pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin.
7. Pembangunan pos dan telematika diarahkan untuk mendorong terciptanya masyarakat berbasis informasi (knowledge-based society) melalui penciptaan landasan kompetisi jangka panjang penyelenggaraan pos dan telematika dalam lingkungan multioperator; pengantisipasi implikasi dari konvergensi telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran; penerapan hak kekayaan intelektual; pengoptimalan pembangunan dan pemanfaatan prasarana pos dan telematika dan prasarana nontelekomunikasi dalam penyelenggaraan telematika; peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika serta pemanfaatan dan pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

5.3. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS

Untuk dapat mewujudkan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Gianyar 2005-2025, diperlukan pentahapan pembangunan dan skala prioritas. Pentahapan pembangunan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas tersebut berisikan penekanan upaya pembangunan dalam mencapai arah pembangunan yang telah ditetapkan, tanpa mengabaikan permasalahan dan upaya pembangunan lainnya. Oleh karena itu, skala prioritas pada masing-masing tahapan pembangunan akan berbeda-beda, tetapi semuanya itu harus berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan arah pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan di atas. Pentahapan dan skala prioritas pembangunan tersebut nantinya akan dirinci lebih lanjut dalam strategi, kebijakan, dan program pembangunan jangka menengah pada masing-masing RPJM. Dengan demikian, akan dapat dilihat dengan jelas peta jalan (Road Map) pembangunan Kabupaten Gianyar dalam mencapai arah pembangunan jangka panjang daerah.

Periodisasi RPJM Daerah tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional dikarenakan pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005. Berkaitan dengan hal tersebut, RPJMD Kabupaten Gianyar 2006-2009 diposisikan sebagai masa transisi

Tahapan dan skala prioritas pembangunan jangka panjang Kabupaten Gianyar sebagai berikut:

1) RPJM ke-1 (2005 – 2008)

Perencanaan pembangunan 2005-2008 disusun pada era belum dilaksanakannya pemilihan Bupati secara langsung. Disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Gianyar setelah Rencana Strategis Kabupaten Gianyar 2000-2005 berakhir jangka waktu perencanaannya. Pada masa transisi ini perencanaan pembangunan diarahkan untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang yang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Gianyar yang berkualitas dan berbudaya berlandaskan Tri Hita Karana dengan penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia .

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas.

Peningkatan pendapatan masyarakat ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya UMKM yang tangguh dan meningkatnya pendapatan petani yang dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian disamping dengan meningkatnya peran sektor pariwisata dalam perekonomian daerah tanpa mengabaikan pelestarian budaya daerah, tata ruang dan lingkungan hidup yang didukung dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastuktur

Berkaitan dengan peningkatan iklim investasi ditandai dengan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat melalui penciptaan tata pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa serta terjaganya stabilitas daerah dengan mewujudkan ketentraman dan ketertiban

Sejalan dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat, perlindungan sosial masyarakat juga dilakukan yang ditandai dengan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat baik masyarakat miskin maupun masyarakat yang kurang beruntung/ penyandang masalah kesejahteraan sosial, terendalikannya pertumbuhan penduduk dan peningkatan keluarga kecil berkualitas

Mewujudkan masyarakat yang berbudaya ditandai dengan semakin berkembangnya apresiasi, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya dan warisan kekayaan budaya daerah yang ditunjang dengan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat.

Untuk mewujudkan stabilitas daerah dan tata pemerintahan yang baik, maka dalam masa RPJM ke 1 diprioritaskan pada peningkatan disiplin aparatur pemerintah. Disiplin aparatur dimulai dari disiplin individu melalui pelaksanaan tugas secara penuh tanggungjawab.

2) RPJM ke-2 (2008 – 2013)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah periode tahun 2008-2013 diarahkan untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang yang ditujukan untuk mewujudkan Gianyar yang Sejahtera dan Berbudaya, berlandaskan Tri Hita Karana dengan penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia

Gianyar yang sejahtera ditandai dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia terindikasi melalui Penurunan Penduduk Miskin, terkendalinya pertumbuhan penduduk, peningkatan partisipasi wanita dalam pembangunan, Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, serta Peningkatan kualitas kesehatan.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Kabupaten Gianyar ditandai dengan akselerasi segenap potensi ekonomi yang didorong dengan peningkatan investasi, Peningkatan angka kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan, Peningkatan produktifitas pertanian dan Peningkatan jumlah Industri kecil dan menengah dan nilai produksinya yang dapat menekan angka pengangguran. Kondisi ini dapat dicapai melalui penciptaan iklim investasi dan atmosfer kepariwisataan yang lebih kondusif

Gianyar yang berbudaya diwujudkan dengan upaya memantapkan jatidiri dan mengembangkan modal sosial melalui menerapkan nilai-nilai luhur budaya Bali sebagai bagian integral dari budaya bangsa dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etik dalam pembangunan, melestarikan lembaga-lembaga tradisional dan lembaga adat dalam kehidupan masyarakat yang dijiwai oleh Agama Hindu, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, dan melaksanakan interaksi antar budaya.

Dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat. Kondisi itu didukung dengan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

Untuk mewujudkan stabilitas daerah dan tata pemerintahan yang baik, maka dalam masa RPJM ke 2 diprioritaskan pada peningkatan produktifitas aparatur pemerintah, sehingga perlu dikembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis kinerja berdasarkan beban kerja.

3). RPJM ke-3 (2013 – 2018)

Memperhatikan kondisi serta kemajuan pembangunan Kabupaten Gianyar yang telah dapat dicapai pada periode sebelumnya, maka secara umum skala prioritas pembangunan pada periode 2013-2018 ditekankan pada upaya untuk lebih memantapkan pembangunan di segala bidang dengan penekanan pada lebih meningkatkan kualitas sumberdaya manusia serta penguatan daya saing ekonomi tanpa meninggalkan akar budaya.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita, menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatnya tingkat dan kualitas pendidikan masyarakat, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, menurunnya kesenjangan kesejahteraan serta makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa.

Daya saing perekonomian meningkat melalui penguatan industri kecil dan menengah sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian dan peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan serta meningkatnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Gianyar yang berbudaya diwujudkan dengan upaya lebih memantapkan jatidiri dan mengembangkan modal sosial melalui menerapkan nilai-nilai luhur budaya Bali, lembaga-lembaga tradisional dan lembaga adat tetap eksis dan memberi kontribusi yang lebih besar dalam menyukseskan pembangunan di Kabupaten Gianyar.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang.

Untuk mewujudkan stabilitas daerah dan tata pemerintahan yang baik, maka dalam masa RPJM ke 3 diprioritaskan pada peningkatan pelayanan publik di berbagai sektor pemerintahan secara efisien dan efektif.

4). RPJM ke 4 (2018 – 2023)

Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dari RPJM 2013-2018 maka penekanan dan skala prioritas pembangunan pada RPJM periode 2018-2023 ini secara umum ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya manusia berkualitas serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi maju akan meningkatkan daya saing perekonomian sehingga nilai tambah yang dapat diterima masyarakat dapat ditingkatkan. Dengan demikian dapat ditekan tingkat pengangguran dan angka kemiskinan sehingga akses masyarakat ke bidang pendidikan dan kesehatan akan semakin membaik. Pada periode ini pengembangan kepariwisataan semakin kondusif dan pada periode ini juga diharapkan pemanfaatan teknologi maju di bidang pertanian dan industri sudah semakin meningkat.

Daya saing perekonomian kabupaten Gianyar semakin kuat karena meningkatnya produktifitas, kualitas produk dan efisiensi usaha akibat dari penggunaan teknologi maju sehingga kesejahteraan masyarakat semakin membaik. Diharapkan pada tahun 2025 rata-rata lama pendidikan penduduk Kabupaten Gianyar sudah mencapai 12 tahun atau tamat sekolah menengah atas

Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mewujudkan stabilitas daerah dan tata pemerintahan yang baik, maka dalam masa RPJM ke 4 diprioritaskan pada peningkatan kualitas dan kemampuan aparatur pemerintah, sehingga terwujud aparatur yang profesional dan memiliki daya saing.

5). RPJM ke 5 (2023 – 2025)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dari RPJM 2018-2023 maka perencanaan pembangunan masa transi 2023-2025 substansinya diambil dari RPJM 2023-2028 yang ditujukan untuk memantapkan landasan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Pada periode ini kegiatan usaha pertanian, industri dan pariwisata harus sudah dapat dilakukan secara maju, modern dan mampu bersaing di dunia global. Dengan semakin mantapnya pembangunan sektor pertanian, industri dan pariwisata, maka pendapatan perkapita masyarakat semakin besar. Semakin besarnya daya beli masyarakat Kabupaten Gianyar maka sektor ekonomi lainnya juga akan semakin berkembang.

Sejalan dengan kemajuan tersebut, pembangunan dibidang agama dan budaya sudah pula semakin mantap sehingga terwujud tata kehidupan yang lebih baik dan harmonis. Sedangkan dibidang sumberdaya manusia dan IPTEKS telah tercapai pula kemajuan yang cukup pesat sehingga terwujud kualitas SDM yang tinggi dan produktif serta berkembangnya kegiatan IPTEKS yang dapat mendorong kemajuan teknologi dan penciptaan produk-produk baru yang dapat dipasarkan. Disamping itu, kualitas lingkungan hidup juga sudah semakin baik dan pengelolaan sumberdaya alam juga sudah dapat dilakukan secara berkelanjutan (sustainable). Dengan demikian, pada akhir periode ini, visi pembangunan Kabupaten Gianyar sudah harus dapat dilaksanakan dengan baik

Untuk mewujudkan stabilitas daerah dan tata pemerintahan yang baik, maka dalam masa RPJM ke 5 diprioritaskan pada terwujudnya pemerintahan yang mampu mengembangkan teknologi dan informasi (*e-goverment*).

BAB VI

KAEDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2005–2025 yang berisi Visi, Misi, Sasaran dan Arah Pembangunan Daerah, merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 tahun ke depan. RPJPD ini juga menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah, pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD.

Keberhasilan dari pada pelaksanaan pembangunan perlu didukung oleh: (1) komitmen dari kepala daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah; (3) keberpihakan kepada rakyat; (4) transparansi dan (5) partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

BUPATI GIANYAR

TJOK OKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI